

BAB IV

SOEKARNO SESUDAH KEMERDEKAAN MENGGAGAS PEMIKIRAN SEKULARISASI POLITIK ISLAM

A. Sekularisasi Politik Islam Soekarno

Soekarno adalah sosok fenomenal yang menarik untuk dikaji lebih dalam dalam berbagai hal. Penulis menganalisa tentang kebijakan politiknya yang cenderung sekularisme tapi berbeda dengan rumusan sekular pada umumnya, yakni memisahkan agama dari negara. Pemikiran Soekarno tidak memihak Islam tetapi juga tidak melepaskan pemahaman keislaman. Hal inilah yang menarik untuk menjadi kajian lebih dalam. Ada beberapa hal yang bisa penulis munculkan berkenaan dengan bentuk sekularisasinya, yaitu :

1. Agama tidak ada Hubungan dengan Negara

Soekarno berpendapat bahwa Islam adalah agama wahyu, yaitu wahyu Allah, dan bukan satu sistem sosial, yakni sebagai satu sistem yang mengandung aturan-aturan kemasyarakatan, seperti pengaturan organisasi sosial politik dan berisi pedoman kehidupan bermasyarakat,¹ meningkatkan ketinggian budi pekerti dan moral, serta mencegah manusia terjerumus pada hal-hal yang dapat merendahkan martabat kemanusiaan.²

Menurut Soekarno, tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis pernyataan yang terperinci tentang pengaturan kemasyarakatan. Demikian halnya dengan pendapat yang berkembang dikalangan sebagian besar umat Islam tentang peraturan agama dengan negara. Soekarno menolak pendapat yang mengharuskan peraturan agama dengan negara, karena tidak ditemukan dalam sumber ajaran Islam yang menyatakan demikian. Kalau bentuk pemerintahan yang menyatukan antara agama dengan negara ada, maka menurut Soekarno harus ada kesepakatan, atau ijma

¹ Soekarno, "Me-moeda"kan Pengertian Islam", untuk lebih jelas lihat *Pandji Islam*, No. 15, 15 April 1940, hlm. 127. Dan Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, *Loc. cit.*, hlm. 380

dikalangan umat Islam untuk menyatukan antara agama dengan negara.³

Soekarno membandingkan antara motivasi pemisahan agama dengan negara yang terjadi di Turki dengan Indonesia, Soekarno mengatakan :

Bagi kita keadaan di Turki itu sebenarnya bukan keadaan asing. Bagi kita pemisahan antara agama dengan negara itu, dengan ada perbedaan-perbedaan yang saya tidak bicarakan disini sedang kita alami. Bagi kita agama Islam adalah urusan kita sendiri, dan bukan urusan pemerintah. Keadaan sama tetapi motif disini dan Turki lain.⁴

Menurut Sukarno ada dua alasan utama mengapa Turki memisah agama dari negara yaitu alasan ekonomi dan politik.⁵ Keadaan di Turki berbeda dengan Indonesia. Turki diperintah oleh bangsa sendiri dan Indonesia dijajahan Jepang dan Belanda.⁶

Di samping itu, jalan pikiran Soekarno dapat dilihat dalam kaitannya dengan pemahaman tentang Islam yaitu bukan sebagai sistem kemasyarakatan, sehingga ia berkesimpulan bahwa kehidupan beragama dan bernegara adalah urusan umat Islam sendiri.⁷ Alasan di atas, Soekarno kemudian mengutip Essad Bey, Soekarno menjelaskan tujuan pemisahan itu agar agama tidak dijadikan alat untuk memerintah karena :

² Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, *Loc. cit.* hlm. 391.

³ Dauglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia; Demokrasi, Islam, dan Idiologi Toleransi*, Terjemahan Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta : Matahari ; 1995), hlm. 206.

⁴ Ir. Soekarno, "Me-moeda"kan Pengertian Islam", *Dibawah Bendera Revolusi*, *Loc. cit.* hlm. 378.

⁵ Satori Akhmad dan Sulaiman Kurdi, 2010. *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, cet 2, Yogyakarta: Politeia Press, hlm. 125.

⁶ Dauglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia; Demokrasi, Islam, dan Idiologi Toleransi*, Terjemahan Hartono Hadikusumo, *Loc. cit.* hlm. 130.

⁷ Syamsul Arifin,, *Ideologi dan Praksis Gerakan social Kaum Fundamental*, Malang, UMM Press,2005. hlm. 221.,.

“... manakala agama dipakai buat pemerintah, ia selalu dipakai alat penghukum ditangannya raja-raja, orang-orang zalim dan orang-orang tangan besi”.⁸

Karena itu pelaksanaan ajaran agama menjadi tanggung jawab pribadi-pribadi muslim, bukan negara, dan negara tidak dapat memaksakan pelaksanaan ajaran agama kepada masing-masing individu. Penghayatan agama yang sesungguhnya hanya dapat tumbuh berdasar pada adanya kesadaran masing-masing. Sedangkan apabila negara atau pemerintah turut campur dalam bagian yang paling suci dari hak-hak manusia, dalam hal ini agama, maka akibatnya kata Soekarno, ia akan merantai hak kemanusiaan kehidupan beragama sebagaimana di Turki.⁹

Selanjutnya terjadinya proses penghayatan keislaman adalah menjadi tanggung jawab pribadi muslim, bukan negara, dan negara tidak dapat memaksakan pelaksanaan ajaran agama kepada masing-masing individu. Tugas untuk menghidupkan kemauan beragama (*religiuse with*) menjadi kewajiban mubaligh.¹⁰ Sebaliknya apabila diterima rumusan persatuan agama dengan negara, maka yang terjadi pada pandangan Soekarno adalah pemaksaan terhadap warga negara, dan hal ini bertentangan dengan hakikat Islam yang menekankan aspek musyawarah.¹¹ Dan pada bangsa yang banyak di antara penduduknya terdiri dari bukan Islam, maka pemisahan agama dan negara itu, menurut Soekarno adalah merupakan satu keharusan apabila negara itu tidak ingin terjerumus dalam konflik yang berkepanjangan.¹²

⁸ Edwar Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, Terjemahan Anna Hadi dan Rahmani Astuti, (Bandung ; Mizan ; 1984), hlm. 124

⁹ Pernyataan ini ditulis Soekarno dari buku *Turkey faces West*, karangan Halide Edib Hanoum seorang penulis wanita dari Turki yang mengatakan : “ *it would fetter the religious life of the Turks*”, *Ibid.*, hlm. 443.

¹⁰ Soekarno, “Saja Koerang Dynamis”, *Pandji Islam*, Mo. 29, 22 Juli 1940., hlm. 14.

¹¹ Iman Toto K Rahardjo dan Suko Sudarso (editor), *Bung Karno : Islam, Pancasila dan NKRI.*, *Loc. cit.*, hlm. 54.

¹² *Ibid.*, hlm. 59., tampaknya pikiran Soekarno sangat memperhatikan kemajemukan bangsa ini yang terdiri dari bermacam suku, agama, budaya dan letaknya yang berpencar

Pernyataan tentang cita-cita Islam, termasuk cita-cita tentang kenegaraan, diungkapkan kembali pada tahun 1953, yaitu 8 tahun setelah ia menjabat kepala negara :

Apakah ada cita-cita Islam, saudara²? Dengan tegas dijawabnya ialah : ia ada. Islam mempunyai cita-cita. Islam mempunyai macam-macam cita-cita. Cita-cita tentang ketatnegeraan punya, cita-cita tentang kehidupan rohani khususnya sudah barang tentu ada. Ditentang hal ini, saudara² terutama sekali didalam kaum intelektual masih banyak kesalahpahaman.¹³

Adanya cita-cita keislaman dalam lapangan kehidupan, menyebabkan Islam bukan hanya sebagai urusan pribadi tetapi mengandung ajaran-ajaran tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan. Soekarno menyatakan salahnya anggapan sementara orang yang melihat agama itu sebagai urusan pribadi.¹⁴

Masih sering kita mendengar ucapan: “Janganlah dibawa agama didalam urusan negara, janganlah dibawa unsur agama didalam hak politik”. Ini adalah tidak sesuai dengan Islam. Islam bukanlah agama yang dinamakan orang satu *privat zaak*. Islam tidak mengenal batas antara apa yang disebut “agama” dengan hidup kemasyarakatan, hidup dan kenegaraan.¹⁵

Di bagian lain, Soekarno melukiskan Islam itu sebagai sintesa antara duniawi dan ukhrawi, antara hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan sesamanya.¹⁶ Atas dasar itulah menurut Soekarno bahwa Islam itu disebut dengan pandangan hidup bukan semata-mata agama.¹⁷ Berdasar pada pandangan tersebut, Soekarno membedakan atas konsep Islam

¹³ Soekarno, *Negara Nasional dan Tjita² Islam, Ibid.*, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁵ Iman Toto K Rahardjo dan Suko Sudarso (editor), *Bung Karno : Islam, Pancasila dan NKRI, Loc. cit.*, hlm., 35.

¹⁶ Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, *Bung Karno dan Wacana Islam ; Kenangan 100 Tahun Bung Karno, Loc. cit.*, hlm. 40.

¹⁷ Soekarno, *Negara Nasional dan Tjita² Islam, Ibid.*, hlm. 5.

tentang negara dengan pandangan Kristen tentang negara yang disebutnya dengan *de scheiding tussen Kerk en Staat* yaitu pemisahan antara gereja dengan negara.¹⁸

Dari pernyataan Soekarno di *Pandji Islam* (1940) yang menegaskan bahwa “agama Islam adalah urusan kita sendiri”, dengan pernyataannya tahun 1953 bahwa Islam “bukanlah agama yang ditanamkan orang satu *privaat zaak*, Akan tetapi apabila dikaji lebih jauh pernyataan tersebut tidaklah bertentangan. Pernyataan yang pertama memberi pengertian bahwa agama harus dilepaskan dari negara, dengan pengertian umat Islam janganlah hanya terpaku pada bentuk luar (*uiterlijke vormen*) saja dan tidak menyatakan isi yang melekat di dalam imannya (*intrinsieke waarden*), karena cara seperti ini menunjukkan tidak adanya kesediaan berfikir secara strategis.

Dengan beralihnya mereka kepada *intrinsieke waarden*, maka secara pelan-pelan hasil sosialisasi keislaman yang ada pada diri tiap muslim akan membentuk arus pemikiran yang sama. Maka terwujudlah masyarakat yang Islami itu, dan selanjutnya akan membentuk budaya Islam pada tingkat yang lebih tinggi. Demikianlah agaknya yang dimaksudkan dengan pernyataan yang kedua, yaitu Islam bukanlah sekedar *privat zaak*.¹⁹

Soekarno mengutip pendapat Faisal Hak yakni, memisahkan agama dari negara belumlah berarti melepaskan ikatan agama masyarakat itu. Karena pemerintah (*staat*) tidak dapat disamakan dengan pergaulan hidup (*maatschappij*), dan pemerintah hanyalah satu muka dari bangunan pergaulan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5. Kekhawatiran pengkritik Soekarno terhadap ide pemisahan itu sedikit banyaknya ikut dipengaruhi oleh konsep hubungan gereja-negar, agama telah berkurang fungsinya.

¹⁹ *Ibid.*, , hlm. 14. Dwi Purwoko Dwi Purwoko et. all., *Negara Islam*, (Depok: PT. Permata Artistika Kreasi, 2001), hlm. 82

hidup.²⁰ Dengan pengertian pemisahan agama dari negara berarti memisahkan agama dari *staat* bukan dari *maatschappij*.²¹

Pandangan Soekarno yang melihat perjuangan keislaman itu lewat upaya sosialisasi Islam, dan dengan demikian diharapkan akan lahir generasi yang memperjuangkan Islam.²² Tetapi sekalipun demikian, pemikiran Soekarno yang memisahkan agama dengan negara dapat disebut sebagai alternatif lain dari pandangan tokoh-tokoh umat Islam yang telah terlebih dahulu mendominasi pola pemikiran umat Islam di Indonesia yaitu mengharuskan mempersatukan agama dengan negara.²³

Akan tetapi, kalau intelektual muslim seperti Natsir memahami ungkapan itu dalam kaitan perlunya mendirikan sebuah negara yang mempersatukan agama dengan negara. Sebaliknya Soekarno memahaminya sebagai perlunya mendirikan negara kebangsaan yang dapat mengobarkan cita-cita keislaman. Cara seperti inilah pola pemikiran keislaman Soekarno yang disebut C.A.O. Van Mieuwenhuijze dengan *deconfessionalized muslim thought*, yaitu melepaskan pemahaman Islam dari pola berfikir yang dianut kelompok intelektual muslim tersebut.²⁴

Rumusan pemisahan agama dengan negara diwujudkan Soekarno pada konsep dasar negara yang dicituskannya tanggal 1 Juni 1945 didepan sidang BPUPKI. Oleh karena itu,

²⁰ Faisal Hak, "Sekedar Pengertian: Pemisahan Agama dengan Negara", *Pandji Islam*, No. 33, 19 Agustus 1940, hlm. 633. Tulisan ini adalah sebagai pembalasan terhadap tulisan Soekarno yang berisi pemahaman agama dan negara.

²¹ Soekarno, "Me-moeda"kan Pengertian Islam", *Pandji Islam*, *Loc. cit.*, hlm. 17.

²² Edwar Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, Terjemahan Anna Hadi dan Rahmani Astuti, *Loc. cit.*, hlm. 124.

²³ Tentang pandangan intelektual muslim tersebut lihat misalnya M. Natsir, *Capita Selecta 3*, (Jakarta, ; PT Abadi, Panitia Peringatan Refleksi Seabad M. Natsir Pemikiran dan Perjuangannya, dan Yayasan Capita Selecta, ; 2008)., Cetakan Pertama, hlm. 15.

²⁴ Tentang bentuk-bentuk pemikiran politik yang membedakan pemikiran Soekarno dengan politik yang berkembang di Indonesia lihat Herbert Feith, Lancer Castles (eds), *Indonesia Political Thinking, 1945-1965*, (Ithaca, London, Cornell University Press, 1970), hlm. 170 dan Mohammad Kamal Hassan, *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980). hlm. 142.

disamping adanya aspek material dalam rumusan Pancasila itu, terlihat pula arus kuat kerohanian yaitu kepercayaan kepada Tuhan dalam konsep dasar negara itu, sungguhpun bagi sementara pihak belum puas dengan warna kerohanian yang ditampilkannya dalam Pancasila itu, melihat jalan pikiran Soekarno tersebut, ada sedikit keanehan, karena perhatiannya yang mendalam terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan, padahal ia hanya mengenyam pendidikan model Barat yang kurang mementingkan Islam. Hal ini agaknya disebabkan dari latar belakang pemikirannya tentang sejarah, runtuhnya peradaban suatu agama atau bangsa manakala penganutnya hanya mementingkan hal-hal yang bersifat kebendaan semata, sebagaimana hal itu telah terjadi pada *Cristendom* sekarang. Demikian pula sewaktu Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya, Soekarno mengatakan bahwa Nabi telah mengingatkan malapetaka yang akan menimpa umatnya kalau mereka terlalu mementingkan kebendaan.²⁵

Agar umat manusia yang membentuk satu negara tidak terjerumus dalam permusuhan yang berkepajangan, maka ia harus meninggalkan segala pemikiran yang hanya mendekatkan pada aspek kebendaan semata. Mereka harus mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang selanjutnya mendapatkan bimbingan dari Tuhan, karena sikap inilah yang membawa kepada demokrasi dan menghindarkan negara dari kediktatoran.²⁶ Soekarno menyatakan hal itu

²⁵ Soekarno, "Der Untergang Des Abendlandes", *Dibawah Bendera Revolusi*, *Loc. cit.*, hlm. 480 ; di awal tulisannya, Soekarno mengutip al-Qur'an (5): 14, dan diakhir tulisannya Soekarno mengatakan: "Maka saya kira, umat Islam sekarangpun sudah berbuat kesalahan itu. Dari dulupun sudah! Orang Islam banyak yang melepaskan tauhid, banyak yang menyekutukan Tuhan, banyak yang musyrik. Orang Islam banyak yang didalam urusan pencaharian rezekinya melanggar azaz-azaz kemasyarakatan Kerajaan-kerajaan Islam banyak yang berhantaman satu sama lain, - bukanlah kitab tarikh, dan tuankan membenarkan perkataanku saya ini, - dan dikemudian hari akan menghantam satu sama lain, kalau tidak sendi-sendi masyarakat itu boleh dirubah dan dibawa kepada petunjuk yang asal; tolong menolong, bagi membagi, tidak menelan orang lain, untuk mengenyangkan diri sendiri. camkanlah itu. Sebab sejarah terus berjalan, dan segala kesalahan tak urunglah kita rasakan akibatnya nanti" tulisan di atas pada mulanya dimuat dalam *Pandji Islam* (1940).

²⁶ Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986). Hlm., 170 dan Robert W. Hefner, *Civil Islam : Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton N.J.: Princeton university Press, 2000). hlm. 113.

dalam pidatonya sewaktu memperingati ulang tahun proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1947 di Yogyakarta :

Maukah kita berkebudayaan! Ingatlah kepada Tuhan carilah pimpinan Tuhan. Bangsa yang tidak dipimpin Tuhan diperintah oleh orang-orang zalim! “*man must be governed by God or they will be governed by tyrans*”. Ingatlah hal ini setiap waktu.²⁷

Menurut Soekarno yang dipentingkan oleh Islam adalah :
 “.... ia minta satu staat yang betul-betul menjadi api keislaman di dalam adanya umat”.²⁸ Prinsip pemahaman Ketuhanan menjadi titik tolak Soekarno dalam mengkaji perkembangan masyarakat. karena itu agaknya tidak terdapat alasan yang kuat untuk mempertentangkan konsep kebangsaan itu dengan keyakinan kepada Tuhan. Sungguhpun tidak secara resmi dicantumkan dan konsep ideologi Islam sebagai landasan utama dasar negara itu, tetapi paham ketauhidanlah sesungguhnya puncak tertinggi dari berbagai pandangan Ketuhanan.²⁹ Soekarno menjawab kritikan itu dengan mengatakan :

Islam tidak bertentangan sebenarnya menurut fahamku dengan kenasionalan, Islam tidak melarang kita menyusun satu negara nasional. Tetapi yang selalu disalahweselkan ialah kiranya jikalau engkau nasional engkau anti agama. Jikalau engkau nasional, engkau memberhalakan tanah air, Tidak! Kalau aku cinta kepada tanah air maka aku memberhalakan tanah airku. Rasa nasional adalah lepas daripada itu.³⁰

²⁷ Soekarno, *Amanat Soekarno I, 1945-1950*, (Jakarta: PT. Inti Idayu Press, Yayasan Pendidikan Soekarno, 1985), hlm. 28.

²⁸ Soekarno, “Saya Kurang Dinamis”, *Pandji Islam* No. 29, 22 Juli 1940, hlm. 350, *Dibawah Bendera Revolusi, Loc. cit.*, hlm. 407. Di bagian lain Soekarno menyertakan pendapatnya: “Buat apa kita takut akan satu *constitusioneelen Wijsheid* (Kebijaksanaan hukum negara), bahwa *staat* dipisah dari agama?... *staat* yang dipisah dari agama, asal dari *democratie*, dengan sepenuh-penuhnya bisa menjadi *staat* Islam sejati”.

²⁹ Soekarno, *Negara Nasional dan Tjita² Islam, Loc. cit.*, hlm. 10: lihat pula kritik nasionalis Islami pada majalah *Pembela Islam*, No. 29, Juli 1931, hlm. 2-5.

³⁰ Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, *Bung Karno dan Wacana Islam ; Kenangan 100 Tahun Bung Karno, Loc. cit.*, hlm. 40.

Menurut Soekarno dasar paham kebangsaan (nasionalisme) yang dikemukakannya, sesungguhnya bukanlah merupakan hal yang asing bagi gerakan kesadaran dan kebangkitan Islam yang dikemukakan al-Afghani dengan mengkhotbahkan nasionalisme dan patriotisme, rasa luhur diri, rasa kehormatan bangsa, sekalipun seruannya itu dijawab oleh lawan politiknya sebagai *chauvinisme*.³¹

Letak peranan agama dan negara kebangsaan itu, menurut Soekarno harus dilihat dari dua hal yang berbeda tetapi dapat bekerja sama untuk saling menyuburkan. Hubungan pemahaman agama yang baik dapat menjurus kepada terciptanya kerukunan nasional dalam kebangsaan nasional. Masing-masing penganut agama berlomba-lomba membudayakan ajaran agamanya, dan karena itu terciptalah persaingan yang sehat serta saling menghormati kedudukan masing-masing, dan keadaan seperti dilukiskan tersebut dinyatakan dengan Ketuhanan yang berkebudayaan.³²

Sedang tugas umat Islam, menurut Soekarno adaah membela cita-cita Islam yaitu terlaksananya ajaran Islam dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Tetapi pembelaan itu hendaknya tidak ditempuh dengan cara paksaan, melainkan melalui jalur permufakatan dan permusyawaratan dengan berbagai anggota perwakilan warga negara itu. Soekarno berpendapat bahwa hal ini sejalan dengan jiwa Indonesia. Jiwa Indonesia ialah satu jiwa, yang senang terhadap mufakat dan musyawarah, sebagaimana Islam mendidik umatnya untuk cinta kepada mufakat dan musyawarah, sebagaimana firman Tuhan *wa amruhum Syura bainahum* dan *wa shawirhum fil amri*. Jiwa

³¹ Soekarno, "Nasionalisme, Islamisme, Marxisme", *Dibawah Bendera Revolusi*, *Loc. cit.*, hlm. 10-11; *Suluh Indonesia*, (1926)

³² Soemali Prawirosoedirdjo dkk, *Lahirnya Pantja-sila*, *Loc. cit.*, hlm. 43.

Indonesia ini menurut Soekarno, tampak jelas pada adat Minangkabau dan rapat desa di Jawa.³³

Soekarno berpendapat bahwa demokrasi yang ada dalam konsep Barat itu sama dengan prinsip musyawarah yang diajarkan Islam. Selanjutnya ia mengatakan bahwa prinsip demokrasi itulah bentuk pemerintahan yang dikehendaki Islam bukan yang otokrasi dan teokrasi. Islam tidak mengenal pemerintahan teokrasi, Islam tidak menerima seorang dalam kelompok yang dominan atas kelompok lain.³⁴

Karena itu proses perjuangan Islam tidak dimulai dari undang-undang negara yang memaksakan orang melaksanakan ajaran agamanya, tetapi harus dimulai dari bawah. Dimulai dari regenerasi yang diharapkan melahirkan suara yang memperjuangkan Islam di parlemen, sehingga kuantitas Islam terwujud dengan banyaknya wakil-wakil yang memperjuangkan Islam. Pandangan tersebut timbul setelah ia mendapat kesan bahwa anggota-anggota BPUPKI waktu itu belumlah mencerminkan jumlah Islam yang mayoritas.³⁵

Dengan lahirnya generasi baru ini, maka muncullah umat Islam yang berkualitas. Hal ini dapat diperoleh bila Islam telah dapat dijelaskan secara rasional. Timbulnya semangat rasional ini adalah sebagai hasil dari perkembangan semangat intelektualisme ini berawal dari lepasnya agama dari ikatan negara, artinya ruang gerak pemahaman agama Islam tidak dibatasi oleh penguasa yang ingin memeralat agama. Sebaliknya pula, kebijaksanaan pengaturan negara akan lebih bebas bergerak, tidak selalu dibatasi oleh berbagai fatwa Syaikh al-Islam yang menolak berbagai pembaharuan dalam kehidupan umat Islam. Soekarno melukiskan sikap menentang Syaikh al-

³³ Soekarno, "Indonesia Versus Fasisme", *Dibawah Bendera Revolusi*, *op.cit.*, hlm. 457-458; tulisan tersebut mulanya dimuat dalam *Pandji Islam* (1949).

³⁴ Herbert Feith, Lance Castles (eds), *Loc. cit.*, hlm. 70.

³⁵ Soemali Prawirosoedirdjo, dkk, *Lahirnya Pantja-sila*, *Loc. cit.*, hlm. 38-39.

Islam itu; “Tiap-tiap vorstel perubahan selalu mendapatkan perlawanan hebat dari Syaikh Al-Islam dan kaum ulama”.³⁶

Kalau Turki memisahkan agama dengan negara karena masalah ekonomi dan politik, hal itu disebabkan karena negara selalu menuntut pembangunan, dan melahirkan berbagai pembaharuan dalam kehidupan sosial.

Apabila agama bersatu dengan negara, maka para pemuka agama cenderung memonopoli kebenaran, sebagaimana kasus yang terjadi pada Turki Usmani. Hal ini telah diperburuk lagi apabila para penguasa dalam menciptakan stabilitas pemerintahan, selalu berusaha menekan berbagai pemikiran yang berwujud pembaharuan, karena pemikiran baru itu cenderung bersikap kritis dalam memandang berbagai persoalan. Dengan demikian, peraturan agama dengan negara hanya akan membuat kedua-duanya sama-sama lemah.³⁷

Menurut Soekarno, terdapat kesamaan antara Indonesia dengan Turki, walaupun berbeda motifnya. Turki merupakan model pertama negeri muslim yang menyatakan secara resmi pemisahan agama dan negara dengan tuduhan negatif, tetapi Soekarno berpendapat sebaliknya. Tindakan Kemal yang melepaskan agama dengan negara harus dipandang sebagai upaya yang berdasar pada itikad baik yaitu memerdekakan Islam dari ikatan negara, agar Islam bukan hanya agama yang memutarakan tasbih di dalam masjid, tetapi menjadikan Islam sebuah gerakan perjuangan.³⁸

Tetapi untuk mencapai tujuan sebagaimana yang digambarkan Kemal, tidak dapat dicapai kecuali melalui perombakan cara berfikir umat Islam yang sejak lama telah diikat oleh berbagai pandangan yang tradisional. Oleh karena

³⁶ Soekarno, “Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dengan Staat”, *Pandji Islam*, No. 23, 10 Juni 1940, hlm. 473.

³⁷ Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia; Demokrasi, Islam, dan Idiologi Toleransi*, Terjemahan Hartono Hadikusumo, *Loc. cit.* hlm. 130.

³⁸ Soekarno, “Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dengan Staat”, *Pandji Islam*, No. 23, 10 Juni 1940, hlm. 370.

itu, maka tujuan melapaskan agama dari ikatan negara negara adalah agar terwujud kemerdekaan negara dari ikatan anggapan-anggapan agama yang jumud, yakni kemerdekaan agama dari hukum-hukum tradisional paham-paham Islam kolot, yang sebenarnya bertentangan dengan jiwa Islam sejati.³⁹

Dukungan Soekarno terhadap pemisahan agama dari negara seperti yang dilakukan Turki, berangkat dari keyakinan bahwa dalam sumber ajaran Islam tidak terdapat ayat yang mengharuskan mempersatukan agama dengan negara, bahkan kata negara sendiri tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. sewaktu seorang pendengar pada saat Soekarno berpidato di Universitas Indonesia tentang negara Nasional dan Cita-cita Islam, menyatakan ada kata daulah, Soekarno menyatakan bahwa ia memahami kata itu bukan berarti negara akan tetapi kedaulatan (*sovereignty*).⁴⁰ Kesimpulan tersebut didasarkannya pada keerangan yang dinyatakan Ali Abd al-Raziq dalam bukunya *al-Islam wa Ushul Al-Hukm*.⁴¹

Gagasan pemisahan agama dengan negara yang dilancarkan Mustafa Kemal, menjadikan dunia Islam sibuk dalam perdebatan tahun 1920-an, yang mempersoalkan apakah Islam hanya sebagai agama yang membawa tuntunan hidup, atau juga sebagai landasan gerakan politik.⁴²

Soekarno menyatakan bahwa Nabi Muhammad membentuk dan memimpin negara Islam di Madinah, sekalipun beliau tidak pernah menyebut wilayah Madinah itu sebagai negara Islam dan beliau sebagai kepala negaranya. Islam itu hanya sebagai agama (*al-din*) dan bukan politik (*al-siyasat*), dan syari'at Islam itu sama sekali jauh dari gaya politik.⁴³

³⁹ Edwar Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, Terjemahan Anna Hadi dan Rahmani Astuti, (Bandung ; Mizan ; 1984), hlm. 124.

⁴⁰ Soekarno, *Negara Nasional dan Tjita2 Islam*, *Loc. cit.*, hlm. 11.

⁴¹ Soekarno, "Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dengan Staat", *Pandji Islam*, No. 23, 10 Juni 1940, hlm. 370.

⁴² *Ibid.*, hlm. 380.

⁴³ Ali 'Abd Al-Raziq, *Al-Islam wa ushul Al-Hukm, Bahs fi Al-Khilafat wa Al-Hukm Al-Islamiyat*, (Kairo, Musahamat Mishriyyat, 1344 H/1925 M), cetakan III, hlm. 84-85.

Ketundukan kepada nabi ialah membenaran secara sempurna, yang diikuti dengan membenaran fisik. Sebaliknya kewenangan seorang kepala negara hanya bersifat materiil (*walayat al-maddiyat*) semata, yaitu berupa ketundukan jasmani dari rakyatnya, tanpa ada hubungan langsung secara rohani antara seorang kepala negara dengan rakyatnya.⁴⁴

Wewenang kenabian akan berakhir pada masa kenabian, karena wewenang itu hanya dimiliki seorang nabi dan berada pada tingkat kenabian (*dairat al-nubuwwat*). Dengan berakhirnya tingkat kenabian tersebut, maka petunjuk yang bersifat Ketuhanan tidak turun lagi dalam siklus kehidupan manusia sampai saat ini, paling jauh, petunjuk itu hanya datang kepada orang-orang yang mencapai tingkat-tingkat pensucian.⁴⁵

Soekarno menyebut lembaga khalifah itu hanya semata-mata tingkat-tingkat perkembangan sejarah (*merely historical degrees*). Hal ini memberikan pengertian bahwa konsep khilafah dipandang hanya sesuai dengan situasi dan wilayah tertentu. Pendirian ini berangkat dari pemikiran bahwa masalah kenegaraan adalah masa kemasyarakatan yang tidak ditentukan Nabi sebagaimana pengaturannya kecuali menggariskan prinsip-prinsipnya.⁴⁶

Mengenai bentuk pemerintahan yang mempersatukan fungsi kepala pemerintahan (sultan) dengan fungsi kepala negara (*khalifah*) atau yang disebut oleh Soekarno dengan bentuk *caesaro-papisme* sebagaimana yang ada di Turki, adalah hasil perpaduan dari tiga peradaban yaitu : "... peradaban

⁴⁴ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*, (Jakarta : GIP : 2004). hlm. 30 dan Isa Anshary, *Manifest Perjuangan Persatuan Islam*, (T.K. : TP., : 1958), hlm. 14.

⁴⁵ Seyyed Husain Nasr, *Ideals and Realities of Islam*, (London: George Allen & Unwin Ltd, 1975), hlm. 87.

⁴⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'ati Islam (Pakistan)*. *Loc. cit.*, hlm. 221.

Grieks-Byzantijn, ditambah dengan peradaban Arab (Islam), ditambah dengan peradaban Iran”.⁴⁷

Bersatunya ketiga peradaban itu dalam dunia Islam atau wilayah sebelah timur Laut Tengah dapatlah dimengerti yaitu sebagai hasil dari ekspansi yang dilakukan umat Islam ke negeri-negeri lain, dengan adanya persentuhan berbagai bangsa tersebut, berakibat terjadinya interaksi antara budaya, membentuk akulturasi kebudayaan dan lahirlah peradaban baru umat Islam.⁴⁸

Sebagai kelanjutan dari akulturasi kebudayaan ini, menurut Soekarno, mempunyai kaitan dengan masa kejayaan dan kemunduran Islam. Di saat mereka maju, unsur budaya asing dapat mereka manfaatkan untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep yang dibawa Islam. Tetapi manakala mereka tidak bisa lagi memanfaatkan budaya setempat, maka kebudayaan tersebut lebih dominan dan akhirnya akan memperkecil peranan Islam. Dengan demikian, dinamika Islam menjadi lemah dan mundur.⁴⁹

Dalam analisa Soekarno, lembaga sultan-khalifah (*caesaro-papisme*) yang ada dalam dinasti Turki Usmani, bukan berasal dari Islam, tetapi lebih berat karena akulturasi tiga peradaban itu. Oleh karena pengaruh sistem kepercayaan dan kenegaraan yang ada pada agama Kristen Romawi Timur lebih kuat, maka bentuk ini pulalah yang lebih dominan membentuk lembaga sultan-khalifah itu.⁵⁰

⁴⁷ Soekarno, “Apa sebab Turki memisah agama dari Staat”, *Pandji Islam*, No. 23, 10 Juni 1940, hlm. 432; pendapat yang sama juga dikemukakan dalam Adda B. Bazeman, *Politic and Culture in International History*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1960), hlm. 370. Pernyataan Bazeman ini dapat diterima sepanjang yang dimaksud adalah model pemerintahan Turi Usmani, sebaliknya pernyataan itu tidak dapat digunakan untuk menilai bentuk pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin, karena waktu itu pengaruh Persis dan Romawi Timur belum masuk ke jantung pemerintahan Islam”.

⁴⁸ Iman Toto K Rahardjo dan Suko Sudarso (editor), *Bung Karno : Islam, Pancasila dan NKRI*, *Loc. cit.*, hlm., 371.

⁴⁹ Soekarno, “Apa sebab Turki memisah agama dari Staat”, *Pandji Islam*, No. 23, 10 Juni 1940, hlm. 433..

⁵⁰ Budhy Munawar-Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Lembaga Studi Agama

Sistem *caesaro-papisme* Turki Usmani itu pada mulanya muncul pada saat Sultan Salim I pemimpin dinasti itu. Sultan ini merasa tidak memadai lagi untuk mengendalikan wilayah kekuasaan yang begitu luas, kalau bentuk kekuasaan hanya mengikuti bentuk pemerintahan pada masa sultan-sultan sebelumnya. Karena itu, ia bercita-cita untuk melengkapi perangkat kekuasaannya dengan simbol keagamaan.⁵¹

Untuk itu ia menaklukan Dinasti Mameluk yaitu tempat bangkitnya kembali khalifah Abbasiyah setelah sebelumnya dihancurkan tentara Mongol di Baghdad. Sejak tahu ia merampas jabatan dan membawa khalifah membawa atribut kekhalifahan yang ada di Mesir ke Istanbul. Soekarno mengatakan, “Ia adalah satu sultan Turki yang pertama-tama mengambil oper sama sekali 100% segala sifat yang *caesaro-papisme* dan cara pemerintahan Byzantium itu”.⁵²

Menurut Soekarno, sistem *caesaro-papisme* itu hanya bisa berguna, apabila yang menjadi tokohnya orang-orang seperti Salim I, Sulaiman I dan Muhammad II, yaitu orang-orang yang bertangan besi dan sungguh-sungguh seorang diktator. Wafatnya ketiga orang tersebut, berarti hilangnya orang-orang diktator yang selanjutnya membawa lemahnya Dinasti Turki Usmani.⁵³

Oleh karena itu bentuk pemerintahan ini dijalankan dengan kediktatoran, maka menurut Soekarno, sistem *caesaro-papisme* (sultan-khalifah) tidak sejalan dengan cita-cita Islam.

dan Filsafat, 2010) hlm. 212. Mohammad Kamal Hassan, Muslim Intellectual Responses to “New Order” Modernization in Indonesia (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980). hlm. 142.

⁵¹ Iman Toto K Rahardjo dan Suko Sudarso (editor), *Bung Karno : Islam, Pancasila dan NKRI*. Loc. cit., hlm., 371.

⁵² Soekarno, “Apa sebab Turki memisah agama dari Staat”, *Pandji Islam*, No. 23, 10 Juni 1940, hlm. 434, ; sungguhpun Soekarno menyimpulkan demikian, tetapi sejarawan lain menyatakan tidak ada bukti kontemporer yang menyatakan bahwa Salim I menyebut dirinya sebagai khalifah, sekalipun ia berambisi kuat untuk memperluas ekspansi Islam, lihat Sir Thomas W. Arnold, *The Caliphate*, (London : Routledge & Kegan Paul, 1967), hlm. 143.

⁵³ Ibid, hlm. 455: keistimewaan ketiga sultan ini lebih nyata dari sultan-sultan sebelum dan sesudahnya. Kalau Salim I berhasil menaklukan Mesir sebagai pusat Dinasti

Alasannya: *pertama*, karena pada waktu dinasti kuat maka tindakan penguasa bersifat diktator, *kedua*, sewaktu dinasti dalam keadaan lemah, maka pemikiran Islam menjadi jumud (beku). Kejumudan berfikir ini disebabkan karena sultan-khalifah sudah sangat bersandar kepada Syaikh al-Islam, oleh karena itu setiap penguasa tersebut menetapkan bahwa semua kegiatan berfikir, baik yang berhubungan dengan agama atau bukan, harus sesuai dengan kehendak sultan-khalifah serta Syaikh al-Islam sebagai pendamping lembaga kekuasaan tersebut.⁵⁴

Inilah sesungguhnya bentuk perwujudan persatuan agama dengan negara yang dikritik Soekarno itu. Soekarno berpendapat bahwa tindakan Mustafa Kemal di Turki yang disebut memisahkan agama dari negara, dilakukannya dalam tiga tahap, *pertama*, meniadakan *caesaro-papisme* yaitu dengan mencabut jabatan sultan dari khalifah. *Ketiga*, melepaskan agama sama sekali dari tanggungan negara.⁵⁵

Sekalipun Soekarno telah berulang kali menyatakan pendiriannya, bahwa gagasan pemisahan agama dari negara bukan berarti menghilangkan peranan agama dalam pergaulan hidup, bahkan sebaliknya, gagasan itu bertujuan untuk lebih menyuburkan kehidupan Islam dalam negara kebangsaan.

Beberapa kasus pertentangan hubungan umat Islam dengan pemerintah menunjukkan bahwa itulah pokok masalahnya, dan akhirnya merembet kepada masalah-masalah yang lebih praktis seperti yang terjadi di Aceh. Menurut pernyataan para pelaku pemberontakan di Aceh, hubungan menjadi tegang karena instansi kejaksaan memperkenalkan larangan menggunakan khutbah di masjid dan tempat-tempat keagamaan

Abbasiyah III, Sulaiman I memperluas wilayah dan menetapkan undang-undang (zanun), maka Muhammad II berhasil menaklukkan Konstantinopel hingga ia diberi gelar *Al-Fatih*.

⁵⁴ Edwar Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, Terjemahan Anna Hadi dan Rahmani Astuti, (Bandung ; Mizan ; 1984), hlm. 124.

yang lain sebagai tempat membicarakan politik, untuk menentang kebijaksanaan pemerintah.⁵⁶

Tetapi sungguhpun demikian, Soekarno tetap pada pendiriannya dan terus menerus melancarkan ide pemisahan agama dari negara, sekalipun teknis pemisahan itu mengalami penyesuaian dan kompromi dengan tuntutan umat Islam.⁵⁷ Hal ini disebabkan karena sebenarnya ada perbedaan antara Soekarno dengan Kemal. Kalau Kemal disebut sebagai orang yang tidak percaya kepada agama (*agnostik, unbeliever*) karena ia mempunyai kesan bahwa Islam itu adalah *takhayul* dan *primitif*, maka Soekarno sebaliknya. Ia sangat mempercayai ajaran Islam, dan ia berusaha memahami ajaran Islam itu dalam suasana pemikiran yang dinamis. Oleh karena itu, ia selalu berusaha membudayakan Islam ke dalam kehidupannya sehari-hari.⁵⁸

Prinsip dasar yang dipegang Soekarno adalah menyatakan bahwa negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kebangsaan yang berasal dari semua untuk semua warga negara. Di samping itu, karena latar belakang keagamaannya, Soekarno memasukan berbagai hal yang menyangkut kepentingan agama dalam kegiatan kenegaraan, seperti penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Sholat Ied secara kenegaraan, mendirikan Masjid Baiturrahim, Masjid Istiqlal.⁵⁹

Sikap Soekarno itu dapat dilihat dari dua hal, *Pertama*, Soekarno berusaha untuk tetap konsisten dalam hal pandangan

⁵⁵ Soekarno, "Apa sebab Toerki memisah agama dari staat", *Pandji Islam*, No. 26, 1 Juli 1940, hlm. 493; tindakan Kemal itu lahir dari dua pertimbangan utama yaitu pertimbangan politik dan ekonomi.

⁵⁶ Herbert Feith, Lance Castles (eds), Ed. 1988. "Pengantar", dalam *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, *Loc. cit.*, (Jakarta : LP3ES ; 1988), hlm. 132.

⁵⁷ H. A. Notosoetardjo, *Peranan agama Islam dalam Revolusi Indonesia*, (Djakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesia, 1963), khususnya bagian Nur Islam dalam Pancasila, hlm. 37

⁵⁸ Feith, Herbert., Lancer Castles (eds), *Indonesia Political Thinking, 1945-1965*, *Loc. cit.*, hlm. 221..

⁵⁹ Saiful Mujani, "Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Suharto Indonesia" (Disertasi Ph.D., The Ohio State University, 2003), hlm., 34.

keagamaannya, dengan melihat agama merupakan hal yang mutlak bagi kesejahteraan umat manusia, karena itu agama perlu mendapat dorongan dari pemerintah, tetapi agama tetap tidak diterima sebagai dasar negara. *Kedua*, masuknya berbagai kegiatan dan upacara keagamaan dalam berbagai kebijaksanaan kenegaraan, adalah merupakan kelanjutan pandangannya bahwa ajaran Islam yang intinya ada dalam konsep tauhid, merupakan konsep keagamaan tertinggi yang pernah dimiliki manusia, oleh karena itu perlu dilestarikan, apalagi mengingat ambisi Soekarno yang menginginkan negara Indonesia memberikan konsepsi-konsepsi kepada dunia.⁶⁰

Disamping itu tindakannya itu juga dapat dipandang sebagai hasil kompromi antara dia dengan orang-orang Islam yang masih berada dalam batas-batas ideologi sebagaimana teori Donald E. Weatherbee tentang Soekarno. Orang-orang yang masih berada dalam batas-batas ideologi itu yaitu orang-orang Islam yang dipandang dapat menerima gagasan negara kebangsaan dan menginginkan agar kehidupan Islam dapat disuburkan. Sungguhpun masuknya berbagai upacara agama dalam kegiatan kenegaraan dapat pula dipandang dari sisi lain, yaitu hasrat Soekarno untuk melengkapi atribut kekuasaannya dengan perangkat keagamaan, sebagaimana hal ini ditemukan dalam sistem kekuasaan Jawa.⁶¹

Soekarno memberi empat alasan kenapa agama (Islam) tidak ada hubungan dengan negara, yakni sebagai berikut :

⁶⁰ Soekarno mengatakan: “Agama Islam tidak ada yang demikian itu, saudara-saudara Islam memberi pimpinan, sebab, apa agama itu? Agama adalah pimpinan. Islam memberi pimpinan yang masuk hati dan masuk otak. Tidak ada keblingerannya, bahkan rukun iman, bahwa ada Tuhan yang harus kita percayai, masuk akal kita ajaran pancasila berulang-ulang di dalam kongres internasional saya katakan, bahwa sebenarnya pancasila itu adalah satu dasar universal ... dan kecuali pancasila, saudara-saudara, Republik Indonesia memberi konsepsi-konsepsi”, Amanat presiden Soekarno pada peringatan maulid Nabi di Istana Negara, 12 Juli 1965, *Republik Indonesia memberikan konsepsi-konsepsi kepada seluruh dunia*, Departemen Penerangan RI, Penerbitan Khusus No. 380., hlm. 12.

⁶¹ Benedict R.O.G. Anderson berpendapat bahwa gagasan kekuasaan dalam kebudayaan Jawa jelas kelihatan pengaruhnya dalam kepemimpinan Presiden Soekarno, Benedict R.O.G. Anderson, *Gagasan, Loc. cit.*, hlm.13, lihat pula uraian senada dalam Deliar Noer, *Pengaruh ke pemikiran Politik*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 185.

- a. Islam adalah agama wahyu yang mengandung aturan-aturan kemasyarakatan, seperti pengaturan organisasi sosial politik dan berisi pedoman kehidupan bermasyarakat, landasan budi dan moral, serta mencegah mereka terjerumus pada hal-hal yang dapat merendahkan martabat kemanusiaan.
- b. Tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadis ayat yang mengatur negara.
- c. Agama menjadi tanggung jawab pribadi, bukan urusan negara.
- d. Nabi Muhammad tidak Madinah sebagai negara Islam dan Nabi Muhammad bukan sebagai kepala negaranya.

Menurut penulis, pandangan yang dikemukakan Soekarno di atas dilatarbelakangi persoalan, yakni sebagai berikut :

- a. Polemik dengan kelompok Nasional-Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara. Maka argumentasi yang diberikan Soekarno terhadap Nasionalis-Islam ialah bahwa tidak ada landasan yang kuat untuk mendirikan sebuah negara dengan basis agama.
- b. Islam bukan agama monopoli. Indonesia tidak harus didominasi oleh Islam, melainkan nilai-nilai Islam harus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Maka inilah yang dibedakan Soekarno tentang Islam, yakni Islam sebagai religi harus tumbuh dan berkembang di Indonesia tetapi Islam bukan sebagai kekuasaan.
- c. Kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia harus menjadi landasan yang kuat ditengah-tengah keberagaman agama, suku bangsa, warna kulit dan budaya.

2. Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa

Rumusan Pancasila adalah karya puncak Soekarno dalam perantauan intelektualnya. Ide itu dirumuskan sejak masa persiapannya menjadi pemimpin, yaitu di Surabaya, dan dimatangkannya di Ende. Uraian Pancasila yang diusulkan Soekarno

menjadi dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa, disampaikan untuk pertama kali di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945.⁶²

Soekarno mengajukan konsepnya dengan mengemukakan terlebih dahulu bahwa terbentuknya sebuah negara tidak terlepas dari keharusan adanya *Philosofische grondslag*, dasar filsafat atau *Weltanschauung*, yaitu pandangan hidup bangsa yang akan mendirikan negara. Soekarno mengutip dua pendapat tentang pembentukan negara. *Pertama*, teori Ernest Renan⁶³ yang menyatakan bahwa terbentuknya sebuah negara adalah berdasarkan *le desir d'être ensemble* yaitu kehendak untuk bersatu. Menurut Renan, terbentuknya sebuah negara ditentukan oleh kemuliaan bersama dari suatu masyarakat di masa lampunya dan keinginan mereka untuk hidup bersama di masa datang.⁶⁴ *Kedua*, teori Otto Bauwer yang menyatakan bahwa lahirnya suatu bangsa berkaitan dengan kesamaan nasib dan pengalaman.⁶⁵

Soekarno mengkritik kedua teori itu dengan dua alasan. *Pertama*, kedua teori itu hanya melihat aspek kemanusiaan dan tidak melihat aspek geografis. *Kedua*, teori itu tidak melihat unsur budaya, agama, serta bahasa dalam membentuk bangsa. Padahal pergerakan kebangsaan di Indonesia didorong oleh faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, Soekarno kurang tertarik dengan kedua teori itu, ia lebih menyetujui teori geopolitik yang berasal dari Karl Haushofer yang berpendapat bahwa

⁶² Lihat Soemali Prawirosoedirdjo dkk, *Sejarah Lahirnya Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila*, (Jakarta : Penerbit PT Idayu Press : 1986), hlm. 5.

⁶³ Pidato Soekarno tentang persoalan ini pernah diungkapkannya sewaktu menyampaikan pidato di Universitas Sorbonne. Soemali Prawirosoedirdjo dkk, *Sejarah Lahirnya Undang-undang*, *Loc cit.*, hlm. 17. Joseph Ernest Renan (18, 23-1892) adalah seorang teolog, filolog, sejarawan dan ahli sastra Prancis. Ia kemudian memalingkan diri dari panggilan kegerjaan dan mengabdikan diri pada sejarah bahasa dan agama Kristen studinya yang kritis tentang agama Kristen menyebabkan ia sampai pada kesimpulan bahwa a-Kitab dan teologi Kristen adalah evolusi dari dongeng dan mitos primitif, selanjutnya lihat Marwati, *Loc. cit.*, hlm. 220: *The New Encyclopedia Britanica* (Chicago The University of Chicago Press, 1974), Vol. 15, hlm. 671-673

⁶⁴ A.M.W.. Pranarka, *Sejarah pemikiran tentang Pancasila*, (Jakarta: Yayasan proklamasi, Center for Strategic and International Studies, 1985), hlm. 132.

terbentuknya sebuah negara adalah atas dasar ikatan darah dan tanah atau *Blut und Boden Theori*. Teori ini Karl dalam buku berjudul *Geopolitik des Pazifischen Ozeans* (1924). Dengan teori inilah menurut Soekarno dapat dilihat adanya kesatuan wilayah Indonesia.⁶⁶ Soekarno berpendapat bahwa antara orang dan tempat tinggal tidak dapat dipisahkan. Indonesia terdiri dari beribu pulau yang membentang antara laut Pasifik dan laut India dan antara benua Asia dan benua Australia.⁶⁷

Bagi Soekarno masalah persatuan dan kesatuan bangsa adalah persoalan pokok. Ia mengusulkan ; *pertama*, kebangsaan sebagai dasar pertama. Kebangsaan menurut Soekarno memiliki cakrawala yang luas dan merasa dirinya sebagai anggota masyarakat. Ia mengutip ucapan Mahatma Gandhi : “*my nasionalism is humanity*”, saya adalah orang nasionalis tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan.⁶⁸ *Kedua*, internasionalisme atau perikemanusiaan. Internasionalisme harus dibedakan dari kosmopolitanisme yaitu paham yang meniadakan kebangsaan. Internasionalisme tumbuh subur dan berakar pada nasionalisme.⁶⁹ *Ketiga*, yaitu permusyawaratan atau perwakilan. Ide dan cita-cita dari berbagai paham dan kelompok harus disalurkan melalui lembaga permusyawaratan,

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 18.

⁶⁶ Suhartoyo Hardjosatoto, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, suatu Analisa Ilmiah*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 47.

⁶⁷ Lihat juga Jeanne S. Mintz, *Mohammed, Loc. cit.*, hlm. 81-83.

⁶⁸ Soemali Prawirosoedirdjo dkk, *Sejarah Lahirnya Undang-undang*, hlm. 22; Soekarno berbeda pendapat dengan Agus Salim dalam mengartikan kata kebangsaan. Salim melihatnya dari pandangan teologis, sedang Soekarno melihatnya dari sudut pergaulan antar manusia dan antar bangsa. Kata Soekarno, nasionalisme kita adalah nasionalisme yang didalam kebesarannya dan keluasannya mengasih tempat cinta pada lain-lain bangsa. Soekarno mengartikan kebangsaan dengan menekankan arti yang lebih luas yaitu terikat makna yang lebih luas tentang keuniversalan umat manusia, sungguhpun mereka hidup berbangsa-bangsa, selanjutnya lihat Ir. Soekarno, “Kearah Persatuan! Menyambut tulisan H. A. Salim, “*Dibawah Bendera Revolusi, Loc. cit.*, hlm. 109-114; lihat pula tulisan yang sama dalam pidato Buku Peringatan, *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 350-355; artikel tersebut pada mulanya dimuat di Harian *Fadjar Asia*, 18 Agustus 1928, *Sukuh Indonesia Muda*,

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 23; pemikiran Soekarno tentang dasar kedua ini di samping mempunyai akar dalam pemikiran filsafat Barat, juga sebagai pengaruh pandangannya tentang hakikat ajaran Islam yang tauhid. Tauhid mengandung pengertian adanya kesatuan yang universal dari yang wujud ini karena bersumber dari Wujud Yang Mutlak yaitu Allah SWT. Di samping itu pula prinsip tauhid ini memberikan pengertian akan kesamarataan makhluk di hadapan Allah SWT tanpa membedakan ras dan asal keturunan.

termasuk peran agama. Soekarno menerangkan strategi penempatan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cita-cita Islam dapat tersalurkan terutama kebenaran praktis dan bukan kebenaran normatif.

Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat bagian besarnya rakyat Islam, dan memang jikalau memang Islam disini agama yang hidup berkobar-kobar dikalangan rakyat marilah kita pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan itu.⁷⁰

Keempat, adalah prinsip kesejahteraan yang menuju keadilan sosial. Tujuannya adalah mensejahterakan semua warga negara, sehingga tidak akan ada kemiskinan di Indonesia.⁷¹ Kelima, Ketuhanan merupakan *causa finalis* dari berbangsa dan bernegara, melainkan adalah dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan diartikan bahwa tiap-tiap orang Indonesia hendaknya bertuhan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sikap ini disebut Soekarno dengan bertuhan secara berkebudayaan dan berkeadaban serta saling menghormati,⁷² demi terwujudnya integrasi bangsa.

Pancasila itu bermula dari fisik menuju metafisik atau sistem piramida terbalik dengan menempatkan kebangsaan di atas dan Ketuhanan di bawah. Soekarno menempatkan kebangsaan akan mencapai persatuan nasional,⁷³ sedangkan ketuhanan merupakan bagian dari faktor integrasi. Tetapi

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 24

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 25; prinsip keempat ini bagi Soekarno merupakan titik temu antara Islam yang menolak penindasan dengan pandangan kaum sosialis

⁷² *Ibid.*, hlm., 28

⁷³ Menurut Karl D. Jackson, yang selalu diimpikan Soekarno dengan konsep Pancasila itu, adalah sebagai simbo yang mempersatukan politik Indonesia, selanjutnya lihat Karl

dalam perkembangannya bahwa ketuhanan tidak mesti dilihat sebagai faktor desintegrasi, oleh sebab itu ditetapkan sebagai sila pertama. Selanjutnya, pemikiran Soekarno selalu berangkat dari hal yang rasional menuju kepada yang suprarasional yaitu Tuhan sebagai Khalik, pola pemikiran ini kemungkinan karena dipengaruhi latar belakang pemahaman agama dan pendidikannya.

Soekarno menghubungkan nasionalisme dengan membela hak dan kebenaran, internasionalisme dengan ukhuwah Islamiyah, musyawarah dengan anjuran *syura*, kesejahteraan sosial dengan perintah untuk berlaku adil, dan ketuhanan dengan tauhid. Konsep keislaman dioperasionalkan ke dalam ruang lingkup yang lebih luas yaitu manusia Indonesia secara keseluruhan. Sikap Soekarno yang disebut C.A.O. Van Nieuwenhuijze yaitu pembentukan kementerian agama tahun 1946. Gagasan Soekarno itu disebut *deconfessionalized muslim thought* yaitu melepaskannya dari kepercayaan pemikir Islam.⁷⁴

Menurut J.M. Van der Kroef, ada tiga pemikiran yang membentuk alam pemikiran di Indonesia. *Pertama*, ideologi tradisional komunal di Jawa dan Sumatera bercampur dengan etos sosial Hinduisme. *Kedua*, Islam ortodok dan pembaru. *Ketiga*, sejarah Liberalisme yang bercampur dengan ideologi Marxisme.⁷⁵ Pandangan Soekarno tentang Islam lebih banyak mendominasi pemikirannya tentang dasar negara.⁷⁶

Menurut Soekarno, Pancasila adalah kepribadian gotong rotong. Kelima sila dalam Pancasila dapat diperas menjadi tiga

D.Jackson, *Traditional Authority, Islam and Rebellion; A Study of Indonesia Political Behavior*, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1980), hlm. 153.

⁷⁴ C.A.O. Van Nieuwenhuijze, *Loc. cit.*, hlm. 157-189.

⁷⁵ J.M. Van der Kroef, *Indonesia in the Modern World*, Part. II, (Bandung, Masa Baru Ltd., 1956), hlm. 199.

⁷⁶ Hary J. Benda, berpendapat lain. Ia mengatakan bahwa ideologi resmi negara yaitu Pancasila adalah bersifat kejawaan yang dinamis dan setengah Bali. Sebagai pencipta Pancasila, Soekarno selalu mengaitkannya dengan masa pra-Islam yang cemerlang di masa lalu. Hal inilah yang membuat Benda mengambil kesimpulan adanya kesinambungan dan perubahan dalam perkembangan pemikiran di Indonesia. Lihat Harry J. Benda, *Continuity*, *Loc. cit.* hlm. 80.

silanya yaitu Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi, dan Ketuhanan. Ketiga sila tersebut disebut Trisila. Ketiga sila diperas menjadi Ekasila yaitu gotong royong. J.K.Tumakala mengatakan bahwa diperasnya Pancasila itu bukan berarti kehilangan maknanya, karena yang diperas itu hanya jumlah silanya bukan bobot materinya.⁷⁷ Gotong royong dalam masyarakat Indonesia selalu diselenggarakan berdasar kepada lima hal. *Pertama*, megis-religius yaitu kepercayaan dan keyakinan akan adanya kekuatan ghaib. *Kedua*, lingkungan kesatuan geneologis maupun teritorial. *Ketiga*, dasar persamaan, persaudaraan dan kekeluargaan. *Keempat* adalah musyawarah dan mufakat. *Kelima*, gotong royong dilaksanakan dengan tujuan untuk kepentingan bersama.⁷⁸

Dari pemaparan di atas, penulis bisa menarik kesimpulan bahwa latar belakang Soekarno merumuskan Pancasila sebagai idiologi bangsa disebabkan :

- a. Soekarno ingin mewujudkan aktualisasi dari ajaran agama Islam dalam bentuk Reaktualisasinya adalah Pancasila terutama sila pertama “ Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Islam tidak terjebak pada persoalan legalitas formal, tetapi lebih menekankan pada aspek realias sosial sehingga pesan Islam sebagai agama *rahmatal lil alamin* bisa terwujud.
- c. Pancasila lebih dapat diterima di seluruh masyarakat dibandingkan dengan label Islam, sehingga dapat mengeliminir perpecahan dan konflik antar warga negara dalam khasanah perbedaan dasar negara.

⁷⁷ J.K.Tumakaka, *Sosialisme Indonesia, disusun berdasar kepada Ajaran Bung Karno Bapak Sosialisme Indonesia*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI., 1961), kata sambutan Maladi Menteri Penerangan, hlm. 61. Tindakan mempersempit dan memperluas sila-sila dari Pancasila itu agaknya dimaksudkan oleh penggalinya yaitu Soekarno untuk menunjukkan sifat elastisitas dari dasar pemikiran itu

⁷⁸ *Harian Kompas*, Jum'at tanggal 5 Juli 1985, secara khusus menulis tajuk rencana dengan judul *Bandar Udara Soekarno-Hatta*, yang mengulas peranan kedua tokoh ini dalam pergulatan pemikirannya, sehingga wajarlah kalau nama kedua tokoh ini diabadikan pada pintu gerbang Indonesia yaitu Bandara Udara Internasional Jakarta. Berbagai penghargaan telah diberikan pemerintah asing dan organisasi sosial kepada Soekarno, demikian kepadanya telah dianugerahi oleh 24 Universitas dan Institut baik di dalam maupun di luar negeri, gelar Doktor Honoris Causa dalam berbagai disiplin ilmu seperti politik, hukum, sosial-politik, sejarah, teknik,

3. Demokrasi Terpimpin sebagai Bentuk Demokrasi Ideal

Peralihan Demokrasi Liberal kepada Demokrasi Terpimpin menunjukkan ada lima pemikiran politik di Indonesia : nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratis dan komunisme. Adanya lima pandangan politik mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan politik, di mana masing-masing partai mengunggulkan ideologinya. Kampanye ideologis dari partai-partai mengarah dan mempertajam polarisasi dalam masyarakat yang menimbulkan perpecahan.⁷⁹ Partai saling bersaing dalam menarik anggota, memberi gambaran yang masuk akal tentang keadaan politik, serta merumuskan kembali nilai-nilai yang patut dipertahankan. Konflik yang terjadi di dorong oleh konflik golongan kiri dan kanan.⁸⁰

Soekarno mengambil langkah dengan mengganti sistem politik yang ada dengan sistem baru yang dikatakan ideal dengan kepribadian Indonesia. Sistem ini disebut sistem demokrasi musyawarah-mufakat atau Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.⁸¹

Menurut Tuk Setyohadi Demokrasi Terpimpin adalah “Demokrasi Gotong-Royong” yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan harus kembali pada Undang-Undang Dasar 1945.⁸²

Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang meliputi semua bidang kenegaraan dan kemasyarakatan termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial. Demokrasi Terpimpin merupakan demokrasi Indonesia yang berasal dari pengertian terpimpin dalam sila ke empat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.⁸³

ushuludin, falsafah ilmu tauhid. Pengerahan ini berlangsung sejak sejak 30 Januari 1951 sampai 3 Agustus 1965, lihat Solichin Salam, *Putera Fajar, Loc. cit.*, hlm. 122.

⁷⁹ Herbert Feith. *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia ; 1999), hlm. 16.

⁸⁰ Herbert Feith dan, Lane. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. (Jakarta : LP3ES ; 1988), hlm. iv.

⁸¹ Yahya A. Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press ; 1982), hlm. 93.

⁸² Tuk Setyohadi.. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa Ke Masa*. (Jakarta : CV. Rajawali Cooperation ; 2002), hlm. 109-111.

⁸³ Sartono Kartodirjo, Marwati D.P., & Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ; 1975), hlm. 150.

Konsep Demokrasi Terpimpin atau Konsepsi Presiden.⁸⁴ Pokok ideologi politik Demokrasi Terpimpin ditegaskan pada tanggal 17 Agustus 1959 berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” dan dianggap sebagai Manifesto politik.⁸⁵ Pelaksanaan politik mengarah kepada terpusatnya kekuasaan pada diri Soekarno, selaku Pemimpin Besar Revolusi sehingga menjadi demokrasi yang dipimpin Soekarno.⁸⁶ Situasi Demokrasi Terpimpin membuat partai-partai politik tunduk kepada Presiden Soekarno.⁸⁷

Prinsip Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945 dan menyederhanakan partai lalu dikeluarkan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan partai,⁸⁸ yang bertepatan ketika beberapa pemimpin Partai Masyumi, PSI, IPKI, Partai Katolik dan Parkindo memutuskan membentuk Liga Demokrasi yang menentang ide pembentukan DPR Gotong Royong dan pengaruh Komunis. Pimpinan tertinggi Masyumi dan PSI dipenjara.⁸⁹

Konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah wujud sekularisasi politik. Adapun dalam analisis penulis bahwa gagasan tersebut karena disebabkan :

- a. Negara Indonesia yang baru merdeka, dimana untuk menentukan arah, butuh legalitas terarah dan terfokus pada satu tujuan yakni persatuan dan kesatuan.
- b. Pengalaman demokrasi parlementer dimana jatuhnya kabinet terjadi karena banyaknya kepentingan yang menjurus pada des integrasi bangsa.
- c. Alat perekat untuk mempersatukan komponen bangsa yang heterogen, sehingga persatuan dan kesatuan dapat terwujud.

⁸⁴ Yahya A. Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press ; 1982), hlm. 86.

⁸⁵ Moedjanto, G. *Indonesia Abad Ke 20 Jilid II: Dari Perang Kemerdekaan Sampai Pelita III*. (Yogyakarta : Kanisius ; 2001), hlm. 115.

⁸⁶ Rusli Karim. *Perjalanan Partai Politik Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. (Jakarta : PT. Rajawali ; 1983), hlm. 141.

⁸⁷ Herbert Feith dan, Lane. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. (Jakarta : LP3ES ; 1988), hlm. 113.

⁸⁸ Wiyono,R. *Organisasi Kekuatan Sosial Politik Di Indonesia*. (Bandung : Alumni ; 1982), hlm. 29.

⁸⁹ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia ; 2001), hlm. 51.

4. NASAKOM sebagai Bentuk Akomodasi Partai dan Kebangsaan

Dasar pikiran tentang ketiga hal ini telah dikemukakan Soekarno semasa ia masih berada di Surabaya dan kemudian dirumuskannya kembali sejak ia tinggal di Bandung. Setelah merdeka Soekarno terus mengembangkan pemikiran di atas untuk merumuskan berbagai aliran pemikiran dalam masyarakat.⁹⁰

Ketiga aliran ini menurut Soekarno adalah aliran pemikiran politik yang hidup dan berkembang di Indonesia. Soekarno menyusun konsep di atas itu dengan tujuan untuk mempersatukan sikap (*common denominator*) dari berbagai aliran pemikiran itu agar mereka dapat hidup secara berdampingan. Faktor yang bisa membuat mereka bekerja sama dalam satu integrasi adalah kedudukan mereka sebagai warga dalam satu bangsa.⁹¹

Soekarno menguraikan perbedaan antara ketiga aliran itu. Kelompok nasionalis berfikir dalam ruang lingkup bangsa tertentu sedang Islam tidak mengenal konsep bangsa, Islam menekankan persaudaraan universal antara umat seiman tanpa melihat perbedaan geografis, warna kulit dan sebagainya. Tetapi, kata Soekarno, dapat pula dilihat persamaan antara keduanya, apabila kebangsaan itu dipahami dalam arti yang luas, yaitu persaudaraan universal antar umat manusia.

⁹⁰ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (London : Cornell University Press ; 1978), hlm., 594-595

⁹¹ Pengamat Barat seperti yang dikatakan Fred.R. Von den Mehden, menganggap cara Soekarno mempersatukan ketiga aliran itu sebagai suatu hal yang naif yaitu ketidakmungkinan menciptakan manusia tunggal di Indonesia, lihat Fred.R. Von den Mehden, *Politics, Loc. cit.*, hlm. 129; namun T.B. Simatupang mengatakan bahwa konsep itu hanya dapat dipahami bila dilihat dalam konteks pemikiran Jawa yang sinkretis bukan dalam pola pemikiran Barat yang disebut *entweder oder* yaitu keharusan memilih antara a atau b. lihat T.B.Simatupang, "Antara Cita dan Fakta", dalam Aristides Katopo (ed), *80 Tahun Bung Karno*, (Jakarta: SinarHarapan, 1982), hlm. 24. Sementara itu menurut Weatherbee rumusan bersama (*common denominator*) yang dikemukakan Soekarno itu harus dilihat perhatian Soekarno yang amat dalam tentang kemajemukan bangsa Indonesia. Karena itu sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh Soekarno, bahwa bagi dia problem utama dalam revolusi Indonesia adalah untuk menciptakan keselarasan (*harmony*) dan kesatuan (*unity*) diantara semua kekuatan-kekuatan revolusioner, lihat Donald E. Weatherbee, *Loc. cit.*, hlm. 98: perhatian Soekarno tentang perlunya persatuan dikalangan bangsa Indonesia, telah muncul sejak ia masih di Surabaya sebagaimana pada tulisannya di *Oetoesan Hindia* 16 Mei 1921.

Demikian pula Islam, sekalipun bersifat universal, tidak ada larangan bagi umat Islam untuk membela tanah airnya dari gangguan pihak luar.⁹² Soekarno mempertemukan antara Islam dengan Marxisme, tanpa memperbesar perbedaan prinsip antara keduanya. Untuk mempertemukan kedua aliran ini. Soekarno memusatkan perhatian pada sikap sosialis dari ajaran Islam dan komunis dalam menghadapi ketidakadilan.⁹³

Islam dalam pandangan Soekarno juga menentang ketidakadilan dengan mengkategorikannya sebagai perbuatan zalim. Seperti riba dalam Islam dianalogikannya dengan *meerwaarde* dalam paham Marxisme. Menurut Soekarno, Islam melarang riba karena perbuatan itu bersifat aniaya kepada sesama manusia. Oleh karena itu riba sama dengan *meerwaarde*, maka Soekarno berkesimpulan bahwa praktek yang dilarang komunisme juga ditentang Islam.⁹⁴

Di sini tampak kembali pola berfikir Soekarno yang berusaha mencari sintesa dari berbagai aliran pemikiran sebagai wadah yang berfungsi sebagai landasan bersama. Soekarno menyadari, bahwa hubungan kaum agama dengan kaum sosialis lebih dekat dibandingkan dengan kaum Marxis. Pemikiran kaum sosialis, bagaimanapun masih mengakui eksistensi Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Tetapi sekalipun ia mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, anehnya Soekarno lebih tertarik menyusun konsep kerja sama antara kaum nasionalis dan agama dengan komunis bukan dengan sosialisme (Nasasos). Yang mendorong Soekarno mengambil pilihan yang demikian, agaknya dengan pertimbangan bahwa analisa Marxisme lebih tegas dan radikal dalam memahami ketidakadilan sosial, sedang pandangan

⁹² Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Loc. cit.* hlm. 4

⁹³ Tentang pandangan Soekarno yang menghubungkan agama dengan Marxisme lihat *Ibid.*, hlm. 21: uraian tentang peran Datuk Batuah dan perpecahan umat Islam SI akibat pengaruh paham Marxis itu. Lihat Delai Noer, *Gerakan, Loc. cit.*, hlm. 57, 58, 141.

⁹⁴ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Loc. cit.* hlm., 576

sosialisme masih melihat kemungkinan antara penjajah dengan yang dijajah. Soekarno menjelaskan sebagai berikut :

Berlainan dengan sosialis-sosialis lain, yang mengira cita-cita mereka itu dapat tercapai dengan jalan persahabatan antara buruh dengan majikan, berlainan umpamanya dengan Ferdinand Lazzale yang teriaknya itu ada suatu teriakan perdamaian, anak Karl Marx, yang dalam tulisan-tulisannya tidak satu kali mempersoalkan kata kasih atau kata cinta, membeberkan pula paham pertentangan golongan, faham *klassentrijd*, dan mengajarkan pula bahwa lepasnya kaum buruh dan nasibnya itu oleh perlawanan zender damai terhadap kaum “burdjuasi”, satu perlawanan yang tidak boleh tidak musti terjadi oeh karena peraturan yang kapitalis adanya.⁹⁵

Untuk menunjukkan bahwa ketiga aliran itu bisa berada sekaligus pada dirinya. Ia menulis sebuah artikel di Harian *Pandangan* untuk menjelaskan jalan pikirannya, dan untuk menyatakan salahnya anggapan sementara orang terhadapnya yang meragukan sikap nasionalismenya karena ia mulai tertarik pada Islam. Tulisannya yang berjudul *Soekarno oleh Soekarno Sendiri* menjelaskan pola pemikirannya yang menyatakan bahwa pada saat yang sama ia sekaligus menjadi seorang nasionalis, seorang muslim dan seorang penganut Marxisme. Soekarno mengatakan ;

“saya tetap nasionalis, tetap Islam, tetap Marxis. Sintesa tiga hal inilah memenuhi saya punya dada, satu sintesa yang menurut anggapan saya sendiri adalah satu sintesa yang “*geweldig*”.”⁹⁶

Soekarno menyatakan bahwa Islam yang bersifat universal dapat menjadi pegangan hidup dalam ruang lingkup lokal yaitu menyangkut kepentingan suatu bangsa tertentu. Karena itu, Soekarno selalu berusaha memahami esensi ajaran Islam dengan konteks nasionalisme Indonesia. Soekarno tidak

⁹⁵ *Ibid.*, hlm., 15.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 513.

melihat kemungkinan adanya konflik batin pada seseorang yang sekaligus menggabungkan pada dirinya sikap seorang muslim dan nasionalis, sungguhpun timbulnya paham kebangsaan itu bukan atas dorongan agama karena ucapan *hubbul wathan minal iman* tidak bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.⁹⁷

Marxisme adalah teori ekonomi, sosial dan filsafat yang dikembangkan oleh Karl Marx. Aspek filsafat dari Marxisme dikenal dengan materialisme historis, dalam bidang epistemologi Marxisme menganut teori empirisme, dan dalam bidang aksiologi, Marxisme menganut teori "nilai lebih" yang dikaitkan dengan humanitarisme. Teori sosial Marxisme berpusat pada konsep dasar determinisme ekonomi dan karakter masyarakat berkelas.⁹⁸ Marx mengambil dialektika yaitu logika dinamisme dari Hegel. Logika itu berpusat pada teori penciptaan dan pendamaian terhadap ide-ide yang tampaknya bertentangan. Dari pemikiran kefilosofan tentang penciptaan hal ini, Karl Marx berkesimpulan bahwa "kenyataan yang mutlak" itu tidak berada di luar materi tetapi adalah materi itu sendiri. Pemikiran ini memandang aspek kemanusiaan semata-mata dari tingkat produksi dan distribusi komoditi materiil yang dibutuhkan manusia untuk menopang kehidupannya.⁹⁹

Sebaliknya Islam membawa konsep yang sama sekali berbeda dengan Marxisme dalam memahami sifat dari "Kenyataan Yang Mutlak" itu dan hubungan manusia terhadap-Nya. Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Rasul telah menjelaskan proses kejadian pertama dari makhluk-Nya dan menyatakan bahwa alam semesta itu mempunyai sumber dan kebutuhan spiritual yaitu yang menciptakan dan memeliharanya. Kenyataan Yang Mutlak itu ialah Allah SWT yaitu sebagai kebenaran yang

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 509: Soekarno mengakui bahwa kata Arab yang dikutipnya tersebut termasuk Hadis Nabi

⁹⁸ Lihat Dagobert D. Runes (ed.), *Dictionary of Philosophy*, (Totowa: Littlefield, Adams & Cc, 1971), hlm. 188-189.

universal, sebagaimana telah diajarkan oleh para rasul-rasul-Nya. Pengakuan adanya Yang Mutlak yaitu Allah SWT merupakan hal yang sangat prinsipil dalam sistem teologi Islam yaitu kesatuan iman kepada-Nya. Kesatuan iman itu mengandung pengertian sebagai sebagai kepercayaan umat manusia akan adanya keselarasan dalam alam semesta.

Dengan demikian, antara agama khususnya Islam dengan Marxisme terdapat jurang pemisah yang tidak dapat dijembatani, karena kepercayaan atau pengingkaran kepada Zat Yang Mutlak akan membawa implikasi yang lebih jauh, karena hal itu akan menentukan arah dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia. Islam menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia untuk menikmati kehidupan, semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT, sedang tugas-tugas lain semuanya diarahkan untuk mendukung tugas ibadah itu.¹⁰⁰ Sementara itu Marxisme, melihat kehidupan hanya sekedar tujuan-tujuan ekonomi yang sama sekali terpisah dari pengertian eskatologis yaitu kebenaran yang universal itu.

Perbedaan yang prinsipil yang ada diantara Islam dengan Marxisme itu tidak menghalangi Soekarno untuk tertarik pada paham komunis itu, sungguhpun ia mengaku tetap sebagai seorang muslim. Faktor yang membuat Soekarno tertarik, karena menurut anggapannya teori Marxisme itulah satu-satunya teori yang kompetensi untuk memecahkan soal-soal sejarah, politik, dan kemasyarakatan. Karena itu perlu disusun suatu sintesa yang hebat (*geweldig*) untuk mempertemukan ketiga aliran alam pemikiran itu dengan mengambil segi-segi yang dapat

⁹⁹ Uraian tentang dialog antara Marxisme dengan Islam dibahas lebih jauh dalam khalifa Abdul Hakim, *Islam and Communism*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1976), hlm. 43-66

¹⁰⁰ Soekarno mengatakan tetapi buat saya, maka Marxisme dengan Islam dapatlah berjabat tangan satu sama lain didalam satu sintesa yang lebih tinggi. Buat saya Islam adalah satu agama yang rasional, satu agama yang bersandar kepada kemerdekaan akal, yang berbeda setinggi langit dengan agama-agama lain. Almarhum Tjokroaminoto dulu pernah menulis satu kitab kecil yang bernama "*Islam dan Sosialisme*", walaupun beliau mempunyai stallinger "rabaan" ke arah tidak bertentangan Islam dengan ideal sosialisme itu", Ir. Soekarno "Menjadi Pembantu Pemandangan", *Dibawah Bendera Revolusi*", *Loc. cit.*, hlm. 512.

mempertemukan ketiga-tiganya. Pendekatan Soekarno tentang pemikiran politik di Indonesia berbeda dengan para nasionalis lainnya yang masih terikat dengan politik aliran. Perbedaan itu ialah karena Soekarno menyerap ketiga aliran pemikiran itu dalam dirinya dan mengangkat ke tingkat yang lebih tinggi (*hogere optrekking*). Memang di sinilah tampaknya salah satu keunikan Soekarno dibanding para pemikir nasionalis lainnya, yaitu kemampuannya untuk merangkum berbagai aliran, melakukan analisa terhadap pemikiran yang diterimanya, dan kemudian melahirkan pemikirannya yang orisinal dan berbobot.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ada berbagai pendapat dalam menilai kepribadian Soekarno. Taufik Abdullah menyatakan Soekarno adalah pribadi yang unik.¹⁰¹ Adanya keunikan itu menimbulkan sikap yang cukup ekstrem dalam menilai Soekarno, baik yang bernada positif maupun yang bernada negatif. Penilaian yang negatif berdasar pada dua pandangan. Pertama, Soekarno lebih menonjolkan dasar kebangsaan daripada Islam sebagai dasar negara Indonesia, padahal ia mengaku bergama Islam bahkan sebagai anggota Muhammadiyah. Kedua, ia menunjukkan sikap toleransi yang cukup longgar kepada kaum komunis, padahal mereka tidak menyetujui unsur yang paling asasi dari akar pemikiran bangsa Indonesia yaitu kepercayaan kepada Zat Yang Mutlak.¹⁰²

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah bentuk organisasi yang tertinggi daripada barisan kelas buruh yang berorganisasi dan yang progresif.

¹⁰¹ Lihat Taufik Abdullah, "Manusia dalam Sejarah: Sebuah Pengantar", dalam Taufik Abdullah, et. Al (ed.), *Loc. cit.*, hlm. 15. Di antara penentang ide Soekarno yang mencampur unsur agama dengan Marxisme datang dari kelompok sosialisme-religius dengan tokoh utamanya H. Agus Salim yaitu yang menghubungkan pandangan yang liberal dan progresif dari ajaran-ajaran yang tercantum dalam al-Qur;’an, dengan sikap-sikap yang berhubungan dengan isme-isme sosial-politik-ekonomi yang berkembang waktu itu. Kelompok sosialisme-religius mendefinisikan konsep keadilan sosial atau sosialisme adalah sama sekali tidak mempunyai hubungan spiritual dengan sosialisme Mrxis, karena sosialisme religius tidak berarti hilangnya paham individualis, inisiatif perseorang dan tanggung jawab perseorangan, lihat Jeanne S. Mintz, *Mohammed, Loc. cit.*, hlm. 87.

¹⁰² Lihat pernyataan M.Natsir dalam pidato 12 November 1957 di sidang Konstituante dan dimuat kembali dalam *Harian Abadi* 14, 15, 16, 18, 19, November 1957, dan kemudian dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 133.

Partai Komunis Indonesia mewakili kepentingan nasional dan rakyat untuk mencapai Republik Demokrasi Rakyat Indonesia dan akhir tujuannya ialah mencapai masyarakat Komunis Indonesia.¹⁰³

Soekarno menyatakan "Bukannya kita mengharap, yang Nasionalis itu supaya berubah faham jadi Islamis atau Marxis, Bukannya maksud kita menyuruh Marxis dan Islamis itu berbalik menjadi Nasionalis, akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara tiga golongan itu".¹⁰⁴

Gagasan di atas, menurut penulis adalah wujud pemikiran Soekarno tentang sekularisasi Islam di Indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang gagasan tersebut disebabkan karena :

- a. Beragamnya ideologi penduduk Indonesia. Secara esensi oleh Soekarno dikelompokkan menjadi tiga, yakni Nasionalis-Agama-Komunis. Pengelompokkan tersebut dengan harapan tidak terjadinya konflik kepentingan antar kelompok dan golongan.
- b. Mempermudah garis koordinasi antar kelompok
- c. Memudahkan dalam kontrol terhadap apa yang terjadi di masyarakat
- d. Mempercepat proses persatuan dan kesatuan bangsa sehingga pembangunan cepat terwujud.

B. Soekarno Menggagas Perjuangan Anti Diskriminatif

Perkembangan pemikiran politik Islam, akan senantiasa mengalami dinamika sebagai respon atas kondisi sosial-politik yang dihadapi umat Islam. Termasuk dalam hal ini adalah modernisme Islam, sebuah paham yang muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh sebagai respon atas kondisi umat Islam yang mengalami keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan. Pada saat itu dunia Barat sudah jauh lebih maju dibandingkan Islam. Apa yang terjadi di Barat adalah sebagai bentuk dari kebebasan pemikiran dan penghargaan tinggi terhadap rasionalitas. Bentuk ini yang kemudian dilihat oleh para tokoh

¹⁰³ A.M.W. Pranarka, *Loc. cit.*, hlm.118; hal yang menyebabkan Soekarno dapat bekerja sama dengan pihak PKI, sungguhpun pihak komunis itu berbeda tujuannya dengan dasar pemikiran bangsa ini, agaknya disebabkan karena menurut perhitungan Soekarno mereka masih dalam batas-batas ideologi yang disusunya sesuai dengan diagram yang disusun Donald E. Weatherbee.

modernis Islam bahwa kebebasan berpikir perlu diterapkan dalam ajaran Islam tanpa harus menjadi Barat.¹⁰⁵

Selain itu, modernisme Islam ini merupakan antitesis dari tradisionalisme Islam. Paham modernisme Islam ini menginginkan untuk kembali pada kemurnian ajaran agama Islam dan membuka lebar pintu *ijtihad* sebagai bentuk penghargaan terhadap rasionalitas manusia. Dalam modernisme Islam, Islam itu sendiri dipandang sebagai ajaran yang bersifat universal, tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya (*Habl minallah*) juga mencakup hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Habl minannas*).¹⁰⁶

Modernisme Islam ini sangat berkembang pesat di dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Paham ini memunculkan tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia, antara lain yang akan penulis angkat adalah Mohammad Natsir,¹⁰⁷ A. Hasan, Isa Anshari dan lain-lain.¹⁰⁸ Tidak berbeda dengan apa yang digagas oleh para tokoh modernis Islam dunia, tokoh-tokoh modernisme Islam Indonesia juga melihat bahwa kondisi umat Islam di Indonesia terjebak pada bentuk peribadahan mistik yang jauh dari ajaran Islam itu sendiri, keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan dan kolonialisme. Semangat modernisme Islam di Indonesia sejatinya adalah semangat membebaskan bangsa Indonesia khususnya

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁰⁵ Ahmad Suhelmi. *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Natsir*. Jakarta: TERAJU, 2002. hlm. 29 dan Mulyana W Kusumah, *Demokrasi, Partai Politik dan Bung Karno*, dalam *Bung Karno dan Partai Politik, Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, (Jakarta : Penerbit PT Grasindo Persada ; 2001)., hlm. 77

¹⁰⁶ R. Mark Woodward, “*Indonesia, Islam, and the Prospect for Democracy*”, SAIS Review 21, no. 2 (2001). Dan Robert W. Hefner, *Civil Islam : Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton N.J.: Princeton university Press, 2000). hlm. 113.

¹⁰⁷ Natsir adalah pribadi yang penuh pesona. Ia ibarat mata air yang tak pernah kering meskipun kemarau datang berkepanjangan. Sejak ia muda, bersekolah di Bandung dan terlibat dalam berbagai polemik intelektual di bidang keagamaan dan politik, ia selalu menjadi fokus perhatian orang . untuk lebih lanjut baca Abibullah Djaini dalam Anwar Harjono, et. al., *Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996. hlm., 231. Natsir lahir di Minangkabau, Alahan Panjang, Sumatra Barat 17 Juli 1908, dan wafat di Jakarta 5 Februari 1993. Ayahnya, Sutan Saripado adalah seorang pegawai pemerintahan di sana, ibunya, Khadijah adalah ibu rumah tangga yang bijaksanadan kakeknya seorang ulama. Natsir belajar di *Holland Inlandse School* (HIS) Solok serta di sekolah agama Islam yang dipimpin oleh para pengikut Haji Rasul. Tahun 1923-1927 Natsir mendapat beasiswa untuk sekolah di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), dan kemudian melanjutkan ke Algemene Middelbare Schol (AMS) Bandung hingga tamat pada tahun 1930. Di Bandung, Natsir berinteraksi dengan para aktivis pergerakan nasional antara lain Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem dan Sutan Syahrir. Baca juga Mohammad Natsir (b), *World Of Islam Festival dalam perspektif sejarah*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1976. hlm., 51.

¹⁰⁸ Hendra Guanawan. *M.Natsir dan Darul Islam: Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan Tahun 1953 – 1958*. Jakarta: Media Dakwah, 2000. hlm. 1

umat Islam di Indonesia dari segala bentuk penjajahan, oleh karena itu pemikiran umat Islam di Indonesia harus lebih maju.¹⁰⁹

Pemikiran politik Islam di Indonesia sangat beragam. Sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim, banyak tokoh-tokoh muslim Indonesia bermunculan. Corak pemikiran para tokoh tersebut sangat beragam karena dipengaruhi oleh latar belakang keagamaan dan lingkungan mereka. Islam di Indonesia sendiri memang sangat beragam, ada yang tradisionalis, moderat bahkan puritan. Semua bercampur aduk dan melahirkan banyak pemikiran yang beragam. Sadar akan jumlah penganut Islam yang begitu besar, banyak para tokoh tersebut menginginkan suatu Negara yang berlandaskan ajaran Islam atau yang kemudian disebut Negara Islam. Bahkan konsep Negara Islam pernah tercantum dalam piagam Jakarta¹¹⁰ sebelum dihapus karena mendapat tentangan dari kelompok nasionalis dan Kristen.¹¹¹

Ide tentang negara Islam tidak pernah surut sampai dewasa ini. Beragam pemikiran mengenai konsep negara Islam terus bertahan sampai era modern. Ide tentang pendirian negara Islam Indonesia tidak berhenti pada piagam Jakarta. Para pemikir Islam Indonesia tetap memperjuangkannya dengan menuangkan ide-ide tentang dasar negara Islam. Dari sekian banyak tokoh Islam Indonesia era awal kemerdekaan, Mohammad Natsir adalah salah satu perumus ide tentang Islam sebagai dasar negara. Mohammad Natsir adalah seorang cendekiawan muslim sekaligus politisi yang disegani di Indonesia pada era awal kemerdekaan.¹¹²

Pemikir Islam seperti Al-Maududi yang beranggapan bahwa sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut demokrasi oleh karena dalam sistem demokrasi kekuasaan negara itu sepenuhnya semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Konsep politik Islam ini oleh al-Maududi disebut

¹⁰⁹ Mohammad Kamal Hassan, *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980). Hlm. 140. Dan Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986). Hlm., 170.

¹¹⁰ Piagam Jakarta adalah hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis). Panitia Sembilan merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI.

¹¹¹ M. Natsir, *Capita Selecta 2*, (Jakarta, PT. Abadi dan Yayasan Capita Selecta, 2008), Cetakan Kedua, hlm. 188.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 189.

dengan konsep politik *Theo-Demokrasi* suatu sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat yang dibatasi kekuasaan Tuhan lewat hukum-hukum-Nya.¹¹³

Gagasan negara berdasarkan ajaran Islam berangkat dari keyakinan bahwa Islam adalah agama yang “lengkap dan sempurna”. Pengertian “lengkap dan sempurna” disini adalah ajaran Islam berisi peraturan yang mencakup berbagai segi kehidupan manusia, dari yang bersifat privat sampai yang bersifat publik. Ajaran Islam dianggap fleksibel, artinya ia tidak lekang ditelan perkembangan zaman dan selalu relevan dalam situasi sosial apapun, setidaknya itu menurut kalangan pendukung fanatik Negara Islam. Dengan demikian, ajaran Islam yang “lengkap dan sempurna” tersebut menuntut umat muslim dimanapun berada untuk menerapkan ajaran Islam sebagai pedoman dalam kehidupan.¹¹⁴

Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959, Majelis Konstituante dibubarkan, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -yang pada Pembukaannya termaktub rumusan butir-butir Pancasila-dinyatakan berlaku kembali. Dalam konsiderans Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu terdapat kalimat: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.”¹¹⁵

Terlalu naïf jika kenyataan dibubarkannya Konstituante ditafsirkan sebagai bukti gagalnya perjuangan partai-partai politik Islam (Nahdlatul Ulama, Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam PERTI) yang di dalam Konstituante bergabung dalam Fraksi Islam,¹¹⁶ menjadikan Islam sebagai dasar negara. Sebab, kepedulian utama dari keseluruhan gagasan menjadikan Islam sebagai dasar negara, sesungguhnya adalah hasrat untuk mendesekularisasikan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar negara yang membuka diri terhadap “intervensi” wahyu.¹¹⁷

¹¹³ Dikutip dari Syukron Kamil. *Jurnal Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer*. Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, hlm. 66.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

¹¹⁵ Lukman Hakiem, *Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan Biografi Dr. Anwar Harjono, SH*, Jakarta, Media Da'wah, 1993, hlm 189.

¹¹⁶ Bersatunya partai politik Islam di Konstituante dalam Fraksi Islam mendapat sambutan hangat di kalangan umat di seluruh daerah. Fraksi Islam, mula-mula dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimedjo (Masyumi). Ketika Kasman ditangkap pada 5 September 1958, Ketua Fraksi Islam di Konstituante dipimpin oleh K.H. Masjkur (NU). Kepemimpinan K.H. Masjkur berakhir sampai Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Lihat, Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, hlm 389.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 388.

Bahwa untuk mencapai kepedulian utama itu digunakan tema besar Islam sebagai dasar negara, tentulah tidak dapat dilepaskan kaitannya dari fungsi Konstituante sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan penuh untuk menyusun konstitusi yang definitive. Fungsi itu, kata Natsir, hanya dapat dipenuhi “apabila ia mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjelajah, membahas, membanding fikiran-fikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Tegasnya, untuk melakukan orientasi yang sungguh-sungguh, agar hasil yang hendak dicapai nanti benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan bagi rakyat dan keturunan kita di masa mendatang.”¹¹⁸

Bagi kalangan politisi berbasis agama, debat di Konstituante adalah sukses gemilang. Suara lantang Natsir telah membangunkan kalangan bukan sekular untuk mencari pijakan Ilahiat bagi Pancasila. Dengan kebangkitan kalangan bukan sekular di konstituante itulah, gagasan memeras Pancasila menjadi Ekasila, yakni Gotong-Royong tanpa sila Ketuhanan Yang Maha Esa, atau mengganti sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila Kebebasan Beragama seperti disuarakan oleh kalangan komunis, gagal total.¹¹⁹

Sulit dibayangkan apa yang terjadi kini jika Konstituante dulu tidak melakukan tugasnya “menjelajah, membahas, membanding fikiran-fikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia,” jika Konstituante tidak mengkonfrontasikan ide-ide dalam pemikiran-pemikiran.” Mungkin, seperti dikatakan Natsir, yang kita dapat hanyalah “toleransi, dan bukan konstitusi.”¹²⁰

Dari sudut ini dapatlah dikatakan bahwa konsiderans Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sejatinya lebih dari sekadar kompromi antara pendukung Pembukaan UUD 1945 versi 22 Juni 1945 dan Pembukaan UUD 1945 versi 18 Agustus 1945, merupakan keberhasilan upaya mendesekularisasikan dasar negara Pancasila.¹²¹

Atas pertanyaan anggota DPR-RI, Anwar Harjono (Masyumi) dan K.H. Ahmad Sjaichu (NU) mengenai makna konsiderans Dekrit 5 Juli 1945, Perdana

¹¹⁸ M. Natsir, *Capita Selecta 3*, hlm 84-85.

¹¹⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, *Loc. cit.*, hlm 143.

¹²⁰ M. Natsir, *Capita Selecta 3*, hlm 86.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 87.

Menteri Djuanda dengan surat kepada Ketua DPR-RI No. 0761/59, tertanggal 25 Maret 1959,¹²² antara lain mengatakan bahwa:

- 1) Walaupun Piagam Jakarta itu tidak merupakan bagian Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya melihat tanggalnya 22 Juni 1945, tetapi naskah itu sebagai dokumen historis besar artinya bagi perjuangan bangsa Indonesia dan bagi bahan penyusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi bagian dari pada Konstitusi Proklamasi, dan¹²³
- 2) Pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis, bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pengaruh termaksud tidak mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saja, tetapi juga mengenai Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan. Yaitu bahwa dengan demikian kepada perkataan “Ketuhanan” dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 dapat diberikan arti “Ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syari’atnya, sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi pemeluk agama Islam yang dapat disesuaikan dengan syari’at Islam.¹²⁴

Isa Anshary mempunyai pandangan yang lebih keras. Ia sendiri menegaskan sebagai kelompok radikal-revolusioner:

Djikalau kita menjelajah perkembangan aliran pikiran dalam masyarakat kaum muslimin—djuga di Indonesia—kita melihat ada tiga aliran tjara berpikir dalam memahami persoalan agama. Pertama, aliran konservatif-reaksionarisme, aliran beku dan djumud, jang setjara apriori menolak setiap faham dan kejakinan jang hendak merubah faham...Kedua, aliran moderat-liberalisme, mengetahui mana jang sunnah dan mana jang bid’ah, megetahui kesesatan bid’ah, tetapi tidak aktif dan positif memberantas bid’ah...Ketiga, aliran revolusioner-radikalisme, aliran jang hendak merubah masyarakat ini sampai ke akar-akarnya... Kaum ‘Persatuan Islam’ adalah penganut aliran ketiga ini.¹²⁵

¹²² Lukman Hakiem, *Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan*, hlm 182.

¹²³ *Ibid.*, hlm 183

¹²⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, *Loc. cit.*, hlm 143.

¹²⁵ Isa Anshary, *Manifest Perjuangan Persatuan Islam*, (T.K. : TP., : 1958), hlm. 14.

Pembahasan mengenai Islam dan Negara di Indonesia menurut Yudi Latief, dapat ditarik beberapa pendapat, yaitu :

- 1) Islam membutuhkan Negara sebagai sarana atau penyokong ajaran atau doktrin Islam agar tetap terjaga. Ini tergambar dari inisiatif Nabi mendirikan sebuah Negara, yaitu Negara Madinah. Namun juga sebaliknya, Negara membutuhkan agama sebagai pengikat emosi dan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan Negara. Agama juga menimbulkan patriotism kepada Negara yang dianggap sebagai Jihad.
- 2) Penulis berasumsi bahwa Islam tidak memastikan dirinya dalam satu bentuk pemerintahan saja, atau model Negara. Namun Islam menyuruh untuk menegakkan keadilan bagi siapapun juga, baik itu birokrat atau rakyat jelata.
- 3) Baik Fazlurahman maupun Maududi berusaha merumuskan mengenai konsep Negara Islam. Namun bagi penulis, pikiran-pikiran Rahman dan Maududi di atas adalah konteks Pakistan dan perlu ditinjau ulang sekiranya ingin meminjam rumusan mereka untuk Negara kita.
- 4) Yang terbaik saat ini untuk konteks Indonesia adalah Negara yang substansinya Islam. Karena, konteks Indonesia sangat berbeda dengan budaya Timur Tengah. Hukum Islam adalah hasil dialog antara agama dan budaya masyarakat.¹²⁶

C. Soekarno Menggagas Kesatuan dan Persatuan Demi Terjadi Integrasi Bangsa

Herbert Feith dan Lance Castles berpendapat bahwa setelah dua puluh tahun kemerdekaan, Pemikiran politik di Indonesia ada tiga, yaitu :

1. Periode revolusi bersenjata (1945-1949). Periode ini pemikiran politik dikuasai oleh sekelompok pelajar dalam pergerakan, yaitu Soekarno, Hatta, Sjahrir, Natsir dan Tan Malaka. Tema pemikiran politiknya adalah pencarian dasar-dasar yang tepat, produknya adalah Pancasila.
2. Periode kedua atau “liberal” (1950-1959). Ditandai dengan konflik partai dan ideologi.

¹²⁶ Yudi Latief “Sekularisasi Masyarakat dan Negara Indonesia” dalam buku *Islam, Negara, dan Civil Society; gerakan dan pemikiran Islam kontemporer* yang dieditori oleh Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. hlm. 121.

3. Periode ketiga adalah periode demokrasi terpimpin (1959-1965), ditandai dengan penerimaan wajib pada ide-ide politik Soekarno seperti sosialisme ala Indonesia, Nasakom dan pemikir yang tidak sepaham dibungkam,¹²⁷ serta menggunakan kekuatan militer.

Selanjutnya, Feith mengatakan bahwa PKI dan PSI adalah partai yang paling sukses dalam berbicara atau menyuarakan pendapat Soekarno.¹²⁸

1. Sikap Awal Kemerdekaan ; Tidak Suka Banyak Partai

Proklamasi kemerdekaan menyebabkan perubahan struktur politik. Pemuda dan aktivis menginginkan kehidupan politik berlanjut dengan sistem kepartaian antara satu partai atau multi partai. Soekarno dan PPKI sebagai Dewan Konstituante meletakkan dasar politik pada sistem satu partai yaitu pembentukan Partai Nasional Indonesia dengan tujuan memperkuat persatuan bangsa dan negara serta berdaulat, adil dan makmur. Multi partai akan memecah belah rakyat dan menimbulkan pertentangan.¹²⁹

Namun, kemudian keluar Maklumat Pemerintah 31 Desember 1945 yang berisi pemerintah menyetujui banyak partai. Maklumat lahir karena adanya pertentangan pemimpin partai dan sistem partai tunggal dianggap tidak demokratis.¹³⁰ Wilopo dalam Rusli Karim berpendapat pemerintahan yang kuat diperlukan partai dan organisasi politik yang cukup untuk mewakili aliran paham penting dalam masyarakat sebagai sarana penting pendemokrasian.¹³¹ Ia mampu mempertahankan kemerdekaan serta diharapkan partai dapat tersusun sebelum pemilihan anggota badan perwakilan rakyat bulan Januari 1946.¹³²

Soekarno menganggap Hatta merongrong kekuasaannya, ia merasa dirinya ditempatkan sebagai simbol “*can do no wrong*” Tugas yang dibebankan kepada Soekarno sebagai presiden nyaris tidak ada, hampir

¹²⁷ Feith, Herbert., Lancer Castles (eds), *Indonesia Political Thinking, 1945-1965*, *Loc. cit.*, hlm. 221..

¹²⁸ Alfian. 1971. “Indonesian Political Thinking: a Review” [ebook], Vol. 11, pp. 193-200 dalam <http://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=seap.indo%2F1107124120> [diakses 29 Maret 2012]

¹²⁹ Osman Raliby. *Documenta Historica (Sejarah Dokumenter Dari Pertumbuhan Dan Perjuangan Negara Republik Indonesia)*. (Djakarta : Bulan Bintang ; 1953), hlm. 15

¹³⁰ Imam Pratigny. *Lahirnya Golkar*. (Jakarta : Yayasan Bakti : 1983), hlm. 19.

¹³¹ Rusli Karim. *Perjalanan Partai Politik Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. (Jakarta : PT. Rajawali ; 1983)., hlm. 65.

¹³² Osman Raliby. *Documenta Historica (Sejarah Dokumenter Dari Pertumbuhan Dan Perjuangan Negara Republik Indonesia. Loc. cit.*, hlm. 74.

seluruhnya dikerjakan oleh Hatta sebagai Perdana Menteri maupun sebagai Wakil Presiden.¹³³ Presiden Soekarno berpidato pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 1956 menyatakan, maklumat, tentang pembentukan partai politik adalah kesalahan dan menimbulkan perpecahan, kedaerahan dan kesukuan.¹³⁴

Adanya partai-partai itu semakin banyak sewaktu Komite Nasional Pusat mulai terbentuk, dalam setiap partai yang mempunyai 24 cabang dalam karesidenan, dapat mempunyai wakilnya dalam KNP.¹³⁵ Semangat seseorang memasuki suatu partai dalam tahun 1945-1948 mempunyai motif untuk segera menghilangkan pengaruh Belanda dan mengabadikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kemudian berubah untuk mencari kedudukan.¹³⁶

Penyederhanaan partai politik bukan berarti matinya partai politik, namun partai politik harus berpijak pada ideologi nasional Pancasila. Semua partai politik sebagai penegak demokrasi ingin mencapai tujuannya dengan damai dan demokrasi.¹³⁷ Menurut Sofian Siradj bahwa maklumat untuk mengenal kehidupan demokrasi, tetapi disayangkan avonturir-avonturir koruptor dan Anasir-anasir inilah yang menjadi sebab dari kekecewaan dan perpecahan. Presiden menginginkan agar pemimpin-pemimpin partai mengadakan pertemuan dan bermusyawarah serta mengambil keputusan untuk mengubur partai.¹³⁸

Menurut Sudarjo Tjokrosisworo anjuran mengenai penguburan partai-partai disebabkan timbulnya kekacauan dalam kepartaian dan bukan mempunyai maksud untuk melenyapkan partai-partai politik. Jika

¹³³ Mavis. Rose, *Indonesia Merdeka, Biografi Politik Mohammad Hatta* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama ; 1991), hlm. 211.

¹³⁴ Herbert Feith dan, Lane. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. (Jakarta : LP3ES ; 1988), hlm. 62-66.

¹³⁵ Osman Raliby. *Documenta Historica (Sejarah Dokumenter Dari Pertumbuhan Dan Perjuangan Negara Republik Indonesia., Loc. cit.,* hlm. 529.

¹³⁶ Sudarjo Tjokrosisworo. 1957. Januari 23 "Kepartaian Di Indonesia". Sin Min.1. tanggal, 23 Januari 1957)

¹³⁷ "Kuburkan Semua Partai?".1956. Oktober 30. *Harian Umum*. tanggal, 30 Oktober 1956).

¹³⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, Loc. cit.,* hlm 143,

dibiarkan akan mengakibatkan hal-hal yang merugikan bangsa dan negara.¹³⁹

Mangunsarkoro ada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Ide pokok Presiden Soekarno adalah agar persatuan diantara pemimpin-pemimpin sebagai syarat untuk mempersatukan seluruh rakyat agar sungguh-sungguh melaksanakan revolusi Agustus 1945.¹⁴⁰

Reaksi kehidupan kepartaian yang penting adalah jalannya, yaitu *pertama*, menyederhanakan dan menyehatkan sistem kepartaian, membersihkan orang-orang yang korup dan kepentingan sendiri. *Kedua*, membubarkan partai-partai dan membentuk badan persatuan. Tetapi hakekatnya tetap tidak teratasi. Inilah sebabnya D.N. Aidit memilih jalan pertama, yaitu menyederhanakan dan menyehatkan sistem kepartaian.

Menurut Sofian Siradj, bahwa Partai Islam (Perti) dapat menerima ide presiden untuk mengadakan pertemuan pemimpin-pemimpin partai tetapi bukan untuk mengambil keputusan mengubur partai-partai, melainkan untuk “*zelfkorreksi*”.¹⁴¹ Namun struktur vertical daerah sampai pusat adalah salah satu tiang yang mengikat. Jika ikatan itu tidak ada, daerah akan tercerai berai kembali pada kedaerahannya, kembali pada kedaerahan masing-masing.¹⁴² Hal itu membuktikan bahwa partai-partai belum berhasil meniadakan rasa kedaerahan.¹⁴³

Seruan Presiden Soekarno agar para pemimpin-pemimpin partai mengadakan pertemuan dimana mereka mengubur partai-partai, karena menurut Presiden Soekarno bahwa kepartaian di Indonesia tidak sehat dan terlalu banyak. Mengingat aliran-aliran yang ada dalam masyarakat dapat dirumuskan dalam beberapa saja, dikembalikan dalam jumlah

¹³⁹ Sudarjo Tjokrosisworo. 1957. Januari 23 “Kepartaian Di Indonesia“.Sin Min.1. tanggal, 23 Januari 1957).

¹⁴⁰ Kuburkan Semua Partai?”.1956. tanggal Oktober 30 1956.

¹⁴¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, *Loc. cit.*, hlm 143

¹⁴² Sudarjo Tjokrosisworo. 1957. Januari 23 “Kepartaian Di Indonesia“.Sin Min.1. tanggal, 23 Januari 1957). hlm. 78.

¹⁴³ *Ibid.* hlm. 80.

terbatas, kemudian partai-partai itu harus membuat suatu “cease fire” dan menyusun program nasional.¹⁴⁴

Pada tanggal 18 Desember 1959 pemerintah menyetujui rancangan peraturan tentang syarat-syarat penyederhanaan kepartaian, serta pembentukan Front Nasional dengan beberapa perubahan.¹⁴⁵ Mr. Wirjono Prodjodikoro menyusun 3 peraturan yaitu tentang MPRS, penyederhanaan kepartaian dan Front Nasional.¹⁴⁶

Menurut Ruslan Abdulgani bahwa Undang-Undang Kepartaian dan Penyederhanaan Kepartaian merupakan masalah yang penting selain menyangkut garis kehidupan partai di Indonesia juga merupakan masalah pelaksanaan sistem kepartaian dalam rangka Demokrasi Terpimpin.¹⁴⁷

Pada tanggal 13 Januari 1960 Departemen Penerangan mengumumkan bahwa Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian yang memuat pokok-pokok ketentuan sebagai berikut : partai harus mempunyai cabang, minimal seperempat jumlah Daerah Tingkat I dan cabang harus seperempat dari jumlah Daerah Tingkat II di seluruh wilayah R.I.¹⁴⁸

Presiden berwenang mengawasi dan memerintahkan untuk memeriksa tata usaha, keuangan dan kekayaan partai-partai. Presiden sesudah mendengar Mahkamah Agung dapat melarang dan/atau membubarkan partai yang: a.) Bertentangan dengan azas dan tujuan negara; b.) Programnya berusaha merombak azas dan tujuan negara; c.) pemberontakan karena pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan atau memberikan bantuan sedangkan partai itu dengan tidak resmi menyalahkan perbuatan anggotanya itu; d.) Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Penetapan Presiden ini akan dibubarkan berdasarkan

¹⁴⁴ Kuburkan Semua Partai?”. 1956. Oktober 30. Harian Umum. 1.

¹⁴⁵ Rencana Undang-Undang Kepartaian & Penyederhanaan Kepartaian Diterima Dengan Bulat Oleh Sidang Dewan Pertimbangan Agung”. 1959. November 26. Nasional. 1

¹⁴⁶ “Kabinet Setujui Rancangan Peraturan Tentang Syarat-Syarat Penyederhanaan Kepartaian: Serta Pembentukan Front Nasional Dengan Beberapa Perubahan”. 1959. Desember 18. Nasional. 1..

¹⁴⁷ Rencana Undang-Undang Kepartaian & Penyederhanaan Kepartaian Diterima Dengan Bulat Oleh Sidang Dewan Pertimbangan Agung”. 1959. November 26. Nasional. 1

¹⁴⁸ “Syarat-Syarat Dan Penyederhanaan Kepartaian”. 1960. Januari 13. Nasional. 1.

ketentuan ini harus dibubarkan dalam waktu selama-lamanya 30 hari 24 terhitung tanggal Keputusan Presiden.¹⁴⁹

Yang dapat diakui sebagai partai pada waktu mulai berlakunya Penetapan Presiden ini ialah partai-partai yang telah berdiri pada waktu Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang R.I., dikeluarkan dan memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Penetapan Presiden ini. Demikian pokok-pokok ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No.7 Tahun 1959 yang diundangkan tanggal 31 Desember 1959.¹⁵⁰

Presiden Soekarno menyatakan bahwa partai-partai yang memenuhi syarat mempunyai hak hidup, sebaliknya partai yang tidak memenuhi syarat akan dibubarkan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai penyederhanaan kepartaian.¹⁵¹ Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum pertama dengan 100 tanda gambar menunjukkan bahwa jumlah partai bertambah dari 21 Partai (ditambah wakil tak berfraksi) sebelum pemilihan umum menjadi 28 partai (termasuk perorangan) mendapatkan kursi di parlemen.¹⁵²

Pemerintah menyusun Pengaturan Kepartaian dengan Penetapan Presiden No.7 Tahun 1959. Dalam pelaksanaan Penetapan Presiden ini, dilaksanakan secara bijaksana. Sebab dikuatirkan subyektifitas bisa merugikan pengaturan kepartaian itu sendiri.¹⁵³

Imam Hizbullah Wali Al Fattaah menyatakan bahwa Penetapan Presiden No.7 Tahun 1959 merupakan dorongan kuat bagi umat Islam untuk meninggalkan sistem perjuangan Demokrasi Liberal dan kembali ke pangkalan asli perjuangan umat Islam menegakkan kalimat Allah dengan sistem "Jama"ah Rasulilah SAW".¹⁵⁴ MH. Lukman berpendapat,

¹⁴⁹ Menurut PKI Ialah Melalui Pemilihan Umum". 1960. Januari 19. Nasional. (Obor Rakyat, 5 Januari 1960).

¹⁵⁰ "Syarat-Syarat Dan Penyederhanaan Kepartaian". 1960. Januari 13. Nasional.

¹⁵¹ "Presiden Soekarno: Partai-Partai Yang Wajar Punyai Hak Hidup". 1959. Desember 19. Nasional. 1.

¹⁵² Herbert Feith, *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*. (London : Cornell University Press ; 1962), hlm. 434-435

¹⁵³ "Ketua I PNI Dr. Isa: Pelaksanaan PP No.7/59 Harus Secara Bijaksana". 1960. Januari 16. Nasional. 1.

¹⁵⁴ "Wali Al Fattaah: PP No.7 tidak merugikan perjuangan Islam". 1960. Januari 18. Nasional. 1.

bahwa jalan yang paling wajar dan demokratis menuju kepada penyederhanaan kepartaian ialah melalui pemilihan umum.¹⁵⁵

Pada tanggal 5 Juli 1960 Presiden Soekarno menetapkan Peraturan Presiden No.13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 7 Tahun 1959. Isi Peraturan Presiden No.13 Tahun 1960 hampir bersamaan dengan Penetapan Presiden No.7 Tahun 1959 mengenai cara pengawasan terhadap cabang-cabang.¹⁵⁶

Selain itu, pemerintah menyatakan partai-partai yang tidak diakui berdasar Kepres No.129 tahun 1961 yaitu PSII-Abikusno, PRN-Bebasa, PRI dan PRN-Djody.¹⁵⁷ Pembubaran melalui pemeriksaan oleh Mahkamah Agung. Dinyatakan dalam Peraturan Presiden itu bahwa jumlah anggota lebih dari 150.000, sedang cabang beranggotakan 50 orang.¹⁵⁸

Pasal 11 Perpres “setiap partai politik yang sudah ada di Indonesia berada didalam status harus bekerja untuk memperoleh pengakuan resmi dari Presiden / Panglima Tertinggi. Artinya pada saat ini partai-partai politik belum diakui, tetapi dibubarkanpun tidak“.¹⁵⁹

Untuk dapat diakui sebagai partai politik, maka diperlukan dua syarat yaitu : a). Telah berdiri pada tanggal 5 Juli 1959 (saat didekritkannya kembali UUD 1945); b). Harus memenuhi syarat-syarat tersebut di dalam Penpres No.7/1959. Syarat lain harus dicantumkan Anggarannya Dasar partai politik, bahwa organisasi itu: a.) Menerima dan mempertahankan UUD Negara RI; b.) Bertujuan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia; c.) Mendasarkan program kerjanya atas Manifesto Politik Presiden tentang 17 Agustus 1959.¹⁶⁰

¹⁵⁵ “Jalan Penyederhanaan Kepartaian Yang Paling Wajar Dan Demokrasi, Menurut PKI ialah Melalui Pemilihan Umum”. 1960. Januari 19. Nasional. 1.

¹⁵⁶ “Peraturan Presiden Tentang Kepartaian Ditetapkan”. 1960. Juli 6. Nasional. 1.

¹⁵⁷ Rusadi Kantaprawira. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. (Bandung : Sinar Baru ; 2006), hlm. 98.

¹⁵⁸ “Penjelasan Perpres No.13 /1960: Yang Dinamakan Partai Sekurang-Kurangnya Harus Beranggotakan 150.000 Orang”. 1960. Juli 13. Nasional. 1.

¹⁵⁹ “Beberapa Penjelasan Tentang Penetapan Presiden No.7 / 1959”. 1960. Agustus 25. Nasional. 1.

¹⁶⁰ *Ibid.*

2. Demokrasi Liberal ; Soekarno tidak berdaya

Kehidupan politik di Indonesia antara tahun 1945-1950 telah berdiri sebanyak 25 partai, sedangkan menjelang pemilihan umum 1955 tidak kurang dari 70 partai maupun perorangan mengambil bagian. Melalui pemilihan umum terjadi seleksi, tetapi sebanyak 27 partai dan perorangan tetap melangsungkan kegiatannya.¹⁶¹

Sistem pemerintahan masa Demokrasi Liberal ditandai dengan adanya persaingan berbagai kekuatan dari partai politik, militer tidak ikut campur dalam sistem parlemen dan Soekarno tidak mempunyai kekuatan penuh. Dari tiga ciri tersebut menunjukkan kelemahan dari sistem Demokrasi Liberal.¹⁶²

Pada masa kabinet Wilopo, parlemen memberikan dampak besar bagi tubuh TNI Angkatan Darat, yaitu terjadi perpecahan dalam tubuh TNI AD, di satu kelompok perwira TNI tidak ingin terlibat dalam politik, satu kelompok yang lain perwira dan komandan di daerah menginginkan adanya peran politik dari TNI AD dalam pemerintahan.¹⁶³

Pada masa kabinet Wilopo dilaksanakan kebijakan penghematan di seluruh sektor, termasuk militer. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nasution menyetujui. Program itu ditentang oleh perwira-perwira Angkatan Darat (AD) yang terancam demobilisasi. Pada 17 Oktober 1952 para perwira AD radikal memobilisasi massa untuk demonstrasi menuntut pembubaran parlemendan dan segera diadakan Pemilu.¹⁶⁴

Selain itu mereka juga tidak senang karena parlemen didominasi oleh para kolaborator Belanda, diantaranya : Dr. Mansur (Negara Sumatera Timur); Assaruddin (Negara Pasundan); Suwarno (Negara Jawa Timur), yang merupakan para politisi dari negara-negara federal ciptaan

¹⁶¹ Ali Murtopo. *Strategi Politik Indonesia*. (Jakarta : CSIS ; 1974), hlm. 71. Baca juga Arbi Sanit. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ; 2003), hlm. 24.

¹⁶² Leo Suryadinata. *Golkar dan Milite: Studi Tentang Budaya Politik*. (Jakarta : Pustaka LP3ES ; 2002), hlm. 25.

¹⁶³ Arif Yulianto. *Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Pasca Orba*. (Jakarta : PT. Grafindo Persada ; 2002), hlm. 219.

¹⁶⁴ Hidayat Mukmin, Soebijono, A. S.S Tambunan, Roekmini Koesoemo Astoeti. *Dwifungsi ABRI, Perkembangan & Peranannya Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press ; 1992), hlm. 22.

Belanda.¹⁶⁵ Para perwira akan memanfaatkan kesempatan-kesempatan politik yang ditimbulkan oleh persaingan kelompok-kelompok sipil untuk melanjutkan kepentingan kelompok.¹⁶⁶ Peristiwa 17 Oktober 1952 tidak menyebabkan Kabinet Wilopo jatuh, karena adanya kekuatan partai-partai PNI, PSII, Murba, PKI dan campur tangan Soekarno.¹⁶⁷

3. Demokrasi Terpimpin sebagai Wujud Mengembalikan Kekuasaan

Pemikiran politik di Indonesia masa peralihan Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin menunjukkan ada lima pemikiran politik diantaranya : nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratis dan komunisme. Adanya lima pandangan politik mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan politik, di mana masing-masing partai mengunggulkan ideologinya. Kampanye ideologis dari partai-partai mengarah dan mempertajam polarisasi dalam masyarakat yang menimbulkan perpecahan.¹⁶⁸ Partai saling bersaing dalam menarik anggota, memberi gambaran yang masuk akal tentang keadaan politik, serta merumuskan kembali nilai-nilai yang patut dipertahankan. Konflik yang terjadi di dorong oleh konflik golongan kiri dan kanan.¹⁶⁹

Soekarno mengambil langkah dengan mengganti sistem politik yang ada dengan sistem baru yang dikatakan ideal dengan kepribadian Indonesia. Sistem ini disebut sistem demokrasi musyawarah-mufakat atau Demokrasi Terpimpin dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.¹⁷⁰

Pengaruh Soekarno masa Demokrasi Terpimpin semakin besar. Hal ini disebabkan karena perselisihan partai politik dan keinginan Soekarno untuk memainkan peranan yang paling besar serta karena

¹⁶⁵ Sundhaussen, Ulf. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. (Jakarta : LP3ES ; 1986), hlm. 121.

¹⁶⁶ Arif Yulianto. *Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Pasca Orba*. (Jakarta : PT. Grafindo Persada ; 2002), hlm. 221.

¹⁶⁷ Moedjanto, G. *Indonesia Abad Ke 20 Jilid II: Dari Perang Kemerdekaan Sampai Pelita III*. (Yogyakarta : Kanisius ; 2001), hlm. 89.

¹⁶⁸ Herbert Feith. *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia ; 1999), hlm. 16.

¹⁶⁹ Herbert Feith dan, Lane. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. (Jakarta : LP3ES ; 1988), hlm. iv.

¹⁷⁰ Yahya A. Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press ; 1982), hlm. 93.

keinginan tokoh militer untuk berperan di dalam perpolitikan Indonesia.¹⁷¹

Sejak 1957, peranan partai menurun. Fungsi partai hanya sebagai penyalur suara masyarakat dan tidak berhak untuk mengambil keputusan, partai lebih menjadi penyokong, serta restu presiden dalam penyusunan Dewan Pimpinan Partai (DPP).¹⁷² Tindakan Soekarno tidak mendapat reaksi masyarakat, sehingga memperkuat posisi presiden pada masa Demokrasi Terpimpin.¹⁷³ Sepuluh partai (PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, IPKI, Parkindo, Perti) memperoleh pengakuan presiden, tetapi di daerah-daerah partai diawasi militer serta tidak boleh menentang manifestopolitik.¹⁷⁴

Menurut Tuk Setyohadi Demokrasi Terpimpin adalah “Demokrasi Gotong-Royong” yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan dan harus kembali pada Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷⁵ Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang meliputi semua bidang kenegaraan dan kemasyarakatan termasuk juga bidang politik, ekonomi dan sosial. Demokrasi Terpimpin merupakan demokrasi Indonesia yang berasal dari pengertian terpimpin dalam sila ke empat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan sesuai Pancasila.¹⁷⁶

Konsep Demokrasi Terpimpin atau dikenal dengan Konsepsi Presiden.¹⁷⁷ Pokok ideologi politik Demokrasi Terpimpin ditegaskan pada tanggal 17 Agustus 1959 berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang

¹⁷¹ Alfian. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. (Jakarta : Gramedia ; 1980), hlm. 30-31.

¹⁷² Arbi Sanit. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ; 2003), hlm. 35.

¹⁷³ Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta : Gramedia ; 1975), hlm. 101.

¹⁷⁴ Herbert Feith dan, Lane. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. (Jakarta : LP3ES ; 1988), hlm. 111.

¹⁷⁵ Tuk Setyohadi.. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa Ke Masa*.(Jakarta : CV. Rajawali Cooperation ; 2002), hlm. 109-111.

¹⁷⁶ Sartono Kartodirjo, Marwati D.P., & Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ; 1975), hlm. 150.

¹⁷⁷ Yahya A. Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press ; 1982), hlm. 86.

kemudian dianggap sebagai Manifesto politik.¹⁷⁸ Sistem Demokrasi Terpimpin didasarkan pada keseimbangan kekuatan Presiden. Presiden membentuk badan-badan baru yaitu Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan Front Nasional.

Pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin pada perkembangan selanjutnya memunculkan tiga kekuatan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Presiden sebagai pencetus ide, PKI yang ajarannya termasuk dalam salah satu konsep Nasakom yang kemudian berhasil mendekati diri pada kekuatan Presiden, TNI-AD adalah kekuatan ketiga sebagai penyeimbang dua kekuatan lainnya.

Pelaksanaan politik cenderung mengarah kepada terpusatnya kekuasaan pada diri Soekarno, selaku Pemimpin Besar Revolusi sehingga menjadi demokrasi yang dipimpin Soekarno.¹⁷⁹ Di dalam situasi Demokrasi Terpimpin, partai-partai politik tunduk dalam mewujudkan rencana masyarakat sosialis Indonesia yaitu Presiden Soekarno.¹⁸⁰

Prinsip Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945 dan menyederhanakan partai lalu dikeluarkan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan partai,¹⁸¹ yang bertepatan ketika beberapa pemimpin Partai Masyumi, PSI, IPKI, Partai Katolik dan Parkindo memutuskan membentuk Liga Demokrasi yang menentang ide pembentukan DPR Gotong Royong dan pengaruh Komunis. Pimpinan tertinggi Masyumi dan PSI dipenjara.¹⁸²

PSI dan Masyumi dibubarkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 128, sehingga jumlah partai di Indonesia menjadi delapan partai yaitu: PNI, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI. Pada tahun 1961 melalui Keputusan Presiden No. 440 tahun 1961 telah

¹⁷⁸ Moedjanto, G. *Indonesia Abad Ke 20 Jilid II: Dari Perang Kemerdekaan Sampai Pelita III*. (Yogyakarta : Kanisius ; 2001), hlm. 115.

¹⁷⁹ Rusli Karim. *Perjalanan Partai Politik Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. (Jakarta : PT. Rajawali ; 1983), hlm. 141.

¹⁸⁰ Herbert Feith dan, Lane. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. (Jakarta : LP3ES ; 1988), hlm. 113.

¹⁸¹ Wiyono,R. *Organisasi Kekuatan Sosial Politik Di Indonesia*. (Bandung : Alumni ; 1982), hlm. 29.

¹⁸² Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia ; 2001), hlm. 51.

diakui sebagai partai politik yaitu Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).¹⁸³ Tanggal 21 September 1965 dengan Keputusan Presiden No.291 Tahun 1965 Partai Murba di bubarkan sebelumnya dengan Keputusan Presiden No. 1/KOTI/1965 tanggal 6 Januari 1965.¹⁸⁴

4. Soekarno : Militer dan atau PKI

Menurut Feith ada tiga faktor PKI berperan dalam pemerintahan Soekarno yaitu: a.) Berdasarkan hasil pemilu yang diadakan di Jawa pada tahun 1955 PKI merupakan partai yang terbesar; b.) PKI mempunyai perlengkapan keorganisasian yang palingluas di kalangan pedesaan dan kelas bawah di perkotaan; c.) PKI paling mampu dan tangkas mengerahkan massanya ke rapat-rapat raksasa dimana Soekarno berpidato.¹⁸⁵

Pertentangan Soekarno-Hatta juga menimbulkan dampak dalam tubuh militer. Pada masa pemerintahan Soekarno-Hatta konflik Intern dalam tubuh militer dapat diredam,¹⁸⁶ tetapi pasca mundurnya Hatta dari pemerintahan konflik Internal yang terjadi dalam tubuh militer kembali memuncak. Perseteruan antara kelompok Ahmad Yani dengan Nasution terus berlanjut karena masing-masing mempunyai kedudukan yang sama kuat. Perseteruan ini dipicu oleh adanya kebijakan Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi ,perihal pengangkatan KSAD dan Pangab. Hatta sebelum mengundurkan diri dari pemerintahan pernah mengeluarkan pernyataan bahwa sebaiknya militer tidak masuk dalam kancah politik (Dwi Fungsi), tetapi kalangan militer enggan melepaskan jabatannya. Sebagai contoh adalah ketika A. H Nasution merangkap jabatan sebagai Menham dan Keamanan kemudian Soekarno mengambil kebijakan dengan mengangkat A. Yani sebagai KSAD.

Pada tanggal 2 Oktober, Soeharto menerima perintah dari Soekarno untuk mengambil kendali tentara, tapi dengan syarat bahwa hanya Soeharto

¹⁸³ Wiyono,R. *Organisasi Kekuatan Sosial Politik Di Indonesia*. (Bandung : Alumni. ; 1982), hlm. 29.

¹⁸⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1965*. (Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset ; 1977), hlm. 527.

¹⁸⁵ Herbert Feith, *Konstitusi dan Perjuangan Kemerdekaan*. (Jakarta : LP3ES ; 2001), hlm. 43-44.

¹⁸⁶ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*. (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia ; 2001), hlm. 97

yang memiliki otoritas untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Tanggal 1 November dibentuklah Kopkamtib ("Komando Operasi Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban"), sebagai bentuk resmi otoritas Soeharto ini.¹⁸⁷ Namun pada 5 Oktober, Soekarno berpindah mempromosikan Mayjen Pranoto Reksosamudro, yang dianggap sebagai loyalis Soekarno, sebagai Kepala Staf TNI AD menggantikan Jenderal Nasution.

Setelah pengangkatan Pranoto tersebut, *The New York Times* melaporkan bahwa sebuah "laporan diplomatik" Barat yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa Pranoto adalah mantan anggota PKI. Dugaan komunisme Pranoto, serta pengangkatannya, membuat media tersebut berpandangan bahwa PKI dan Soekarno bersekongkol untuk membunuh para jenderal tersebut untuk mengkonsolidasikan genggamannya pada kekuasaan.¹⁸⁸

Namun bagaimanapun, pasca peristiwa G30S, Mayor Jenderal Soeharto dan unit KOSTRAD-nya adalah yang paling dekat dengan Jakarta. Secara otomatis, Soeharto menjadi jenderal lapangan yang bertanggung jawab untuk mengusut G30S. Kemudian, atas desakan Jenderal Nasution, Soekarno melepas Pranoto dari jabatan yang diberikannya dan Soeharto dipromosikan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965.

PKI mempunyai sifat atheis, non nasionalis yang merupakan organisasi komintern yang menganut doktrin perjuangan kelas yang selalu memecah belah persatuan dan kesatuan.¹⁸⁹ Menurut D. N. Aidit ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) oleh Soekarno sangat menguntungkan PKI. PKI pada masa kepemimpinan Soekarno memperoleh keuntungan politik. PKI lambat laun menjadi partai yang terkuat dengan propagandanya mampu memiliki banyak anggota. Biro khusus dibentuk langsung di bawah D. N. Aidit yang mempunyai tugas

¹⁸⁷ *New York Times*, October 6, 1965

¹⁸⁸ *New York Times*, October 15, 1965

¹⁸⁹ *Dwifungsi ABRI, Perkembangan & Perannya Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia, Loc. cit.*, hlm. 27.

mempersiapkan situasi bagi perebutan kekuasaan dan melakukan infiltrasi ke dalam tubuh TNI dan partai politik.¹⁹⁰

Pada masa Demokrasi Terpimpin, militer tampak menjadi satu-satunya kekuatan yang solid dan menentukan dalam perpolitikan Indonesia. Dalam pandangan masyarakat, militer dianggap sebagai mitra dan pelindung dari tekanan-tekanan yang selama itu dilakukan oleh PKI.¹⁹¹

Presiden Soekarno menentang partai anti PKI karena usaha mereka dikendalikan kaum imperialis untuk membelokkan revolusi Indonesia ke "kanan". Presiden Soekarno dengan Soebandrio meningkatkan kampanye guna mempertahankan status, dengan berusaha mendapatkan dukungan elite sipil dan militer serta menarik dukungan massa. Akan tetapi, kedudukan Soekarno sebagai presiden menjadi lemah, karena mendapat serangan dari berbagai pihak yang kuat untuk bersikap anti komunis.¹⁹²

Sistem politik oleh Presiden kemudian perlu untuk diadakan pembenahan ke arah yang lebih baik dan pembaharuan dalam struktur politik. Alternatif yang dirasa tepat oleh Presiden adalah Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.¹⁹³ Dekrit ini membuka peluang bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin yang menurut Soekarno merupakan sistem politik yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia. Dengan Dekrit Presiden itu memperkenalkan pula sistem pemerintahan baru. Sistem ini didasarkan pada keseimbangan kekuatan yang ada dengan presiden sebagai pusatnya.¹⁹⁴

Kekuatan politik yang sebelumnya tidak begitu berperan, kini mulai mengambil-alih jalannya sejarah. Di bawah UUD 1945 yang diberlakukan kembali, Soekarno yang pada masa Demokrasi Parleментар hanya berkedudukan sebagai simbol, kini menjadi presiden seutuhnya, tokoh yang

¹⁹⁰ Arif Yulianto. *Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Pasca Orba*. (Jakarta : PT. Grafindo Persada ; 2002), hlm. 235.

¹⁹¹ *Ibid.* hlm. 243.

¹⁹² Yahya A. Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press ; 1982), hlm. 201.

¹⁹³ Sukarna. *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta : Mandar Maju ; 1990), hlm. 45.

¹⁹⁴ Kenneth Janda. *Political Parties: A Cross-National Surve*. New York: *The Free Press*. (<http://www.janda.org/ICPP/ICPP1980/index.htm>, 15 Juni 2009). hlm. 707-709.

menguasai, dan sumber kepemimpinan ideology.¹⁹⁵ Diakuinya kembali UUD 1945 juga menaikkan posisi politik militer, dalam hal ini Angkatan Darat. Angkatan Darat yang sejak diberlakukannya Staat van Oorlog en Beleg (SOB) tahun 1957 dengan leluasa terjun di bidang non-militer, kini makin memantapkan kedudukan politik mereka. Di saat mayoritas partai politik mengalami delegitimasi yang serius, PKI yang bangkit sepanjang dasawarsa 1950-an, memperoleh kesempatan untuk tampil secara fenomenal di panggung politik.

Dalam pelaksanaannya Demokrasi Terpimpin, Presiden melontarkan gagasan politik yang terkenal dengan Konsepsi Presiden. Konsepsi Presiden tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu tentang pembentukan :

- a. Kabinet Gotong Royong yaitu kabinet yang terdiri atas hampir seluruh kekuatan politik yang ada dalam DPR
- b. Dewan Nasional yaitu badan penasehat dari pemerintah, yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil golongan fungsional.¹⁹⁶

Pembentukan dua badan tersebut diatas membawa konsekuensi, yaitu : pertama, tidak ada satu partai politik yang melakukan oposisi. Keadaan tersebut terjadi karena pada masa ini, presiden memegang posisi puncak membentuk badan baru yang akan menampung aspirasi massa. Badan itu adalah Front Nasional yang merupakan penggalang kekuatan dalam masyarakat. Partisipasi rakyat yang seharusnya tersalur melalui partai politik tidak terealisasi. Hal itu disebabkan partai politik tergabung dalam Front Nasional.¹⁹⁷ Kedua, diakui golongan fungsional di dalam Dewan Nasional semakin menaikkan citra golongan ini. Kenyataan lain yang menunjukkan pengakuan golongan fungsional berada dalam keanggotaan MPRS dan DPRGR.

Kekuasaan Sukarno dengan Demokrasi Terpimpin-nya, perilaku partai politik dan elit-elitnya yang tidak memiliki sikap kenegarawan, kemudian demokrasi parlementer yang mengusung semangat ultra-demokrasi tidak sepenuhnya sebagai penyebab krisis demokrasi. Mohammad Hatta

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 707-709.

¹⁹⁶ Wiyono,R. *Organisasi Kekuatan Sosial Politik Di Indonesia*. (Bandung : Alumi ; 1982), hlm. 26

menunjukkan kesalahan pada kediktatoran dan para pemangku negara yang sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya tanpa tanggung jawab. Dua sebab inilah yang dikatakan Hatta sebagai penyebab krisis demokrasi di Indonesia.¹⁹⁸

Dalam iklim Demokrasi Terpimpin tampak pemerintah lebih menitikberatkan pembangunan yang berfungsi untuk memperkuat kekuasaan dan mencari prestise di luar negeri, sehingga pembangunan ekonomi mengalami kemunduran.¹⁹⁹ Hal ini, terlihat setelah perlawanan di berbagai daerah dapat diselesaikan, pemerintah bukan memecahkan masalah-masalah ekonomi, tetapi membuat isu yang populer tentang pembebasan Irian Barat.²⁰⁰

Soekarno berusaha memanipulasi massa yang berguna untuk memperkuat kedudukannya. Dengan kampanye ini, militer meminta alokasi dana yang cukup guna memodernisasi persenjataannya serta dana bagi militer. Tindakan ini mendapat tentangan dari PKI, bahwa merekasiap menjadi patriotisme bagi kekuatan Pimpinan Besar Revolusi.²⁰¹

Ketika masalah Irian Barat dapat diselesaikan pada tahun 1963, rakyat berharap adanya penanganan yang serius terhadap pembangunan ekonomi. Pemerintah memang berusaha mengadakan pembenahan dalam pembangunan ekonomi, dengan bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) menyusun program stabilitas ekonomi, lalu diikuti Deklarasi Ekonomi (Dekon) dengan tujuan pembangunan ekonomi melalui jalan kapitalis-liberal.²⁰²

Usaha untuk membangun ekonomi menemui jalan buntu karena kalah menarik dengan isu "Ganyang Malaysia". Dengan adanya penentangan terhadap Federasi Malaysia, jelas akan menghambat

¹⁹⁷ Rusadi Kantaprawira. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. (Bandung : Sinar Baru ; 2006), hlm. 99.

¹⁹⁸ Sri Edi Swasonodan Fauzie Ridjal (penyunting). *Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran*. (Jakarta : UI Press ; 1992), hlm. 111-113.

¹⁹⁹ Arbi Sanit. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan.*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ; 2003), hlm. 9.

²⁰⁰ Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI. Loc. cit.*, hlm. 276.

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 332.

²⁰² Mohtar Mas' oed.. *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. (Jakarta : LP3ES ; 1989), hlm. 46.

pembangunan ekonomi, karena donatur untuk membangun berasal dari negara-negara Barat, antara lain : Inggris, Amerika. Sedangkan pihak lain, politik Indonesia jauh ke kiri.²⁰³

Taktik ini memang sengaja diciptakan oleh PKI dengan memakai nama besar Soekarno. PKI menegaskan bahwa Federasi Malaysia yang dibentuk tidak lain adalah bentuk "pro kolonialisme" yang hendak diselundupkan Inggris ke Indonesia.²⁰⁴ Isu ini diangkat PKI dengan harapan dapat menggalang massa, anti-federasi, anti-Inggris, yang pada akhirnya anti terhadap Kabinet Juanda yang telah bekerja sama dengan Inggris. Kampanye anti federasi juga bertujuan untuk menciptakan suasana radikal di dalam masyarakat, sehingga mereka dengan mudah dapat menyingkirkan lawan politiknya, menentang kebijaksanaan kabinet, bahkan dapat menggulingi Soekarno dalam hal propaganda.²⁰⁵

Aktor politik memang memandang masalah-masalah ekonomi sebagai hal yang kurang penting dibandingkan dengan isu politik. Tiga aktor politik berusaha untuk memperkuat kedudukan politiknya. Karena itu menurut Rusli Karim pembangunan politik dijaga dengan mengorbankan pembangunan ekonomi.²⁰⁶

Pengabaian masalah ekonomi Indonesia nyaris ambruk. Operasi-operasi militer melawan pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi selama krisis 1957-1958 memaksa pemerintah mengambil jalan menempuh anggaran defisit yang sangat besar. Masalah defisit diperburuk oleh adanya pembangunan militer untuk mendukung kampanye Irian Barat dan Ganyang Malaysia, sehingga pada tahun 1965 defisit meningkat menjadi 174%.²⁰⁷

Stagnasi ekonomi diperparah dengan sulitnya bantuan ekonomi internasional. Hal ini karena, Indonesia keluar dari PBB, sehingga IMF

²⁰³ Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI. Loc. cit.*, hlm. 292.

²⁰⁴ Yahya A. Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966. Loc. cit.*, hlm. 133.

²⁰⁵ Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI. Loc. cit.*, hlm. 293.

²⁰⁶ Rusadi Kantaprawira. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Loc. cit.*, hlm. 158.

²⁰⁷ Mohtar Mas' oed.. *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971. Loc. cit.*, hlm. 47.

yang merupakan badan pembantu pembangunan di negara-negara berkembang sulit memberi bantuan kepada Indonesia. Kesulitan keuangan menyebabkan pembangunan tidak berjalan dengan normal, harga barang-barang pokok sukar dikendalikan, kondisi perekonomian rakyat jauh dari standar.

Situasi ekonomi yang memang sengaja dibuat oleh PKI diperparah oleh tindakan-tindakan politis dari Soekarno dan PKI. Dalam percaturan politik internasional, Soekarno mendirikan New Emerging Forces (NEFO) yang mencakup negara-negara baru di Asia dan Afrika, Amerika Latin dan Negara-Negara Sosialis.²⁰⁸ Soekarno juga mengecam pembentukan Federasi Malaysia sebagai komplotan neokolonialis yang bertujuan mengepung Indonesia dan menjamin kepentingan Inggris di Asia Tenggara.²⁰⁹

Tindakan ini diikuti oleh PKI yang bertujuan merongrong kewibawaan negara dan masyarakat. Organisasi-organisasi PKI seperti CGMI, Lekra, Pemuda Rakyat, BTI semakin radikal dan agresif dalam melakukan terror terhadap AD dan organisasi Islam yang selalu dianggap sebagai lawan politiknya yang utama. Wujud dari tindakan ini diterapkan dengan kasus Jengkol, Kanigoro, dan Bandar Betsi, dengan umat Islam sebagai sasaran utamanya. Dengan maksud menegakkan Undang-Undang Land Reform, PKI membagi-bagikan tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah, yang kebanyakan diambil dari perkebunan pemerintah yang dikelola militer.²¹⁰

PKI juga melancarkan tuntutan agar SOKSI, serikat buruh yang diorganisasi militer dilarang. Tuntutan ini juga disusul dengan serangan bahwa pimpinan AD banyak yang korupsi dan menuduh militer tidak mendukung sepenuhnya Operasi Ganyang Malaysia.²¹¹ Isu-isu PKI inilah yang menyebabkan hubungan antara militer dan Soekarno bertambah buruk.

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

²⁰⁹ Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI. Loc. cit.*, hlm. 295.

²¹⁰ Mohtar Mas' oed.. *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971. Loc. cit.*, hlm. 51.

Satu sasaran yang tidak kalah pentingnya adalah HMI yang dicap sebagai organisasi kedok Masyumi yang telah dilarang. Tuntutan balik terhadap tindakan sepihak dari PKI dan kondisi perekonomian negara pernah dilontarkan oleh perorangan maupun massa, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. *Harian Merdeka*, *Berita Indonesia* merupakan pers yang sangat dekat dalam menyuarakan hati nurani rakyat, tetapi sebagai balasannya PKI memunculkan isu gagasan Soekarno seperti Nasakom yang harus ditegakkan, sehingga kandaslah tuntutan yang datang dari rakyat.²¹²

Tuntutan atau protes pernah dilontarkan oleh tokoh-tokoh Liga Demokrasi seperti Syahrir, Imron Rosyadi dan H. Princen, tetapi mereka malah dijebloskan dalam penjara tanpa diadili lebih dahulu. Menanggapi tindakan yang demikian, sekelompok intelektual yang anti komunis mendirikan manifes kebudayaan (Manikebu), yang menuntut kebebasan mengekspresikan kebudayaan.²¹³

Puncak tindakan yang sangat radikal adalah pembantaian para Perwira AD sebagai pelampiasan terhadap militer yang selalu menghalangi idenya.²¹⁴ Pembantaian ini yang membuat marah AD dan semua rakyat Indonesia terhadap aksi-aksi yang dilakukan PKI. Rakyat yang tergabung dalam organisasi, seperti KAMI, KAPI, KAPPI, KABI dengan bantuan Angkatan Darat menuntut pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur PKI dan perbaikan ekonomi.²¹⁵

Tragedi berdarah PKI, yang mengakhiri karir politik Soekarno dan PKI. Tinggal militer sebagai satu-satunya kekuatan politik yang memegang hegemoni kekuasaan dengan masa yang disebut "Pemerintahan Orde Baru"

Menjelang akhir masa Demokrasi Terpimpin, PKI memperoleh kedudukan strategi dalam percaturan politik di Indonesia. Kondisi ini

²¹¹ Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. *Loc. cit.*, hlm. 318.

²¹² Yahya A. Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*. *Loc. cit.*, hlm. 156.

²¹³ *Ibid* hlm. 288.

²¹⁴ Moedjanto, G. *Indonesia Abad Ke 20 Jilid II: Dari Perang Kemerdekaan Sampai Pelita III*. *Loc. cit.*, hlm. 141.

diperoleh berkat kepiawaian Dipa Nusantara Aidit dan tokoh-tokoh PKI lainnya untuk mendekati dan mempengaruhi Presiden Soekarno. Melalui cara ini, PKI berhasil melumpuhkan lawan-lawan politiknya sehingga suatu saat PKI akan dengan mudah dapat melaksanakan cita-cita menjadikannya negara Indonesia yang berlandaskan atas paham komunis.²¹⁶

Ketika Soekarno menolak bantuan pangan dari USAID, sehingga memperburuk kondisi kelaparan, faksi sayap kanan TNI mengadopsi struktur komando regional di mana mereka bisa menyelundupkan bahan pangan untuk memenangkan loyalitas penduduk pedesaan. Dalam upaya untuk membatasi kekuasaan sayap kanan TNI yang meningkat, Partai Komunis Indonesia dan faksi sayap kiri TNI membentuk sejumlah organisasi massa petani dan lainnya.

Pada tahun 1963, kebijakan *Konfrontasi* terhadap Federasi Malaysia yang baru terbentuk diumumkan oleh rezim Soekarno. Hal ini semakin memperburuk perpecahan antara faksi TNI sayap kiri dan sayap kanan, dengan faksi sayap kiri TNI dan Partai Komunis mengambil bagian dalam serangan gerilya di perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia, sementara faksi sayap kanan TNI sebagian besar absen dari konflik (tidak jelas apakah karena pilihan atau perintah Soekarno).

Politik konfrontasi ini selanjutnya semakin mendorong Blok Barat untuk mencari cara untuk menggulingkan Soekarno, yang dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas regional Asia Tenggara (begitu pula Vietnam Utara dalam pandangan Teori Domino Blok Barat). Mendalamnya konflik bersenjata ini mendekati perang terbuka antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1965, meningkatkan ketidakpuasan dunia terhadap rezim Soekarno dan memperkuat peluang kekuasaan para jenderal TNI faksi sayap kanan yang pasukannya masih dekat dengan pusat kekuasaan di Jakarta.

Kendati demikian, PKI belum berhasil melumpuhkan Angkatan Darat yang pimpinannya tetap dipegang para perwira Pancasila. Bahkan pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat semakin

²¹⁵ Yahya A. Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*. *Loc. cit.*, hlm. 184.

²¹⁶ *Ibid.*, hlm. 225.

meningkat memasuki tahun 1965. PKI melempar desas-desus tentang adanya Dewan Jendral di tubuh AD berdasarkan dokumen Gilchrist. Tuduhan itu di bantah AD dan sebaliknya, AD menuduh PKI akan melakukan perebutan kekuasaan.²¹⁷

PKI menganggap TNI terutama Angkatan Darat merupakan penghalang utama untuk menjadikan Indonesia negara komunis. Karena itu, PKI segera merencanakan tindakan menghabisi para perwira TNI AD yang menghalangi cita-citanya. Setelah segala persiapan di anggap selesai, pada 30 September 1965 PKI mulai melancarkan gerakan perebutan kekuasaan. Aksi ini dinamai gerakan 30 September atau G-30-S atau Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu). Gerakan ini dipimpin Letkol Untung Sutoo, selaku Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa.²¹⁸

Pada malam 30 September - 1 Oktober 1965, enam jendral senior TNI diculik dan dieksekusi di Jakarta oleh batalyon tentara dari Resimen Tjakrabirawa (Pengawal Presiden) dalam sebuah aksi yang kemudian disebut oleh Soeharto sebagai "percobaan kudeta". Faksi sayap kanan TNI yang membawahi enam jenderal tersebut hancur, termasuk Panglima Staf Angkatan Darat yang paling berkuasa, Ahmad Yani. Sekitar 2.000 personil tentara dari kelompok tersebut menempati tiga sisi Lapangan Merdeka, dan menduduki Istana Merdeka, kantor Radio Republik Indonesia, dan pusat telekomunikasi, tetapi tidak menempati sisi timur, tempat markas Kostrad.²¹⁹ Menyebut diri mereka "Gerakan 30 September" (disingkat "G30S"), kelompok ini mengumumkan di radio RRI sekitar pukul 7:00 WIB bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh *Central Intelligence Agency* (CIA) Amerika Serikat yang direncanakan untuk menghapus Soekarno dari kekuasaan.²²⁰

²¹⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, *Loc. cit.*, hlm 143

²¹⁸ A. Latief, *Soeharto Terlibat G30S PKI*, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi ; 2000), hlm. 211

²¹⁹ Ricklefs Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta : UGM Press. 1991), hlm. 281

²²⁰ *Ibid.*, hlm. 289.

Mereka mengumumkan telah menangkap beberapa jenderal yang tergabung dalam konspirasi tersebut, yaitu anggota "Dewan Jenderal", yang telah merencanakan kudeta militer terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Mereka kemudian menyatakan bahwa kudeta ini sejatinya akan berlangsung pada "Hari Angkatan Bersenjata" (5 Oktober) dengan dukungan dari CIA, dan bahwa Dewan Jenderal kemudian akan membentuk sebuah junta militer yang memegang tampuk kekuasaan Indonesia.²²¹ Setelah itu, kelompok ini memproklamasikan berdirinya sebuah "Dewan Revolusi" yang terdiri dari berbagai perwira TNI terkenal dan pemimpin sipil yang akan menjadi otoritas tertinggi di Indonesia. Selain itu, mereka menyatakan bahwa Kabinet Dwikora Presiden Soekarno sebagai "demisioner" ("tidak valid").²²²

Menurut salah satu terduga konspirator gerakan tersebut, yaitu Letnan Kolonel Abdul Latief, Resimen Tjakrabirawa tidak mencoba untuk membunuh atau menangkap Mayor Jenderal Soeharto, komandan Kostrad (Komando Strategi dan Cadangan TNI Angkatan Darat) saat itu, karena Soeharto dianggap sebagai loyalis Soekarno.²²³ Soeharto, bersama dengan Jenderal Nasution yang selamat, membuat tuduhan-balik bahwa G30S adalah sebuah gerakan pemberontak yang berusaha untuk menggantikan pemerintahan Presiden Soekarno dengan pemerintahan Komunis. Setelah mendengar pengumuman radio tersebut, Soeharto dan Nasution mulai mengkonsolidasikan kekuatan mereka, berhasil mendapatkan loyalitas Komandan Garnisun Jakarta Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah dan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, komandan pasukan khusus tentara RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat).

Selama petang 1 Oktober, tentara RPKAD merebut kantor RRI dan Bangunan Telekomunikasi kembali tanpa perlawanan karena para tentara personil G30S telah mundur kembali ke Markas Halim Perdanakusuma TNI AU. Pasukan RPKAD menyerbu Markas Halim

²²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia (1994) Appendix, hlm. 19 (verbatim record of radio announcement)

²²² A. Latief, *Soeharto Terlibat G30S PKI, Loc. cit*, hlm. 279

Perdanakusuma TNI AU pada dini hari tanggal 2 Oktober, tapi dicegat oleh tentara G30S dalam baku tembak sengit di mana beberapa korban jiwa jatuh di kedua sisi. Sebuah perintah langsung dari Presiden Soekarno berhasil mengamankan penyerahan tentara G30S siang harinya, setelah pasukan Soeharto menduduki markas tersebut. Pada tanggal 3 Oktober, tubuh para jenderal faksi sayap kanan TNI yang terbunuh oleh G30S ditemukan di lokasi Lubang Buaya dekat Markas Halim dan pada tanggal 5 Oktober (Hari Angkatan Bersenjata) pemakaman umum yang besar diadakan.²²⁴

Pada 1 Oktober 1965 dinihari pasukan pemberontak menyebar ke segenap penjuru Jakarta. Mereka berhasil membunuh dan menculik enam perwira tinggi Angkatan Darat. Enam perwira Angkatan Darat korban keganasan PKI tersebut ialah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprpto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomihardjo. Jenderal Abdul Haris Nasution (Menteri Komparteman/ Kepala Staf Angkatan Bersenjata) yang menjadi sasaran utama berhasil meloloskan diri dari upaya penculikan. Akan tetapi, puterinya, Ade Irma Suryani meninggal setelah peluru penculik menembus tubuhnya. Dalam peristiwa itu tewas pula Lettu Pierre Andreas Tendean ajudan A.H. Nasution yang dibunuh karena melakukan perlawanan terhadap PKI. Demikian pula Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun yang tewas ketika mengawal rumah Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II Dr. J. Leitmena, yang rumahnya berdampingan dengan Jenderal A. H. Nasution.²²⁵

Munculnya desakan untuk memulihkan “dwitunggal” mendapatkan respon dari Soekarno dengan menunjuk Djuanda agar melibatkan Hatta dalam membentuk formasi kabinetnya ataupun sebagai Ketua Badan Perencana Nasional, namun tawaran ini kemudian ditolak oleh Hatta.

²²³ Ricklefs Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta : UGM Press. 1991), hlm. 287.

²²⁴ *Ibid.*, hlm. 281

²²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia (1994) Appendix, hlm. 19 (verbatim record of radio announcement).

Sementara itu keadaan menjadi sangat tidak menentu akibat timbulnya politik tiga kaki “AD-Soekarno-PKI” (Gaffar 2004:56). Masuknya posisi angkatan darat ke dalam kekuatan politik Indonesia membuat para petinggi memiliki bargaining position yang kuat erhadap Presiden Soekarno. Dalam masa ini juga banyak terjadi pemberontakan di daerah-daerah seperti PRRI-PERMESTA yang didukung oleh Amerika, namun pemberontakan ini akhirnya dapat dipadamkan. Imbasnya Partai Masyumi dan PSI dibubarkan oleh Soekarno karena pmimpinnya banyak yang terlibat dalam pemberontakan ini.

5. Akhir Kekuasaan Soekarno

Pasca mundurnya Bung Hatta pada tanggal, 1 Desember 1956 Presiden Soekarno makin tak terkendali dalam melaksanakan keinginannya membawa masyarakat Indonesia kearah kemakmuran yang di cita-citakannya. Soekarno semakin tak terkontrol karena lembaga-lembaga yang dibuat untuk mengkritik dan mengimbangi kekuatan Soekarno satu persatu mulai di bekukan.²²⁶

Dalam bidang politik pemerintahan Soekarno pasca pengunduran diri Moh. Hatta juga menimbulkan dampak yang tidak sedikit yang ditimbulkan oleh ketidakpuasan daerah-daerah akibat pemerintahan otoriter yang diterapkan oleh Soekarno. Adanya pembontakan-pembontakan didaerah merupakan puncak dari kebencian yang diakibatkan pemerintahan yang otoriter sebagai contoh munculnya gerakan dipimpin oleh Zulkifli Lubis, ataupun pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI-PERMESTA.

Pemberontakan yang dilakukan oleh Zulkifli Lubis dan kawan-kawan mantan petinggi Masyumi pada saat itu dilakukan karena Bung Hatta sebagai icon perwakilan luar Jawa ikut disingkirkan oleh Soekarno. Dengan didukung oleh Syafrudin Prawiranegara mantan Menkeu dan Sumitro Joyohadikusumo, Natsir, dan lain-lain. pemberontakan yang dilakukan oleh mereka menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah. Atas nasehat Hatta AH Nasution diutus untuk meredakan pemberontakan ini tanpa ada pertumpahan darah. Sampai

pemberontakan ini reda berimbas kepada partai Masyumi karena banyak pemimpinnya yang banyak terlibat sampai akhirnya partai ini dibekukan oleh pemerintah Soekarno.

Pertikaian antara partai-partai politik mewarnai kehidupan politik pada waktu itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi kekuatan *Under dog* bermain dengan taktik yang begitu licik sampai-sampai Masyumi sebagai lawan politiknya yang paling ekstrim terkena imbasnya. Militer menjadi sasaran berikutnya dengan berbagai cara PKI mencoba menjerumuskan kekuatan militer. Pada sidang Konstituante muncul perdebatan sengit mengenai penggunaan syariat Islam dan kaum Nasionalis, karena tidak tercapai kata sepakat Soekarno sebagai Presiden mengeluarkan Dekrit untuk memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sementara tidak berlaku lagi. Pasca Dekrit Presiden dengan salah satu isinya membubarkan dewan Konstituante pemerintah juga melarang dan membatasi kegiatan-kegiatan politik di Jakarta.²²⁷

Pada tanggal 17 Agustus 1959 Soekarno mengeluarkan manifesto politiknya yang berjudul *A Rediscovery of our Revolution*, (penemuan kembali revolusi kita). Dengan kedudukannya yang sudah kuat Soekarno mencetuskan ide untuk meneruskan gagasan Demokrasi Terpimpin yang diberi nama Manipol Usdek yang diartikan sebagai manifestasi politik yang mengandung unsur UUD'45, sosialisme indonesia, demokrssi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia.²²⁸

Keputusan kontroversial mewarnai kehidupan politik Indonesia pada waktu itu, Soekarno tak bergeming sedikitpun menghadapi lawan-lawannya yang hampir setiap hari mengkritiknya, sebaliknya Soekarno melaksanakan politik membabi buta dengan membredel seluruh majalah /koran yang tidak sejalan dengan cita-citanya. Pembredelan terhadap Surat-surat kabar memberikan reaksi yang keras terhadap Soekarno,

²²⁶ *Ibid.*,

²²⁷ Adnan Buyung Nasution,. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indoensia : Studi Kasus Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959* (Jakarta : Grafiti ; 1995). hlm. 42-45

²²⁸ Mochtar Lubis, *Kemerdekaan Era Demokrasi Terpimpin. Loc. cit.*, hlm. 52-53.

terutama Bung-Hatta yang selalu mengkritik beliau (Soekarno) melalui Surat-surat kabar atau majalah ikut di bredel, kemarahan Bung Hatta bisa diredam dengan banyak mengirim Surat ke Soekarno²²⁹

Kebijakan politik pada masa pemerintahan Soekarno berlaku juga pada Kehidupan Pers Indonesia, secara nyata Presiden Soekarno memberikan orasi politiknya untuk mengontrol pers, seperti yang diuraikan dalam biografinya : Revolusi memerlukan kepemimpinan ... Oleh karena kami masih dalam taraf revolusi ekonomi, aku tidak mengizinkan kemerdekaan pers. ... tentara manakah yang mengizinkan seorang prsjurit menelanjangi jendralnya di muka umum, hal yang akan menjatuhkan kehormatan dan kepercayaan terhadapnya? Tindakan demikian itu tidak dibenarkan bukan karena jendral itu orang yang sombong, melainkan sikap prajurit seperti itu dapat menghambat keutuhan psikologis dari seluruh tentara, menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpercayaan. “Apabila di satu hari sisa-sisa terakhir dari pekerjaan revolusi sudah selesai, apakah Tuan di saat itu akan mengizinkan kebebasan pers? ” Dia (seorang wartawan asing) menanyaiku.

“Saya akan membiarkannya dalam batas tertentu. Saya berpendapat sekarang bahwa saya tidak akan mengizinkan kemerdekaan yang bebas, yang memberikan kebebasan kepada pers untuk membunuh kepala negaranya dengan ditonton oleh seluruh dunia. ... Disuatu negeri baru yang masih bayi seperti negara kami hal yang demikian dapat menghancurleburkan kami. Saya memberikan kebebasan kepada pers untuk menulis apa saja yang mereka mau asal tidak merusakkan keselamatan negara. ” Dan kalau melewati batas?” “Saya jever telinganya. Ini berarti, saya melarang penerbitan surat kabar yang bersalah selama seminggu. Kadang-kadang dua minggu. Kalau ini terjadi lagi, saya mencabut izin penerbitan selama tiga minggu. Dan tindakan terakhir, saya menutup pintunya sampai batas waktu yang tidak tertentu”.²³⁰

²²⁹ Edward C. Smith, *Pembredelan Pers Di Indonesia*. (Jakarta : Pustaka Grafiti Press ; 1986). hlm. 248-249).

²³⁰ Edward C. Smith, *Pembredelan Pers Di Indonesia*. *Loc. cit.* hlm. 248-249).

Bahkan tidak segan-segan pula ketika ada suatu surat kabar Ibukota yang memuat tulisannya Bung Hatta, tentang kritik terhadap pemerintah mengenai ketidak setujuannya terhadap politik “mercusuar” yang hanya menyengsarakan rakyat secara nyata tidak ada faedahnya dan hanya “sekedar” mengharumkan nama Indonesia ikut di bredel.²³¹

Dalam bidang politik pada masa pemerintahan Soekarno menorehkan catatan sejarah yang menakjubkan yaitu dengan diutarakannya sebuah konsepsi yang menurut dirinya dapat mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Pada masa Demokrasi Terpimpin Soekarno mengeluarkan Kebijakan yang sangat penting yaitu berkaitan dengan Konsepsinya mengenai penggabungan beberapa partai politik untuk duduk dalam suatu kabinet, dalam pelaksanaannya konsepsi ini mendapat tentangan dari PSI dan Masyumi tetapi tetap dijalankan oleh Soekarno.²³²

Lebih lanjut Sjamsudin mengemukakan bahwa setelah konsepsinya Soekarno bersikeras untuk merebut Irian Barat dan Malaysia sebagai bagian dari kampanyenya melawan kolonialisme dan imperialisme.²³³ Kebijakan politik masa demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya Pen-Pres No. 7/1960 yang berisi tentang pembubaran Partai politik Masyumi dan PSI serta pembatasan jumlah partai politik menjadi sepuluh saja,²³⁴ kebijakan ini mendapat tentangan yang keras dari Bung Hatta karena sangat bertentangan dengan ide demokrasi yang membatasi hak-hak warga negara dalam beraspirasi.

D. Sikap dan Kebijaksanaan Soekarno terhadap Islam Pasca Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa periode dan babak baru bagi bangsa Indonesia. Setelah memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka, Indonesia berusaha membenahi stabilitas negara untuk membentuk suatu negara yang berdaulat. Dalam masa awal kemerdekaan dibentuklah BPUPKI sebagai badan yang menyiapkan kemerdekaan. Sebagai

²³¹ Budisantoso, *Demokrasi Terpimpin, Loc. cit.*, hlm. 30-31

²³² Syamsudin, *Demokrasi Terpimpin Era Soekarno, Loc. cit.*, hlm. 119.

²³³ *Ibid.*, hlm. 121.

²³⁴ Benny G Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (Jakarta : Elkasa ; 2003). hlm.

sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dibutuhkan suatu dasar negara untuk bisa menjalankan kehidupan pemerintahan bernegara. Pembentukan dasar negara ini memerlukan suatu penggodokan yang matang mengingat Indonesia yang baru merdeka memiliki keanekaragaman budaya dan keyakinan.²³⁵

Dalam pembentukan dasar negara ini melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk umat Islam. Pembahasan dasar negara yang terangkum melalui Piagam Jakarta banyak melibatkan peran umat Islam dalam penyusunannya. Namun, akhir dari terbentuknya dasar negara menimbulkan kekecewaan dipihak umat Islam. Kekecewaan umat Islam tidak berhenti di situ saja. Pada masa selanjutnya umat Islam juga tidak memiliki kebebasan dalam berpolitik. Soekarno sebagai penguasa RI hanya mengizinkan Masyumi sebagai satu-satunya wadah perpolitikan umat Islam. Masyumi yang beranggotakan berbagai organisasi Islam pun akhirnya tidak bisa memberikan kepuasan dan kebebasan terhadap para anggotanya.²³⁶

Banyak kalangan Islam yang menilai bahwa kebijakan Presiden Soekarno tidak banyak berpihak terhadap umat Islam. Mengingat banyaknya peran umat Islam sejak masa perjuangan sampai masa kemerdekaan hal ini menyebabkan kekecewaan di pihak umat Islam.²³⁷

Pemikiran politik di Indonesia setelah kemerdekaan menurut Herbert Feith dan Lance Castles²³⁸ membagi periode politik di Indonesia menjadi tiga bagian, yakni pertama adalah periode revolusi bersenjata (1945-1949). Pada periode ini pemikiran politik dikuasai oleh sekelompok kecil orang berpendidikan, yaitu mereka yang berperan dalam pergerakan nasional seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Natsir dan Tan Malaka. Akibatnya kesenjangan antara dunia pemikiran politik dan dunia kekuasaan politik cukup sempit. Tema pemikiran politik pada masa ini adalah pencarian dasar-dasar umum yang tepat bagi bangsa Indonesia, salah satu contoh produknya adalah Pancasila.²³⁹

²³⁵ Endang Saifuddin Anshari., *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 ; dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara RI 1945-1959*, (Jakarta : CV Rajawali Press ; 1986)., hlm. 133.

²³⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

²³⁷ Herbert Feith dan Lance Castles. Ed. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta : LP3ES ; 1988), hlm. 153.

²³⁸ *Ibid.*, hlm. 155.

²³⁹ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (1962), hlm. 195.

Periode *kedua*, “liberal” (1950-1959) pemikiran politik mulai meluas, tidak hanya para pimpinan negara namun juga para penulis, wartawan, dan mahasiswa. Pada masa ini ditandai dengan konflik antar partai dan pertentangan ideologi ekstrim. Periode ini juga sering disebut dengan masa demokrasi parlementer. Periode *ketiga*, periode demokrasi terpimpin (1959-1965), ditandai dengan penerimaan wajib pada ide-ide politik Soekarno seperti Sosialisme ala Indonesia dan Nasakom.²⁴⁰

Oleh Karena itu menurut penulis kalau pemerintah Soekarno terus melakukan himbauan dengan berulang-ulang yang mendominasi, dan hampir memonopoli diskusi publik. Tidak hanya itu, pemikir yang tidak sepaham dengan ide-ide itu dibungkam untuk melancarkan ide-ide politik yang berlawanan dengan Soekarno. Kondisi ini menjelaskan kalau pemerintah alergi dengan kritik atau oposisi.

Adapun pemerintahan Soekarno dibagi dalam tiga tahapan, antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Soekarno Pada Masa Demokrasi Parlementer

Dalam sistem parlementer, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden ini tidak dapat diganggu gugat. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, yang bertanggung jawab terhadap parlemen. Setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan dari parlemen. Apabila 40 mayoritas suara yang ada dalam parlemen tidak mendukung kabinet, maka kabinet harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Selain itu, parlemen dapat membubarkan kabinet sewaktu-waktu dengan suara mayoritas, namun kebalikannya dalam sistem ini Presiden juga dapat membubarkan parlemen setiap waktu.²⁴¹

Pada tahun 1952 parlemen diwakilil empat partai, yaitu : Masyumi, PNI, PKI dan PSI. Dari keempat partai tersebut, wakil terbanyak berasal dari Masyumi.²⁴² Demokrasi Liberal atau dikenal dengan nama demokrsi

²⁴⁰ Ir. Soekarno. 1964. “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, dalam Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta: Departemen Penerangan, hlm. 23.

²⁴¹ Yahya A. Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press ; 1982), hlm. 66-68.

²⁴² Liddle, R. Willam. *Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. (Yogyakarta : Kelompok Studi Batas Kota ; 1992), hlm. 176

Parlemeter, berlaku di Indonesia mulai tahun 1950-1959. Meskipun cukup lama dilaksanakan, namun demokrasi itu dianggap gagal. Gambaran kegagalan pelaksanaan demokrasi ini terlihat dari keadaan dalam parlemen yang keanggotaannya terdiri dari banyak partai yang menjadi penyusunnya. Diantara partai-partai yang muncul itu antara lain PSI (Partai Sosialis Indonesia), PSII (Partai Sosialis Islam Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia) dan Partai Katolik. Selain itu juga ada Masyumi yang mengatasnamakan sebagai partai Islam.²⁴³

Ketidakberhasilan dari pelaksanaan demokrasi parlementer juga terlihat dari seringnya terjadi pergantian kabinet, akibat dari kuatnya serangan dari pihak yang menjadi oposisi.²⁴⁴ Adapun pergantian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kabinet Moh Natsir/ Masyumi (6 September 1950 – 27 April 1951)/hanya bertahan selama 233 hari,
- b. Kabinet Sukiman/ Masyumi (27 April 1951 – 3 April 1952), atau hanya bertahan selama 341 hari,
- c. Kabinet Wilopo/ PNI (3 April 1952 – 30 Juli 1953),
- d. Kabinet Ali Saastroamidjoyo/PNI (30 Juli 1953-15 Agustus 1955),
- e. Kabinet Burhannudin Harahap / Masyumi (12 Agustus 1955- 24 Maret 1956),
- f. Kabinet Ali Saastroamidjoyo/PNI (24 Maret 1956- 9 April 1957),
- g. Kabinet Juanda/ Non partai (9 April 1957-10 Juli 1959).²⁴⁵

Melihat 7 kali pergantian kabinet di atas, pada awalnya Soekarno lebih mempercayakan kepada Masyumi (Natsir dan Sukiman), tentu berharap wajah perpolitikan berkiblat kepada Islam. Namun sayangnya kepercayaan tersebut tidak dapat dimaksimalkan oleh Masyumi, sehingga kepemimpinan beralih kepada PNI. Menurut analisis penulis, walaupun sering dilontarkan oleh Soekarno tentang NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis), dalam

²⁴³ M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta: UGM Press. ; 1991), hlm.138

²⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

²⁴⁵ Kisdarto Atmosoeperto, *Pandangan Hidup dan Kepribadian Bung Karno dari A-Z (Kecemerlangan, Kebijakan, dan Kepedulian pada Penderitaan Bangsa)*. (Malang : Bayu Media Publishing.; 2007), hlm. 120

pelaksanaannya Soekarno tidak pernah memberi porsi kepada Komunis untuk memegang kabinet parlementer.

Meskipun demikian, terdapat satu keberhasilan selama masa seringnya pergantian kabinet tersebut, yaitu berhasilnya dilaksanakan pemilu pada tahun 1955, yaitu pada masa kabinet Burhannudin. Dari hasil pemilu tersebut, hanya 4 partai yang mendapat kursi lebih dari 8 yaitu; PNI (58 kursi), Masyumi (60 kursi), NU (47 kursi), dan PKI (32 kursi).²⁴⁶

Pada masa pemerintahan kabinet Ali, yaitu pada tanggal 26 Maret 1957 DPR baru melakukan sidang. Dalam pembukaan sidang tersebut Presiden Soekarno mengutarakan harapannya dalam pidatonya tentang suatu bentuk demokrasi yang benar-benar bersifat Indonesia.²⁴⁷

Sementara itu, dipihak lain yang memperkeruh keadaan adalah pembatalan hasil sidang KMB dan pemabatalan Uni Indonesia Belanda secara sepihak oleh Indonesia terkait soal penyelesaian kasus Irian Barat mengakibatkan kondisi pemerintahan Indonesia semakin terpuruk sebab orientasi pemerintah hanya pada penyelesaian kasus tersebut. Akibat yang sangat buruk dari hal tersebut adalah banyak bermunculan pergolakan-pergolakan baik di pusat maupun di daerah terutama yang terkait dengan masalah ekonomi.²⁴⁸

Pergolakan ini berlanjut dengan mencapai puncaknya pada krisis yang berlarut-larut dalam tubuh militer, sehingga menyebabkan runtuhnya sistem politik parlementer. Perubahan sistem ini lebih tegas dilakukan oleh Soekarno melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 1959, dengan dukungan yang penuh dari pihak militer yang memang kurang cocok dengan demokrasi parlementer.²⁴⁹

Pada awal Demokrasi Parlementer, Masyumi masih memegang peranan aktif dalam politik. Pada masa kabinet Natsir dan Kabinet Soekiman, posisi menteri Agama berada ditangan K.H. Wahid Hasyim (tokoh NU dalam Masyumi). Namun, pada masa Kabinet Wilopo-Prawoto yang dimulai sejak

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm, 122

²⁴⁷ Ben, Anderson dkk. *100 Tahun Soekarno. Loc. cit.*, hlm.201.

²⁴⁸ Hering, Bob. *Biografi dan Kepribadian Soekarno, Pendiri Republik Indonesia*. Dalam Ben, Anderson dkk. 2001. Dalam peringatan 100 Tahun Soekarno. hlm. 187.

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 187. Baca juga Jurdi Syarifudin . *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar : 2007), hlm. 22.

April 1952, posisi Menteri agama dipegang oleh K.H. Fakhri Usman (unsur Muhammadiyah dalam Masyumi). Dalam masa kabinet ini NU memang tidak terwakili, sementara Masyumi menduduki empat kursi dan PSII satu kursi. Pertengahan tahun 1953 Kabinet Wilopo digantikan dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Dalam kabinet ini NU telah berdiri sendiri sebagai partai politik dan mula-mula hanya menduduki tiga kursi namun setelah terjadi perubahan, NU mendapat empat kursi yang meliputi kursi wakil perdana menteri I, menteri dalam negeri, menteri agama, dan menteri agraria. Kabinet Ali I jatuh pada bulan Juli 1945 dan digantikan oleh kabinet Burhanudin Harahap (Masyumi). Kabinet ini merupakan kabinet terakhir sampai partai tersebut bubar pada tahun 1960. Salah satu prestasi dari kabinet ini adalah berhasil menyelenggarakan Pemilu pertama pada tahun 1955.²⁵⁰

Sebelum dikeluarkannya Dekrit 5 Juli, pada tanggal 22 April 1959, Soekarno sebagai Presiden pertama RI menyampaikan definisi Demokrasi Terpimpin. Salah satu definisi mengatakan bahwa Demokrasi Terpimpin ialah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun, dalam kesempatan lain Soekarno menyampaikan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme dan tanpa otokrasi yang diktator. Yang dimaksud dengan demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dalam satu kekuasaan sentral ditangan 'sesepuh' yang tidak diktator dan mengayomi masyarakat.²⁵¹

Periode Demokrasi Parlementer berakhir setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit 5 Juli mengukuhkan kembali UUD 1945 dan pembubaran Majelis Konstituante serta sebagai tanda dimulainya fase baru yang disebut Demokrasi Terpimpin.²⁵² Soekarno memilih Demokrasi Terpimpin sebagai bentuk demokrasi Indonesia karena menurutnya Demokrasi Parlementer tidak bisa mewujudkan cita-cita demokrasi bangsa Indonesia. Kekecewaan Soekarno pada keadaan yang sebenarnya juga berpangkal dari tidak terwujudnya kabinet gotong royong yang diinginkannya

²⁵⁰ Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, *Bung Karno dan Wacana Islam ; Kenangan 100 Tahun Bung Karno, Loc. cit.*, hlm. 40.

²⁵¹ Legge, J.D. *Soekarno, Biografi Politik*. (Jakarta : Sinar Harapan ; 1985), hlm. 122.

di mana PKI turut serta di dalamnya. Soekarno membentuk Dewan Nasional pada tanggal 11 Juli 1959 yang diketuai oleh Soekarno sendiri.²⁵³

Pada tanggal 22 Juli 1959 Dewan Nasional diganti dengan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang juga diketuai oleh Soekarno. Penanganan sehari-hari DPAS diserahkan oleh wakilnya, Roeslan Abdoelgani, tokoh PNI. DPAS ini pulalah yang mengusulkan agar pidato kenegaraan presiden tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan sebagai Manifesto Politik. Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 Soekarno menyampaikan dasar-dasar Demokrasi Terpimpin. Dasar-dasar tersebut yaitu:

- a. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan negara.
- b. Tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa, dan negara.²⁵⁴

Menurut hemat penulis, bahwa posisi Soekarno pada masa demokrasi parlementer ini tidak memiliki kekuasaan, Soekarno hanya diam, sementara Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kondisi inilah yang menjadi dasar pijakan pemikiran Soekarno untuk mengembalikan kekuasaan penuh atas dirinya sebagai presiden sebagai pemegang kekuasaan.

2. Kebijakan Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Demokrasi liberal atau sistem parlementer di Indonesia berdampak pada instabilitas keamanan, politik serta ekonomi. Hal ini dibuktikan hanya dalam rentang waktu 10 tahun terdapat 7 kabinet jatuh bangun. Disamping itu muncul gerakan-gerakan separatis serta berbagai pemberontakan di daerah. Sementara itu, Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru gagal melaksanakan tugasnya disebabkan adanya pertentangan diantara partai politik di Konstituante.²⁵⁵

Dalam pidato tanggal 22 April 1959 di depan Konstituante dengan judul “Res Publica”, Presiden Soekarno atas nama pemerintah menganjurkan,

²⁵² Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masyarakat Kenegaraan*, (Jakarta:LP3ES, 1985), hlm. 40

²⁵³ Raharjo, Pamoedjone dan Isah Gusmian. 2002. *Bung Karno dan Pancasila Menuju Revolusi Nasional*. (Yogyakarta : Galang Press ; 2002), hlm. 202.

²⁵⁴ Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern. Loc. cit.*, hlm. 123-124..

²⁵⁵ Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia; Demokrasi, Islam, dan Idiologi Toleransi*, Terjemahan Hartono Hadikusumo, *Loc. cit.* hlm. 134.

supaya Konstituante dalam rangka rencana pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menetapkan UUD 1945 sebagai UUD bagi ketatanegaraan yang definitif.²⁵⁶

Dewan Konstituante berbeda pendapat dalam merumuskan dasar negara. Pertentangan tersebut antara kelompok pendukung dasar negara Pancasila dan pendukung dasar negara berdasar syariat Islam. Kelompok Islam mengusulkan agar mengamademen dengan memasukkan kata-kata : *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk–pemeluknya*” kedalam Pembukaan UUD 1945.²⁵⁷

Usul amandemen tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota Konstituante dalam sidang tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 yang setuju berbanding 265 yang menolak. Sesuai dengan ketentuan tata tertib maka diadakan pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan tanggal 2 Juni 1959 namun tidak mencapai quorum. Akhirnya Konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk waktu tanpa batas.²⁵⁸

Dengan memuncaknya krisis nasional dan untuk menjaga ekses–ekses politik yang mengganggu ketertiban negara, maka KSAD Letjen. A. H Nasution atas nama pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), pada tanggal 3 Juni 1959 mengeluarkan peraturan No. Prt./ Peperpu/ 040/ 1959 tentang larangan mengadakan kegiatan politik.²⁵⁹ Kegagalan Konstituante dalam melaksanakan tugasnya sudah diprediksi sejak semula, terbukti dengan gagalnya usaha kembali ke UUD 1945 melalui saluran konstitusi yang telah disarankan pemerintah. Dengan jaminan dan dukungan dari Angkatan Bersenjata, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, mengumumkan Dekrit Presiden. Keputusan Presiden R I No. 150 tahun 1959 yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat tiga hal yaitu:

Pertama : Menetapkan pembubaran Konstituante.

²⁵⁶ Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, *Bung Karno dan Wacana Islam ; Kenangan 100 Tahun Bung Karno, Loc. cit.*, hlm. 45.

²⁵⁷ Edwar Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, Terjemahan Anna Hadi dan Rahmani Astuti, (Bandung ; Mizan ; 1984), hlm. 124.

²⁵⁸ Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, *Bung Karno dan Wacana Islam ; Kenangan 100 Tahun Bung Karno, Loc. cit.*, hlm. 40.

²⁵⁹ Dauglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia; Demokrasi, Islam, dan Idiologi Toleransi*, Terjemahan Hartono Hadikusumo, *Loc. cit.* hlm. 131.

- Kedua* : Menetapkan UUD 45 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku lagi UUDS.
- Ketiga* : Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.²⁶⁰

Demokrasi Terpimpin merupakan pemusatan kekuasaan ditangan seorang pemimpin dalam hal ini Soekarno, membawa konsekuensi politik bagi umat Islam. Sayap pesantren, yaitu NU bersama PSII dan Perti diizinkan hidup di bawah payung Demokrasi terpimpin. Mereka berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi politik yang baru dan berusaha bertindak selalu menyenangkan Soekarno.²⁶¹

Di sisi lain, kaum modernis bagi Soekarno merupakan penghalang revolusi. Kaum modernis terutama Masyumi dianggap sebagai musuh revolusi. Adanya perbedaan antara musuh dan kawan revolusi menyebabkan kristalisasi dalam tubuh umat Islam. Pada tanggal 20 Maret 1960 Soekarno membubarkan parlemen dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Anggota DPRGR yang dipilih merupakan kader-kader Soekarno. Tokoh-tokoh Masyumi dan PSI tidak dimasukkan dalam anggota DPRGR dengan alasan bahwa kedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan. Jika diteliti lebih cermat, keanggotaan DPRGR terdiri dari 94 pihak Nasionalis-Sekuler, kelompok Komunis mendapat 81 kursi, dan wakil Islam hanya mendapat 67 kursi.²⁶²

Penjelasan umum Penpres Nomor 7 Tahun 1959 menyatakan bahwa Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 ternyata tidak berhasil mencapai stabilitas politik. Penjelasan juga menyatakan bahwa ketidakstabilan politik mencapai puncaknya pada waktu Konsituante membicarakan Amanat Presiden tanggal 22 April 1959 yang menganjurkan kembali kepada UUD 1945. Konsituante tidak berhasil mengambil keputusan. Berdasarkan alasan

²⁶⁰ Edwar Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, Terjemahan Anna Hadi dan Rahmani Astuti, *Loc. cit.*, hlm. 124.

²⁶¹ Herbert Feith dan Lance Castles. Ed. 1988. "Pengantar", dalam *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, hlm. 132

tersebut dipandang telah tiba waktunya untuk mencabut maklumat tersebut serta mengatur perkembangan partai politik sebagai alat demokrasi sehingga dapat berlangsung dalam suasana demokrasi terpimpin. Sebagai pelaksanaan Penpres Nomor 7 Tahun 1959, peraturan selanjutnya yang dikeluarkan untuk melakukan penyederhanaan partai politik adalah Perpres Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai Politik yang selanjutnya diubah dengan Perpres Nomor 25 Tahun 1960. Perpres Nomor 13 Tahun 1960 mewajibkan kepada partai politik yang telah berdiri pada 5 Juli 1959 untuk menyesuaikan AD dan ART dengan ketentuan dalam Penpres Nomor 7 Tahun 1959.²⁶³

Sebagai pelaksanaan dari Perpres Nomor 13 Tahun 1960, pada 14 April 1961 dikeluarkan Kepres Nomor 128 Tahun 1961 yang mengakui 8 partai politik, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia (Partindo), Partai Murba, PSI Arudji, dan IPKI. Pada hari yang sama juga dikeluarkan Keppres Nomor 129 Tahun 1961 yang menolak mengakui 4 partai politik, yaitu PSI Abikusno, PRN Bebas, PRI, dan PRN Djody.²⁶⁴

Selain itu, pada 27 Juli 1961 dikeluarkan Keppres Nomor 440 Tahun 1961 yang mengakui Parkindo dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).²⁶⁵ Terhadap Keputusan Presiden yang tidak mengakui beberapa partai politik tersebut tidak terdapat upaya hukum yang diajukan ke pengadilan. Kendati tersebut dapat dipahami karena kekuasaan Presiden Soekarno pada saat itu sangat besar, bahkan Ketua MA ditempatkan sebagai Menteri Koordinator Hukum dan Dalam Negeri, sehingga kedudukannya berada di bawah Presiden, Akibat kebijakan penyederhanaan partai politik tersebut, partai politik tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam pembangunan bangsa. Bahkan partai-partai yang masih ada, juga mendapatkan pengawasan yang ketat dari militer dan pemerintahan sipil. Kegiatan politik diizinkan dengan syarat tidak bertentangan dengan Manipol. Partai-partai yang tidak diakui tentu kehilangan

²⁶² *Ibid.*, hlm. 133. Baca juga Nurdin M. Amin., *Sejarah Pemikiran Islam*. (Bandung : Amzah , 2010)., hlm. 32.

²⁶³ Muchamad Ali Safa"at, *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. (Jakarta : Rajawali Pers ; 2011), hlm. 160.

²⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 165.

²⁶⁵ Edwar Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, Terjemahan Anna Hadi dan Rahmani Astuti, *Loc. cit.*, hlm. 124.

eksistensinya sebagai subjek hukum. Pernyataan tidak mengakui partai politik oleh pemerintah memiliki akibat hukum yang sama dengan tindakan pembubaran partai politik sebagai subjek hukum. Dalam ketentuan yang berlaku pada saat itu, tidak terdapat ketentuan yang memberikan upaya hukum kepada partai politik yang tidak mendapat pengakuan. Dari 4 partai yang tidak diakui, terdapat Partai Rakyat Indonesia (PRI) yang menurut hasil pemilu 1955 memperoleh 2 kursi di DPR. PRI tidak mendapatkan kursi dalam DPRGR yang dibentuk berdasarkan Penpres Nomor 4 Tahun 1960. Sedangkan partai-partai yang diakui mendapatkan jatah kursi, kecuali IPKI.²⁶⁶

Sejak tahun 1960 Soekarno secara terus-menerus berbicara mengenai kebaikan suatu pemerintahan Nasakom, dan sering didengar bahwa akan dilaksanakan dengan jalan perombakan kabinet, ternyata ini tidak pernah terjadi.²⁶⁷ Di sini umat Islam kehilangan kursi sebanyak 48 jika dibandingkan dengan parlemen sebelumnya. Namun, yang lebih menderita kerugian adalah modernis yang telah dicap sebagai musuh revolusi.²⁶⁸ Soekarno juga menyampaikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang beberapa bulan kemudian disebut Manifesto Politik (Manipol). Ia menyerukan semangat revolusi, keadilan sosial, dan revitalisasi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan. Pada awal tahun 1960 ideologi yang samar-samar ini menjadi semakin rumit dengan ditambahkan kata USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Soekarno mengharuskan pers mendukung Manipol-USDEK yang dicetuskannya. Namun, beberapa redaktur yang pro-Masyumi dan pro-PSI menolak sikap mendukung terhadap Manipol-USDEK. Sebagai akibatnya, terjadi pembredelan surat kabar.²⁶⁹

Kebijakan-kebijakan politik Soekarno kini lebih menekankan pada adanya persatuan antara Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Dengan berkurangnya peran umat Islam dalam panggung politik Demokrasi

²⁶⁶ Edwar Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, Terjemahan Anna Hadi dan Rahmani Astuti, (Bandung ; Mizan ; 1984), hlm. 162.

²⁶⁷ John D Legge, *Soekarno Sebuah Biografi Politik*. (Jakarta : Sinar Harapan ; 1985), hlm. 368.

²⁶⁸ *Ibid*, hlm.183-186

Terpimpin menunjukkan bahwa Soekarno menginginkan suatu koalisi politik antara kaum Nasionalis, Agama, dan Komunis. Tema yang diangkat oleh Soekarno adalah Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Perwujudan dari politik Nasakom ini adalah tampilnya PNI sebagai wakil Nasionalis, NU sebagai wakil Agama, dan PKI sebagai wakil Komunis dalam koalisi kabinet baru bentukan Soekarno.²⁷⁰

Bentuk Demokrasi Terpimpin yang dipilih oleh Soekarno setidaknya telah mempersempit gerak umat Islam dalam panggung politik Indonesia. Ketidakpuasan Soekarno yang hanya sebagai presiden simbol sebagaimana ditetapkan dalam UUDS 1950 sebagai landasan konstitusional pelaksanaan Demokrasi Parlementer, menyebabkan Soekarno menetapkan Demokrasi Terpimpin. Keinginan Soekarno untuk berkuasa secara langsung disampaikan pertama kali pada tanggal 28 Oktober 1956 pada waktu ia mengemukakan konsepsi Bung Karno. Perpindahan politik ini dianggap oleh sebagian orang telah menyimpang dari UUDS 1950. Di antara reaksi terhadap *move* politik Soekarno dilontarkan oleh Isa Anshory, anggota DPR. Menurutnya, konsepsi Bung karno memungkinkan terbentuknya demokrasi yang tanpa oposisi.²⁷¹

Umat Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda terhadap demokrasi terpimpin. Pada garis besarnya, umat Islam terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan yang kontra dan golongan yang ikut tergabung dalam Demokrasi Terpimpin. Masyumi sebagai golongan yang menentang model politik Soekarno memandang bahwa Demokrasi Terpimpin merupakan sistem demokrasi yang otoriter, yang menyimpang dari ajaran Islam. Oleh sebab itu, Masyumi tidak mau terlibat dalam politik Soekarno. Kelompok kedua yaitu kelompok Liga Muslim (NU, PSII, dan Perti) yang turut serta dalam Demokrasi Terpimpin. Keterlibatan mereka dalam politik Demokrasi Terpimpin merupakan sebuah sikap yang realistis dan pragmatik. Saifudin Zuhri sebagai wakil dari NU, misalnya, membawakan dalil “Apa yang tidak bisa diraih secara utuh maka sebagian yang lain jangan dilepaskan” untuk

²⁶⁹ M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, Terj.Dharmono Hardjowidjono* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1994)hlm.403-404

²⁷⁰ *Ibid*, hlm.406

²⁷¹ Maarif, *Islam dan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, *Loc. cir.*, hlm. 52

membenarkan keterlibatan NU dalam Demokrasi Terpimpin.²⁷² Berdasarkan dalil yang diajarkan di pesantren inilah NU turut masuk dalam Demokrasi Terpimpin.²⁷³

Berbeda dengan Masyumi yang memandang Demokrasi Terpimpin akan membawa bencana bagi bangsa dan negara. Sikap penolakan Masyumi dan PSI terhadap Demokrasi Terpimpin menyebabkan kedua partai politik Islam tersebut melancarkan perlawanan terhadap pemerintah. Pada bulan Maret 1960, Masyumi dan PSI menolak anggaran belanja pemerintah yang diajukan pada rapat DPR yang terpilih tahun 1955 (lembaga terakhir di mana mereka terwakili).²⁷⁴

Maka atas dorongan Hatta dan beberapa tokoh militer, PSI, Masyumi dan beberapa sekutunya membentuk Liga Demokrasi sebagai tandingan Demokrasi Terpimpin.²⁷⁵ Liga Demokrasi dibentuk pada tanggal 24 Maret 1960 yang beranggotakan tokoh-tokoh Masyumi, PSI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan juga dua tokoh NU. NU secara umum mendukung dan ikut terlibat dalam Demokrasi terpimpin. Namun, K.H. M. Dahlan dan Imron Rosjadi menentang Demokrasi Terpimpin. Mereka memang tidak bisa membawa penentangan tersebut ke dalam garis politik.²⁷⁶

Liga Demokrasi mula-mula dibentuk sebagai bentuk protes terhadap pembubaran DPR pilihan rakyat. Namun, tujuan jangka panjangnya memang untuk melawan sistem otoriter Soekarno. Pada saat Liga didirikan, Soekarno sedang berada di luar negeri. Setelah ia kembali, ia menunjukkan sikap yang sangat anti terhadap Liga Demokrasi. Selang beberapa bulan kemudian, Liga ini dibubarkan oleh Soekarno tanpa ada yang bisa mempertahankannya. Setelah bubarnya Liga Demokrasi, udara otoriter semakin mewarnai pemerintahan Soekarno. Dukungan partai-partai menyebabkan Soekarno berpikir bahwa sistem yang diciptakannya berjalan mulus. Dengan kata lain, demokrasi yang

²⁷² Edwar Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, Terjemahan Anna Hadi dan Rahmani Astuti, *Loc. cit.*, hlm. 157

²⁷³ Dauglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia; Demokrasi, Islam, dan Idiologi Toleransi*, Terjemahan Hartono Hadikusumo, *Loc. cit.* hlm. 140.

²⁷⁴ Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, *Bung Karno dan Wacana Islam ; Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, *Loc. cit.*, hlm. 51.

²⁷⁵ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern. Terj. Dharmono Hardjowidjono. Loc. cit.* hlm 405

²⁷⁶ Edwar Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, Terjemahan Anna Hadi dan Rahmani Astuti, *Loc. cit.* hlm. 146.

diperjuangkan mati-matian oleh Masyumi dan PSI merupakan hanya sebuah gejala urban mengingat kedua partai ini bercorak kota terutama PSI. Masyumi sekalipun memiliki pengikut di daerah pedesaan, partai ini adalah partai kota karena partai ini mewakili kaum modernis muslim. Berbeda dengan NU yang mewakili Islam santri pedesaan.²⁷⁷

Kekecewaan Masyumi terhadap pemerintahan Soekarno juga terletak pada putusan Soekarno membentuk DPRGR. Masyumi yang telah dianggap sebagai musuh revolusi tidak mendapat kesempatan dalam DPRGR. Sebuah artikel dalam majalah Hikmah yang merupakan milik Masyumi mencerminkan sikap kekecewaan mereka juga kepada pihak NU yang telah bergabung dengan Demokrasi Terpimpin.²⁷⁸

Pada tanggal 20 Januari 1961 dibentuk Front Nasional yang sesuai dengan konsep dan ide Soekarno. Dalam jangka panjang, lembaga tersebut akan dijadikan sebagai partai tunggal negara, dengan menggunakan basis masa sebagai penggeraknya yang tergabung dari seluruh partai politik yang berbeda ideologi dan seluruh golongan fungsional. Untuk menghambat rencana Soekarno tersebut, TNI-AD berhasil menghimpun beberapa organisasi golongan fungsional kedalam suatu organisasi yang bernama Sekber (Sekretariat Bersama) pada tanggal 20 Oktober 1964. Tujuan Sekber untuk menandingi kekuatan PKI yang semakin besar dan berpengaruh di masyarakat sehingga membahayakan eksistensi TNI.²⁷⁹

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa masa Demokrasi Terpimpin mempunyai ciri-ciri, yaitu *pertama*, peran dominan Presiden dalam segala aspek. *Kedua* pembatasan atas peran DPR serta partai-partai politik kecuali PKI yang malahan mendapat kesempatan untuk berkembang. *Ketiga*, peningkatan peran TNI sebagai kekuatan sosial politik.²⁸⁰

Ada beberapa kejadian penting pada masa demokrasi terpimpin yang sangat mencolok menguntungkan Angkatan Darat, antara lain:

²⁷⁷ Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Loc. cit., hlm. 64-65

²⁷⁸ Syafi'i Maarif, *Islam dan Masyarakat Kenegaraan*, Loc. cit. hlm. 187

²⁷⁹ Miriam Budiardjo, 1996. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1995), hlm. 228.

²⁸⁰ Mohammad Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta ; 2000), hlm.229.

- a. Pada tahun 1945-1950. Pemberlakuan sistem kabinet parlementer, yang jelas bertentangan dengan Konstitusi RI yang menganut azas kabinet presidensial. Demi demokrasi, demi persatuan dan kesatuan, Soekarno merelakan kekuasaan sebagai presiden.
- b. Peristiwa 17 Oktober 1952: Tuntutan terbuka dari pihak angkatan Darat untuk membubarkan parlemen. Saat itu Soekarno menolak karena ia masih setia pada konstitusi.
- c. Pemberontakan PRRI/Permesta, pemberlakuan SOB, keadaan darurat perang, peristiwa Irian Barat, nampak jelas sekali bahwa pihak Angkatan Daratlah yang diuntungkan.
- d. Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan raksasa Belanda (The Big Five). Awalnya masuknya angkatan darat dalam bidang ekonomi, misalnya jenderal-jenderal mulai memasuki jabatan-jabatan sebagai direktur perusahaan-perusahaan negara, mula-mula di bidang niaga, meningkat ke bidang industri sampai ada yang menguasai ladang minyak.²⁸¹
- e. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan Angkatan Darat yang menjadi motor dan sekaligus sebagai pendukung utama. Dengan demikian, maka kesempatanpun terbuka lebar bagi Angkatan Darat untuk melansir demokrasi menurut konsep mereka. Tidak pula dapat dilupakan bahwa pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh Soksni sebagai komponen kekuasaan Angkatan Darat. Akan tetapi sesudah 1965 beredar berita bahwa semua kejadian tersebut adalah impementasi dari ambisi Soekarno yang haus kekuasaan dengan dukungan PKI.²⁸²
- f. Konfrontasi dengan Malaysia juga merupakan kesempatan emas bagi angkatan darat yang mengontrol seluruh negeri lewat konsep penguasaan teritorial, untuk lebih leluasa lagi memegang anggaran belanja negara dan memegang mandate-blanko untuk mengadakan pembelian senjata secara besar-besaran.²⁸³

²⁸¹ *Ibid.*, hlm. 230. Baca juga Adian Husaini, *Indonesia Masa Depan Perspektif Peradaban Islam*, Orasi Ilmiah dalam acara Tasyakur gelar “Doktor” Adaian Husaini oleh INSISTS di Aula Masjid Al-Furqan Dewan Da’wah, 18 April 2009. hlm. 33

²⁸² *Ibid.*, hlm. 231. Baca juga Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh, Metode Penelitian Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm., 16.

²⁸³ Atmosoeparto, Kisdarto. *Pandangan Hidup dan Kepribadian Bung Karno dari A-Z (Kecemerlangan, Kebijakan, dan Kepedulian pada Penderitaan Bangsa)*. (Malang : Bayu Media Publishing ; 2007), hlm. 207

Ketika pembunuhan tetap berlanjut, Presiden Soekarno berbicara menentang kejadian yang merupakan “epilog” dari insiden Gerakan 30SPKI. “Epilog ini” katanya, “telah mengganggu sukma, telah membuatku sedih, membuatku khawatir.....Dengan terus terang kukatakan aku meratap kepada Allah, bertanya kepada Tuhan, bagaimana ya Allah, Robbi, bagaimana semua ini dapat terjadi?” Walaupun tak perlu diragukan bahwa Soekarno benar prihatin melihat bayangan pembunuhan sadir oleh PKI, namun Soekarno juga sepenuhnya sadar akan implikasi politik dari semangat anti-PKI itu.²⁸⁴

Menurut hemat penulis, perubahan dari sistem pemerintahan demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin adalah wujud keberhasilan Soekarno dalam mengembalikan kekuasaan dirinya sebagai presiden. Soekarno menggandeng partai-partai politik yang mendukung idenya dan bahkan mereka mendapatkan posisi dan jabatan strategis serta Soekarno membumihanguskan partai-partai penentangannya. Konsepnya terbungkus dengan gagasan “NASAKOM”, yakni partai nasional, Agama (diwakili NU, PERTI dan PSII), dan Komunis.

3. Sikap Soekarno Terhadap Masyumi

Soekarno melihat bahwa partai politik Islam, Masyumi, merupakan sandungan sebab sejak masa Revolusi partai tersebut telah tumbuh besar menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Hingga awal tahun 1950 Masyumi masih merupakan kekuatan yang dominan di parlemen, oleh karena Soekarno pernah menunjuk formatur kabinet dari Masyumi sebanyak dua kali berturut-turut. Salah satu peristiwa penyerahan formatur kepada Masyumi sangat mungkin justru merupakan upaya memecah kekuatan dalam tubuh Masyumi. Dalam salah satu dari ketiga penyerahan pemilihan formatur kepada Masyumi tersebut, Soekarno memilih Sukiman sebagai formatur tanpa meminta persetujuan Natsir sebagai ketua eksekutif Masyumi. Tindakan Sukiman tetap melaksanakan tugas sebagai formatur tanpa persetujuan eksekutif partai Masyumi tersebut dianggap sebagai tindakan indisipliner

²⁸⁴ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*. (Jakarta : LP3ES ; 1986), hlm. 151. Baca juga Onghokham, *Soekarno. Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965*. (Jakarta : Komunitas Bambu ; 2009), hlm.178.

dalam kepertaian. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam tubuh Masyumi sendiri terdiri dari kelompok-kelompok.²⁸⁵

Pada saat pemerintahan berada di bawah Masyumi itulah maka Soekarno melihat kelemahan intern Masyumi terutama berkaitan dengan perebutan pengaruh jika tidak bisa dikatakan sebagai kekuasaan antara Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.²⁸⁶

Dalam kongres Masyumi yang berlangsung pada akhir tahun 1949 terjadi perombakan kedudukan Majelis Syura, yang berisi para kyai atau ulama, yang sebelumnya merupakan majlis yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan Masyumi menjadi setingkat dengan badan penasehat saja. Dengan adanya perubahan struktur tersebut maka ulama dari kalangan NU merasa posisinya tergeser sebab arahan kerja dari badan yang terbentuk selanjutnya tersebut kurang mampu mempengaruhi kebijakan partai. Keresahan NU semakin memuncak ketika beredar isu bahwa jabatan Menteri Agama akan diserahkan kepada Muhammadiyah. KH. Wahab Hasbullah, Rais 'Am Majelis Syuriah NU, menuntut agar kursi menteri agama tetap diserahkan kepada NU. Tuntutan KH. Wahab Hasbullah antara lain adalah agar perdana menteri tetap dipercayakan kepada Sukiman, sedangkan Abu Hanifah dicalonkan sebagai Menteri Luar Negeri, Zainul Arifin sebagai Menteri pertahanan, dan Wachid Hasyim menduduki jabatan sebagai menteri agama. Tuntutan NU tersebut jelas menggoyahkan kedudukan formatur Sidik dan Prawoto yang telah berhasil menyelesaikan penyusunan programnya.²⁸⁷

Sementara itu dari kalangan Muhammadiyah juga telah mengajukan Fakhri Usman sebagai menteri agama dan pada giliran selanjutnya organisasi massa ini menolak secara tegas tuntutan NU. Alasan Muhammadiyah menolak usulan KH Wahab Hasbullah disebabkan NU telah memegang jabatan kementerian agama selama tiga kali berturut-turut, maka perlu adanya penyegaran kembali. Argumentasi Muhammadiyah tersebut ditampik balik

²⁸⁵ Reaksi Natsir atas peristiwa tersebut digambarkan oleh Herbert Feith sebagai berikut : “ Hanya beberapa jam sebelum formatur menyampaikan susunan kabinet kepada Presiden, Dewan Eksekutif Masyumi (Pimpinan Natsir) mengeluarkan pendapat bahwa tindakan Sukiman sebagai formatur tidak atas nama Masyumi ”. Lihat Cosmas Batubara. *Sejarah Lahirnya Orde Baru, Hasil dan Tantangannya*. (Yayasan Prahita ; Jakarta ; 1986). hlm. 4

²⁸⁶ Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia; Demokrasi, Islam, dan Idiologi Toleransi*, Terjemahan Hartono Hadikusumo, *Loc. cit.* hlm. 138.

oleh NU dengan menyatakan bahwa refreshing kabinet hanya akan menghambat upaya penanaman pengaruh dan dakwah Islam dalam birokrasi kementerian agama. Kemungkinan besar NU pada saat itu merasa bahwa jika kementerian Agama jatuh ke tangan Muhammadiyah maka massa NU yang cukup besar menyokong Masyumi hanya akan menjadi ‘sapi perah’ bagi kekuasaan yang didominasi oleh orang-orang Muhammadiyah. Maka kemudian KH. Wahab Hasbullah juga mengajukan calon lain untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Agama yaitu KH. Masykur, KH. Faturrachman, H. Mustari, dan M. Machien.²⁸⁸

Namun pada akhirnya kementerian agama tetap jatuh ketangan Muhammadiyah sehingga pada giliran selanjutnya terbetik isu keluarnya NU dari tubuh Masyumi. Sampai kemudian dalam kongres ke 19 NU, kejelasan sikap NU telah nyata bahwa organisasi massa tersebut menyatakan keluar dari tubuh Masyumi.²⁸⁹

Selain persoalan di atas, PKI telah merumuskan strategi baru perjuangannya untuk “meng-Indonesiakan Marxisme-Leninisme” dengan menempuh taktik kalsi berupa “front persatuan nasional” yaitu bekerja sama dengan golongan-golongan non-komunis dan mendukung kabinet nasional walaupun dianggap sebagai “borjuasi nasional”.²⁹⁰ Strategi ini mirip jika tidak dapat dikatakan mengadopsi strategi terbaru Uni Sovyet yang berusaha menggandeng Negara-negara yang baru merdeka di Asia,²⁹¹ guna mensukseskan agenda penyebaran paham negaranya. Untuk menghadapi

²⁸⁷ Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, *Bung Karno dan Wacana Islam ; Kenangan 100 Tahun Bung Karno, Loc. cit.*, hlm. 50.

²⁸⁸ Kemungkinan besar hal ini diakibatkan calon sebelumnya yang diajukan oleh KH. Wahab Hasbullah, yaitu KH. Wahid Hasyim, pernah tersandung dengan kasus kegagalan pemberangkatan haji akibat korupsi dalam tubuh Kementerian Agama. Korupsi tersebut sebenarnya merupakan kesalahan dalam sistem kabinet parlementer, namun sebagai menteri agama yang mengurus keberangkatan haji beliau ikut tersangkut dengan perkara tersebut.

²⁸⁹ Lihat Pusat Sejarah dan tradisi ABRI. *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia* . Jilid III. (Markas Besar angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1995). hlm. 39

²⁹⁰ Deliar Noer. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta : LP3ES ; 1982), hlm. 140.

²⁹¹ D. Soegondo. *Komunisme di Indonesia*. (Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, 1981). hlm . 20.

Pemilu 1955, PKI bahkan bersedia menggandeng Partai NU yang merupakan pecahan dari Masyumi.²⁹²

Langkah awal yang dilakukan oleh PKI tersebut terkait dengan agenda politiknya untuk mencegah kemungkinan adanya kerjasama antara Masyumi (dan pecahannya) dengan PNI. Maka kemudian PKI mengeluarkan statemen bahwa Masyumi merupakan golongan borjuis besar yang melayani kepentingan kapitalis luar negeri dan mengemukakan adanya hubungan yang erat antara Masyumi dengan gerakan Darul Islam di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh.²⁹³

Dalam percaturan politik pada masa ini, PNI di bawah kepemimpinan Sidik Djojokusarto lebih memilih bekerja sama dengan PKI dibandingkan dengan Masyumi. Dapat ditelusur bahwa alasan utamanya tentu karena Masyumi lebih merupakan saingan utama dibandingkan PKI dalam Pemilu 1955 dan pengaruh Masyumi yang agamis akan dinetralisasi dan mendapatkan lawan PKI yang berideologi komunis. Terbukti pula salah satu akibat pertarungan politis tersebut telah memecah kelompok-kelompok dalam tubuh Masyumi, dengan ditandai oleh keluarnya NU sebagai ormas utama dalam partai berhaluan Islam tersebut.²⁹⁴

Menurut hemat penulis, Soekarno alergi dengan gagasan dan gugatan oleh tokoh-tokoh Masyumi yang diwakili M. Natsir dan Sukiman yang mengancam posisi dan kedudukannya sebagai presiden. Kekhawatirannya ini yang membuat ia membekukan Masyumi.

4. NU Memberikan Gelar “Waliy al-amr al-dlarury bi al-syawkah”

Kepemimpinan Soekarno sebagai presiden atau kepala negara diawali dengan digelarnya konferensi para ulama yang disponsori oleh Menteri Agama Kyai Masykur, salah seorang tokoh NU. Konferensi ini menetapkan Soekarno sebagai kepala negara/presiden “Waliy al-amr al-

²⁹² Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. *Ibid.* Hlm. 42. Adian Husaini, *Indonesia Masa Depan Perspektif Peradaban Islam*, Orasi Ilmiah dalam acara Tasyakur gelar “Doktor” Adaian Husaini oleh INSISTS di Aula Masjid Al-Furqan Dewan Da’wah, 18 April 2009. hlm. 33

²⁹³ *Ibid.*, hlm. 43. Dwi Purwoko Dwi Purwoko et. all., *Negara Islam*, (Depok: PT. Permata Artistika Kreasi, 2001), hlm. 82

²⁹⁴ Umaruddin Masdar dkk, *Partai Advokasi; Wacana, Keberpihakan dan Gerakan*, cet ke-I (Jogjakarta; KLIK-R, 2004), hlm. 55.

dlarury bi al-syawkah”²⁹⁵ (pemegang kekuasaan temporer dengan kekuasaan penuh). Pijakan berpikir yang digunakan mereka ini adalah bahwa negara telah terwujud dan bagaimanapun harus ada kepala pemerintah yang sah. Secara eksplisit, logika pendekatan fiqh telah dimainkan secara signifikan. Ketika Soekarno dianggap sebagai pemimpin yang sah, maka Soekarno berhak untuk menetapkan kebijakan-kebijakannya termasuk gagasan besar Demokrasi Terpimpin.²⁹⁶

Dalam kontek fiqh siyasyah, mempertahankan suatu bangsa dari kehancuran dan penjajahan adalah kewajiban seluruh ummat. Sebagaimana dalam Islam yang menganjurkan suatu kaum untuk berperang menyelamatkan orang-orang tertindas dan orang-orang lemah di muka bumi. Sebagaimana dalam al-Quran disebutkan:²⁹⁷

Dari sinilah Islam memberikan tanggung jawab politik kepada setiap umat yang hidup dalam satu daulah yang di pimpin oleh Imam (pemimpin) untuk membela rakyat tertindas atau terjajah. Selain untuk memerangi kezaliman sosial, seorang muslim juga dituntut untuk memerangi kezaliman politik dan bentuk kezaliman lainnya,²⁹⁸ siapapun pelakunya. Menurut Soekarno dalam wasiatnya, bahwa “hak tak dapat diperoleh dengan mengemis, hak hanya dapat diperoleh dengan perjuangan”.²⁹⁹ Atas dasar itulah perjuangan membentuk mentalitas rakyat dan bangsa yang merdeka (dalam bingkai kemerdekaan yang semestinya) agar terhindar dari disintegrasi yang diinginkan kolonialisme menjadi penting bahkan wajib. Pandangan tentang sesuatu hal yang tiba-tiba menjadi wajib hukumnya untuk dilakukan sebagaimana dalam kaidah fiqh dijelaskan,³⁰⁰

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

²⁹⁵ Bahtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, cet. ke-I (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. X baca juga Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*, (Jakarta : GIP : 2004). hlm. 30

²⁹⁶ Ahmad Adaby Darban, *Peran Serta Islam dalam Perjuangan di Indonesia*. (Yogyakarta : UII Press ; 1989), hlm. 112.

²⁹⁷ An-Nisa’ (4): 75

²⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, cet. ke-3, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 907

²⁹⁹ Harsutejo, *G30-S, Sejarah yang Digelapkan; Tangan Berdarah CIA dan Rejim Soeharto*, (Jakarta, Hasta Mitra, 2003), hlm. 156 dan Mulyana W Kusumah, *Demokrasi, Partai Politik dan Bung Karno*, dalam *Bung Karno dan Partai Politik, Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, (Jakarta : Penerbit PT Grasindo Persada ; 2001)., hlm. 77

Maka doktrin masyarakat kapitalis yang ditolak oleh Soekarno adalah mengabaikan hak-hak orang miskin dan menjajah. Tanpa mentalitas dan i'tikad revolusioner semuanya tidak sempurna, maka konstruksi mentalitas yang mandiri dan merdeka (*free will*) sebagai wujud dari nasionalisme menjadi wajib hukumnya.³⁰¹

Dalam perspektif fiqh as-siyasah atau (al-fiqh as-siyasyi), upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dirumuskan dalam suatu kaidah³⁰² : teori ini mengatakan bahwa, kepala negara atau pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (*as-sulthan at-tanfidziyyah*) memiliki wewenang penuh untuk mengambil kebijakan yang menyangkut kehidupan publik berdasarkan pertimbangan kemaslahatan ummat.³⁰³

Menurut hemat penulis, Pemberian gelar *Waliy al-amr al-dlarury bi al-syawkah* oleh NU kepada Soekarno karena beberapa alasan, yaitu : *Pertama*, kepemimpinan Soekarno dianggap refresentatif umat Islam karena mampu mengayomi dengan bijaksana semua unsur yang ada di masyarakat. *Kedua*, kebijakan-kebijakan Soekarno dipandang adil tanpa mempertimbangkan latar belakang agama maupun partai politik.

E. Kesimpulan Soekarno Sesudah Kemerdekaan Menggagas Sekularisasi Politik Islam

Isu Politik	Demokrasi Parleментар	Demokrasi Terpimpin
Agama tidak ada hubungan dengan negara.	1. Apa sebab Turki memisah agama dari negara. 2. Cita-cita Islam dapat tersalurkan terutama dalam kebenaran praktis dan bukan pada kebenaran normatif	1. Islam adalah agama wahyu yang hanya membicarakan masalah moral etika, 2. Tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis tentang negara, 3. Tidak ada ijma

³⁰⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Loc. cit. hlm. 359

³⁰¹ Nurdin M. Amin. *Sejarah Pemikiran Islam*. (Bandung : Amzah : 2010). hlm. 233.

³⁰² Umaruddin Masdar dkk, *Partai Advokasi; Wacana, Keberpihakan dan Gerakan*, cet ke-I (Jogjakarta; KLIK-R, 2004), hlm 12

³⁰³ Bahtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia* (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2003); R. William Liddle, "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation", *Journal of Asian Studies* 55, no. 3 (Agustus 1996), h. 613-634; Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance* (New York: Routledge, 1995). hlm. 221.

		dikalangan umat Islam untuk menyatukan antara agama dengan negara
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan agama 2. Agama ada dalam sendi kehidupan sehari-hari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran partai politik Islam harus dominan 2. Islam menekankan persaudaraan universal. 3. Islam menentang ketidakadilan
Nasakom sebagai bentuk akomodasi partai dan kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kebebasan partai untuk menyusun kabinet namun gagal. 2. Integrasi bangsa tidak tercapai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akomodatif kepentingan politik tiga kaki, yaitu Nasionalis, agama, dan Komunis. 2. Ketiga aliran ini adalah aliran pemikiran politik yang hidup dan berkembang di Indonesia. 3. Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa 4. Masyarakat dapat hidup secara berdampingan dan bisa bekerja sama dalam satu integrasi bangsa.
Demokrasi terpimpin sebagai bentuk demokrasi Ideal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan partai lebih dominan pada kepentingan partai dari pada kepentingan negara 2. Partai yang tidak ikut koalisi menjadi partai oposisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demokrasi terpimpin adalah bentuk ideal di Indonesia yang memiliki keberagaman agama, suku bangsa, bahasa, warna kulit dan lain-lain. 2. Demokrasi terpimpin sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pada masa kemerdekaan, Soekarno banyak menggagas pemikiran politik. penulis membagi pada dua bagian, yaitu : *pertama*, masa demokrasi parlementer/liberal. *Kedua*, masa demokrasi terpimpin. Adapun penjelasan keduanya sebagai berikut :

1. Pemikiran politik Soekarno pada masa demokrasi parlementer

Isu politik Soekarno pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin terfokus pada 4 masalah, yakni ; Agama tidak ada hubungan

dengan negara, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, Nasakom sebagai bentuk akomodasi partai dan kebangsaan serta Demokrasi terpimpin sebagai bentuk demokrasi Ideal. Adapun rinciannya sebagai berikut :

a. Agama tidak ada hubungan dengan negara.

Pada persoalan agama tidak ada hubungannya dengan negara, Soekarno munculkan pada saat penyusunan bentuk negara. Soekarno ingin melakukan sekularisasi di Indonesia. Gagasan sekular tersebut dilandasi pada dua hal, yakni ;

1. Apa sebab Turki memisah agama dari negara.
2. Cita-cita Islam dapat tersalurkan terutama dalam kebenaran praktis dan bukan pada kebenaran normatif

b. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa.

Keberhasilan Soekarno untuk melakukan sekularisasi berhasil, maka wujud sekularisasinya adalah :

1. Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan agama
2. Agama ada dalam sendi kehidupan sehari-hari

c. Nasakom sebagai bentuk akomodasi partai dan kebangsaan

Pada masa demokrasi parelementer, sebenarnya Soekarno belum menggagas tentang Nasakom. Tetapi pengalaman empiris inilah yang membuat Soekarno menggagas tentang Nasakom. Adapun pengalaman empiris yang dimaksud adalah :

1. Memberi kebebasan partai untuk menyusun kabinet namun gagal.
2. Integrasi bangsa tidak tercapai, bahkan hampir terjadi des-integrasi bangsa.

d. Demokrasi terpimpin sebagai bentuk demokrasi Ideal.

Pada masa demokrasi parelementer, sebenarnya Soekarno belum menggagas tentang demokrasi terpimpin. Tetapi pengalaman empiris inilah yang membuat Soekarno menggagas tentang demokrasi terpimpin. Adapun pengalaman

empiris Soekarno yang kemudian menggagas demokrasi terpimpin adalah :

1. Pimpinan partai lebih dominan pada kepentingan partai dari pada kepentingan bangsa dan negara
2. Partai yang tidak ikut koalisi menjadi partai oposisi

2. Pemikiran politik Soekarno pada masa demokrasi terpimpin

a. Agama tidak ada hubungan dengan negara.

Pada persoalan agama tidak ada hubungannya dengan negara, Soekarno melakukan sekularisasi. Wujud sekularisasi tersebut dengan menggagas demokrasi terpimpin. Adapun argumentasi yang dikemukakan Soekarno untuk mendukung demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut :

1. Islam adalah agama wahyu yang hanya membicarakan masalah moral etika,
2. Tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis tentang negara,
3. Tidak ada ijma dikalangan umat Islam untuk menyatukan antara agama dengan negara

b. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa.

Pada persoalan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, Soekarno menggagas pemikiran bahwa wujud kesatuan dan persatuan bangsa akan tercapai, apabila semua tunduk dan patuh pada satu kepemimpinan. Soekarno mengajak tokoh-tokoh Islam untuk berpikir rasional. Adapun pokok-pokok pemikiran Soekarno sebagai berikut :

1. Peran partai politik Islam harus dominan
2. Islam menekankan persaudaraan universal.
3. Islam menentang ketidakadilan

c. Nasakom sebagai bentuk akomodasi partai dan kebangsaan

Untuk memperkuat gagasan demokrasi terpimpinnya, Soekarno merumuskan beberapa langkah penting, yaitu :

1. Akomodatif kepentingan politik tiga kaki, yaitu Nasionalis, agama, dan Komunis.

2. Ketiga aliran ini adalah aliran pemikiran politik yang hidup dan berkembang di Indonesia.
 3. Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa
 4. Masyarakat dapat hidup secara berdampingan dan bisa bekerja sama dalam satu integrasi bangsa
- d. Demokrasi terpimpin sebagai bentuk demokrasi Ideal.

Argumentasi lain yang disampaikan Soekarno untuk mendukung gagasan demokrasi terpinpinnya, yaitu :

1. Demokrasi terpimpin adalah bentuk ideal di Indonesia yang memiliki keberagaman agama, suku bangsa, bahasa, warna kulit dan lain-lain.
2. Demokrasi terpimpin sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pemikiran politik Islam Soekarno Setelah Kemerdekaan, yakni *pertama*, Soekarno menyatakan tidak ada hubungan agama dengan negara, Islam adalah agama wahyu yang hanya membicarakan masalah moral etika, dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis tentang negara, serta tidak ada ijma dikalangan umat Islam untuk menyatukan antara agama dengan negara. *Kedua*, Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan cerminan sekularisme politik Islam Soekarno, sebab dengan Pancasila Soekarno mengakui eksistensi agama Islam yakni dengan mendirikan departemen agama (kementrian agama). *Ketiga*, Kebijakan politik Soekarno menciptakan demokrasi terpimpin sebagai demokrasi ideal Indonesia. Soekarno mengambil langkah dengan mengganti sistem politik parlementer dengan sistem baru yang dikatakan ideal dengan kepribadian Indonesia. Sistem ini disebut sistem demokrasi musyawarah-mufakat atau Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, demokrasi terpimpin adalah manifestasi sekularisme politik Islam Soekarno dalam pengertian bahwa ini merupakan kebijakan politik lanjutan dari Pancasila. *Keempat*, NASAKOM ; Akomodatif kepentingan politik tiga kaki, yaitu Nasionalis, agama, dan Komunis. Ketiga aliran ini menurut Soekarno adalah aliran pemikiran politik yang hidup dan berkembang di Indonesia. Soekarno menyusun konsep di atas itu dengan tujuan untuk mempersatukan sikap (*common denominator*) dari berbagai aliran pemikiran itu agar mereka dapat hidup secara berdampingan. Faktor yang bisa membuat mereka

bekerja sama dalam satu integrasi adalah kedudukan mereka sebagai warga dalam satu bangsa.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pemikiran politik Islam Soekarno setelah kemerdekaan dengan menggunakan kerangka transformatif dari ide-ide dasar transformatif Bill Gould dalam sistem perilaku, sistem berfikir dan sistem kepercayaan dengan transformatif versi Kuntowijoyo yang memaknai transformatif dengan liberalisasi (pembebasan dari keterpurukan), humanisasi (memanusiakan manusia), dan trasendental (kerangka Ilahiyah) serta gerak intelektual dan sosial politik Karl Steembrink. Berangkat dari tiga teori transformatif tersebut, penulis berkesimpulan bahwa pemikiran politik Soekarno adalah **sekular**.

Adapun yang melatarbelakangi sekularisme Soekarno, yaitu : *pertama*, pengaruh Mustafa Kamal At-Taturk yang mendirikan Turki dengan memisahkan peran agama dalam negara. *Kedua*, pengaruh pergaulan di Bandung dengan Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker tentang gagasan Nasionalisme Sekular yang menolak dasar Islam dan Realisme-Sosial Komunis. *Ketiga*, Soekarno menulis dalam bukunya yang populer berjudul *Di bawah Bendera Revolusi* berisi ; “*Nasionalime Islamisme, Marxisme*”. “*kearah persatuan*”, *Apa sebab Turki Memisah Agama dari Negara*.